



WWF

INDONESIA

# PENYU DAN PALOH

PERJALANAN KONSERVASI  
DI EKOR BORNEO

2022



# PENYU DAN PALOH

Perjalanan Konservasi di Ekor Borneo

# PENYU DAN PALOH

## PERJALANAN KONSERVASI DI EKOR BORNEO

### Penulis

Abroorza A. Yusra  
Agri Aditya Fisesa  
Andi Fachrizal  
Hendro Susanto

### ISBN:

### Penanggung Jawab

Imam Musthofa Zainudin

### Pimpinan Produksi

Hendro Susanto

### Editor

Joni Trio Wibowo | Albertus Tjiu |  
Siti Yasmina Enita | Muhammad  
Erdi Lazuardi | Candhika Yusuf |  
Vironica Arnila Wulandari

### Kurator Foto dan Grafis

Agri Aditya Fisesa | Zulkifli Hz |  
Muhammad Taufiq Hidayat |  
Siti Yasmina Enita | Wiliyan  
Fitrinto Ardi

### Foto Cover Depan

©Yayasan WWF Indonesia/ Victor Fidelis Sentosa

### Foto Cover Belakang

©Yayasan WWF Indonesia/ M. Nouval Isnin Akbari

### Penerbit

Yayasan WWF Indonesia

### Sitasi

Yusra, A.A., Fisesa, A.A., Fachrizal,  
A dan Susanto, H. (2022). Penyu  
dan Paloh, Perjalanan Konservasi  
di Ekor Borneo. Jakarta: Yayasan  
WWF Indonesia.

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Perbanyak dan diseminasi bahan-bahan dalam buku ini diizinkan untuk kegiatan pendidikan maupun tujuan-tujuan non komersial tanpa memerlukan izin tertulis dari pemegang hak cipta selama sumber disebutkan dengan benar. Perbanyak untuk tujuan komersial apa pun tidak diperbolehkan tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PROGRAM KELAUTAN PERIKANAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR SINGKATAN

<b>BAB I: REALITA PENYU PALOH</b>	<b>01</b>
1.1 PENYU, SATWA PURBA YANG TERANCAM PUNAH	03
1.2 PANTAI PENELURAN PENYU PALOH	08
1.2.1 PANTAI PENYUMBANG POPULASI PENYU HIJAU	08
1.2.2 KONDISI GEOGRAFI, DEMOGRAFI, DAN MONOGRAFI KECAMATAN PALOH	13
1.3 ANCAMAN BAGI PENYU DI PALOH	20
1.3.1 ANCAMAN DI DARAT	20
1.3.2 ANCAMAN DI LAUT	24
1.4 PERAN PENYU BAGI BUMI DAN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) KONSERVASI PENYU	29
<b>BAB II: MEMBANGUN PERUBAHAN</b>	<b>33</b>
2.1 MERANCANG DAN MEMULAI PERUBAHAN	35
2.1.1 DUA LANGKAH AWAL KONSERVASI PENYU DI PALOH	35
2.1.2 MEMPERKENALKAN PALOH	39
2.1.3 PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN DAN KEGIATAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KAMBAU BORNEO	41
2.1.4 PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYU PALOH DI PANTAI SUNGAI BELACAN	47
2.1.5 FESTIVAL PESISIR PALOH (FESPA)	53
2.2 RAGAM AKTIVITAS KONSERVASI PENYU DI PALOH	57
2.2.1 PENGAWASAN DAN KAJIAN DATA	57
2.2.2 PENANGGULANGAN ANCAMAN TANGKAPAN SAMPING (BYCATCH)	63
2.2.3 RESTORASI VEGETASI PESISIR	67
2.2.4 PEMBERSIHAN PANTAI DARI SAMPAH	69
2.3 DISEMINASI INFORMASI	73
2.3.1 DOKUMENTASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	73
2.3.2 PELATIHAN FOTOGRAFI MASYARAKAT LEWAT PANDACLICK!	76
<b>BAB III: MENJAGA KEBERLANJUTAN KONSERVASI DI PALOH</b>	<b>77</b>
3.1 PENGESAHAN PALOH SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH (KKPD) DAN RENCANA PENGELOLAANNYA	79
3.1.1 PROSES MENDORONG DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) MENJADI PERATURAN DAERAH (PERDA)	79
3.1.2 PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI (RPZ) SEBAGAI SYARAT PENETAPAN KKP3K	83
3.1.3 KOLABORASI KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN KKPD PALOH	89
3.2 PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK LEWAT PENGEMBANGAN EKONOMI ALTERNATIF	91
3.2.1 PENGEMBANGAN BUDIDAYA MADU KELULUT	92
3.2.2 PENGEMBANGAN WISATA EDUKASI	96
<b>BAB IV: DEDIKASI DI TINGKAT TAPAK</b>	<b>103</b>
4.1 MASYARAKAT SEBAGAI PILAR KONSERVASI	105
4.2 INDIVIDU-INDIVIDU INSPIRATIF	109
<b>BAB V: LINI MASA KONSERVASI PENYU DI PALOH DAN DEDIKASI MULTIPIHAK</b>	<b>119</b>

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan perkenaan-Nya sehingga buku Penyu dan Paloh, Perjalanan Konservasi di Ekor Borneo ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tak terasa, sudah 13 tahun Yayasan WWF Indonesia berada di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Rentang waktu 13 tahun (2009-2022) tentu bukanlah waktu yang singkat. Tidak sedikit pula pekerjaan, tugas, serta tantangan yang dihadapi selama kurun waktu tersebut. Demikian juga dengan capaian yang dihasilkan. Salah satu capaian penting yang berhasil diraih adalah ketika Paloh ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi. Hal tersebut merupakan suatu pencapaian hal yang patut disyukuri bersama.

Kecamatan Paloh adalah salah satu habitat peneluran penyu yang utama di Indonesia. Wilayah ini merupakan habitat yang penting bagi penyu. Maka dari itu, merupakan sebuah kebanggaan bagi Yayasan WWF Indonesia dapat turut serta dan berkontribusi dalam upaya konservasi penyu sebagai biota laut yang dilindungi dan terancam punah di Paloh.

Aktivitas konservasi di Paloh pun tidak dilakukan oleh Yayasan WWF Indonesia sendirian, melainkan hasil kerja sama yang melibatkan banyak pihak. Tanpa kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak tersebut, mustahil bagi Yayasan WWF Indonesia untuk menghasilkan pencapaian membanggakan.

Perjalanan konservasi di pantai peneluran penyu di Paloh merupakan wujud nyata komitmen berbagai pihak. Hal ini menjadi kunci penting menurunnya tingkat perburuan telur penyu dalam satu dekade terakhir ini. Tak hanya itu, komitmen berbagai pihak dalam perjalanan konservasi tersebut juga mengantarkan Paloh ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 93 tahun 2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Paloh dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Masyarakat desa yang diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat dan pemerintah desa adalah pionir terdepan dalam mewujudkan cita-cita konservasi. Masyarakat desa menjadi pihak yang paling kerap berjabaku dengan persoalan-persoalan di tingkat tapak dan semestinya menjadi pihak pertama yang mendapatkan manfaat langsung ketika mimpi Kawasan Konservasi terealisasi. Komitmen masyarakat desa yang mengusung semangat gotong royong dan partisipatif menjadi pondasi kuat bagi masa depan konservasi di Paloh nantinya.

Yayasan WWF Indonesia mengucapkan terima kasih atas komitmen masyarakat desa dan semua pihak yang telah mengupayakan konservasi kawasan dan penyu di Paloh berjalan dengan baik meski menghadapi berbagai hambatan. Di antaranya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Barat, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Akademisi serta LSM lain yang juga turut memberikan sumbangsih ide, gagasan, tenaga, maupun pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam kegiatan konservasi.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, kami tidak menutup mata untuk saran dan masukan dari berbagai pihak. Baik sehubungan dengan diterbitkannya buku ini, maupun dengan kegiatan konservasi yang diupayakan untuk terus dilakukan. Kami berharap buku ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pengelolaan Kawasan Konservasi di Paloh secara berkelanjutan, khususnya konservasi penyu.

Terima Kasih dan Selamat Membaca.

**Kepala Program Kelautan dan Perikanan  
Yayasan WWF Indonesia**

Dr. Imam Musthofa Zainudin

# PRAKATA

Buku Penyu dan Paloh, Perjalanan Konservasi di Ekor Borneo ini berisi tentang perjalanan 13 tahun yang dimulai sejak 2009 hingga 2022 para Pemangku Kepentingan dan Yayasan WWF Indonesia dalam mengimplementasikan konservasi kawasan pantai peneluran penyu di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Proses penyusunan buku ini memakan waktu yang tidak sebentar, yaitu dilakukan dalam rentang waktu tahun 2016-2021, dengan pembelajaran sejak tahun 2009. Dalam perjalanan penyusunan buku ini, proses inisiasi, hingga penetapan kawasan konservasi di Paloh melewati berbagai perubahan regulasi yang ada. Sehingga, penyebutan istilah-istilah yang ada mengikuti pada waktu proses tersebut dilakukan. Perubahan regulasi-regulasi yang ada tersebut mempengaruhi perubahan istilah yang digunakan. Misalnya penggunaan istilah Kawasan Konservasi Laut (KKL) menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Jika disesuaikan dengan otoritas pemerintah daerah, maka istilah KKL dan KKP menjadi KKLD atau KKPD. Sejak diberlakukannya Permen KP Nomor 31 tahun 2020, digunakan istilah yang lebih singkat untuk menggantikan istilah lama, yaitu hanya menggunakan istilah Kawasan Konservasi saja.

Buku ini meliputi latar belakang masuknya Yayasan WWF Indonesia ke Kecamatan Paloh, berbagai tantangan ketika menggaungkan aktivitas konservasi, solusi yang diutamakan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, keterlibatan multipihak untuk mewujudkan konservasi pantai peneluran penyu Paloh, target-target yang berhasil diraih, serta potensi keberlanjutan konservasi.

Terdapat lima bab di dalam buku ini dengan penekanan yang berbeda di setiap babnya. Setiap bab telah disusun secara sistematis sesuai pemilihan dan pemilahan tematik isu.

Tulisan buku ini bersifat deskriptif dan naratif. Sehingga, tim penulis berharap buku ini dapat dibaca oleh masyarakat umum maupun seluruh pihak yang memiliki baik secara langsung maupun tidak terhadap konservasi satwa dan habitatnya, khususnya penyu.

**Tim Penulis**

Sambas, 2021

# DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** : Poster ancaman kesehatan mengonsumsi penyu dan telurunya.
- Gambar 2** : Lembar fakta tentang penyu.
- Gambar 3** : Infografis musim puncak peneluran penyu di pantai peneluran penyu Paloh dalam wilayah Desa Sebusubus dan Temajuk.
- Gambar 4** : Peta sebaran spesies dan habitat penting di Paloh.
- Gambar 5** : Hasil pendataan daya tetas tukik pada tahun 2016 hingga Mei 2021
- Gambar 6** : Jumlah pendaratan penyu dalam rentang tahun Mei 2009 - Juni 2021.
- Gambar 7** : Perbandingan penyu yang naik bertelur dan tidak bertelur dalam rentang tahun Mei 2009 - Juni 2021.
- Gambar 8** : Perbandingan sarang selamat dan hilang dalam rentang tahun Mei 2009 - Juni 2021
- Gambar 9** : Peta segmen monitoring di pantai peneluran penyu Paloh.
- Gambar 10** : Infografis hasil kajian mitigasi tangkapan samping (*bycatch*) melalui penggunaan lampu LED hijau pada jaring insang.
- Gambar 11** : Rincian luasan lima KKP3K di dokumen RZWP3K Kalimantan Barat.
- Gambar 12** : Infografis tahapan kerja penetapan lima KKP3K/KKD di Kalimantan Barat.
- Gambar 13** : Peta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pesisir Paloh.
- Gambar 14** : Infografis kunjungan wisatawan di Pos Monitoring Penyu Sungai Belacan Paloh dari tahun 2016 - Mei 2021.
- Gambar 15** : Panduan mengamati dan berinteraksi dengan Penyu.
- Gambar 16** : Infografis hasil kajian daya dukung efektif kegiatan wisata di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Taman Pesisir Paloh.
- Gambar 17** : Tabel matriks keterlibatan multipihak dalam kegiatan konservasi penyu Paloh.
- Gambar 18** : Tabel matriks keterlibatan multipihak dalam kegiatan Festival Pesisir Paloh.
- Gambar 19** : Lini masa kegiatan konservasi Yayasan WWF Indonesia di Paloh, rentang tahun 2009 - 2021.

# DAFTAR SINGKATAN

<b>Bappeda</b>	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>PKPT</b>	: Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh
<b>BHO</b>	: Biro Hukum Organisasi	<b>Pokdarwis</b>	: Kelompok Sadar Wisata
<b>BKSDA</b>	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam	<b>Pokja</b>	: Kelompok Kerja
<b>BMP</b>	: <i>Best Management Practices</i>	<b>Pokmas</b>	: Kelompok Masyarakat
<b>B POM</b>	: Badan Pengawas Obat dan Makanan	<b>Pokmaswas</b>	: Kelompok Masyarakat Pengawas
<b>BPSPL</b>	: Balai Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut	<b>PP</b>	: Peraturan Pemerintah
<b>Budare</b>	: Bujang Dare	<b>Prolegda</b>	: Program Legislasi Daerah
<b>BUMDes</b>	: Badan Usaha Milik Desa	<b>PSDKP</b>	: Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
<b>B3</b>	: Bahan Berbahaya dan Beracun	<b>P2SDKP</b>	: Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
<b>CITES</b>	: <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>	<b>RAN</b>	: Rencana Aksi Nasional
<b>DKP</b>	: Dinas Kelautan dan Perikanan	<b>Raperda</b>	: Rancangan Peraturan Daerah
<b>FESPA</b>	: Festival Pesisir Paloh	<b>RPJMDes</b>	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
<b>Ha</b>	: Hektar	<b>RPZ</b>	: Rencana Pengelolaan dan Zonasi
<b>IAMFlyingVet</b>	: <i>Indonesia Aquatic Megafauna Flying Vet</i> /Perkumpulan Dokter Hewan untuk Megafauna Perairan	<b>RTRWP</b>	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
<b>IUCN</b>	: <i>International Union for Conservation of Nature and Natural Resources</i>	<b>RZWP3K</b>	: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
<b>Kepmen KP</b>	: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan	<b>SK</b>	: Surat Keputusan
<b>Km</b>	: Kilometer	<b>TED</b>	: <i>Turtle Excluder Device</i>
<b>KKHL</b>	: Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	<b>ToT</b>	: <i>Training of Trainer</i>
<b>KKP</b>	: Kementerian Kelautan dan Perikanan	<b>TP</b>	: Taman Pesisir
<b>KKLD</b>	: Kawasan Konservasi Laut Daerah (Penyebutan istilah Kawasan Konservasi Perairan sebelum tahun 2014)	<b>TPK</b>	: Taman Pulau Kecil
<b>KKP3K</b>	: Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<b>TWA</b>	: Taman Wisata Alam
<b>KKPD/KKPN</b>	: Kawasan Konservasi Perairan Daerah/Nasional	<b>TWP</b>	: Taman Wisata Perairan
<b>LED</b>	: <i>Light-Emitting Diode</i>	<b>Titik (.)</b>	: Untuk penggunaan angka ribuan
<b>LPPOM MUI</b>	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia	<b>Koma (,)</b>	: Untuk penggunaan angka desimal
<b>LSM</b>	: Lembaga Swadaya Masyarakat		
<b>MPA</b>	: <i>Marine Protected Area</i>		
<b>NGO</b>	: <i>Non-Government Organization</i>		
<b>NOAA</b>	: <i>National Oceanic and Atmospheric Administration</i> (Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang berfokus pada kondisi samudera dan atmosfer)		
<b>Pemda</b>	: Pemerintah Daerah		
<b>Perdes</b>	: Peraturan Desa		
<b>Permen KP</b>	: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan		
<b>PIRT</b>	: Pangan Industri Rumah Tangga		
<b>PKP</b>	: Penyuluhan Keamanan Pangan		

# **BAB I: REALITA PENYU DAN PALOH**



©Yayasan WWF Indonesia/Firman

# 1.1 PENYU, SATWA PURBA YANG TERANCAM PUNAH

“Kelangsungan hidup tujuh jenis penyu di dunia terancam oleh perilaku manusia”

Terdapat 7 jenis penyu yang ada di dunia, yaitu penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), penyu tempayan (*Caretta caretta*), penyu pipih (*Natator depressus*), penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), dan penyu kempi (*Lepidochelys kempii*).

Enam dari tujuh jenis yang tersisa, dapat ditemukan di perairan Indonesia, kecuali penyu kempi. Sedangkan penyu pipih, satu dari enam jenis penyu di Indonesia yang tidak atau belum ditemukan tempat mereka mendarat di pesisir manapun di Indonesia. Sementara ini, penyu pipih terindikasi mendarat dan bertelur di pantai Australia.

Selain perilaku manusia, pemanasan global merupakan salah satu faktor alami yang memengaruhi penurunan populasi penyu. Meningkatnya suhu bumi berpengaruh secara langsung terhadap reproduksi penyu. Idealnya, suhu yang dibutuhkan dalam proses penetasan telur penyu antara 24-33°C. Jika temperatur terlalu tinggi, maka akan membuat tukik (anak penyu) yang menetas dari telur didominasi oleh jenis kelamin betina, begitu pula sebaliknya.

Dengan kata lain, pemanasan global akan memperbanyak penyu berjenis kelamin betina dan mengurangi populasi penyu jantan. Sel telur pada betina kemudian akan dihadapkan pada masalah pembuahan karena tidak tersedianya cukup pejantan. Hal ini menyebabkan tingkat reproduksi menjadi menurun dan regenerasi penyu menjadi terhambat.

Induk penyu bertelur dengan siklus 2-4 tahun. Dalam satu masa peneluran, induk penyu akan berkunjung ke pantai sebanyak 4 hingga 7 kali untuk meletakkan ratusan butir telur ke dalam pasir yang ia gali sendiri. Usai menimbun telur, induk penyu akan kembali ke laut.

Tanpa dierami sang induk, alam menjadi penentu berhasil atau tidaknya telur penyu menetas. Kondisi

Tanpa dierami sang induk, alam menjadi penentu berhasil atau tidaknya telur penyu menetas. Kondisi pantai pun sangat memengaruhi daya tetas telur. Faktor yang sangat menentukan meliputi kebersihan, temperatur, dan kelembaban pantai. Fluktuasi temperatur yang ekstrim akibat perubahan iklim berpotensi menyebabkan embrio di dalam telur tidak berkembang. Bahkan, situasi tersebut dapat menyebabkan kematian pada embrio. Tak hanya itu, kelembaban sarang yang tinggi akibat curah hujan dan pasang air laut juga dapat menyebabkan telur membusuk. Sebaliknya, apabila kelembaban terlalu rendah yang sebagian besar disebabkan oleh pemanasan global dan rusaknya vegetasi pantai, maka telur akan menjadi kering, keriput, lantas akan gagal menetas.



Perjuangan telur penyu belum selesai sampai di situ. Saat telur berhasil menetas dan tukik (anak penyu) telah keluar dari telur dan sarangnya, mereka masih harus menghadapi ancaman predator alami. Di darat, ada anjing, biawak, babi hutan, buaya, kepiting, dan burung-burung pantai yang sewaktu-waktu dapat memangsa mereka. Di laut, ikan-ikan predator,



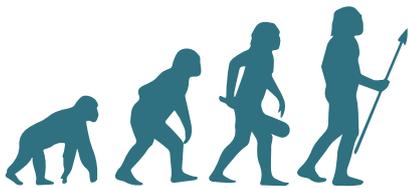
©Yayasan WWF Indonesia/Udiyansyah

*Penyu hijau sedang melakukan proses peneluran.*

terutama hiu selalu mengintai bahkan hingga mereka dewasa. Rantai makanan antara pemangsa dan yang dimangsa tak dapat dipungkiri mempunyai andil dalam keterancaman eksistensi penyu. Meski demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang wajar dalam rantai ekosistem.



©Yayasan WWF Indonesia/Andi Priansyah



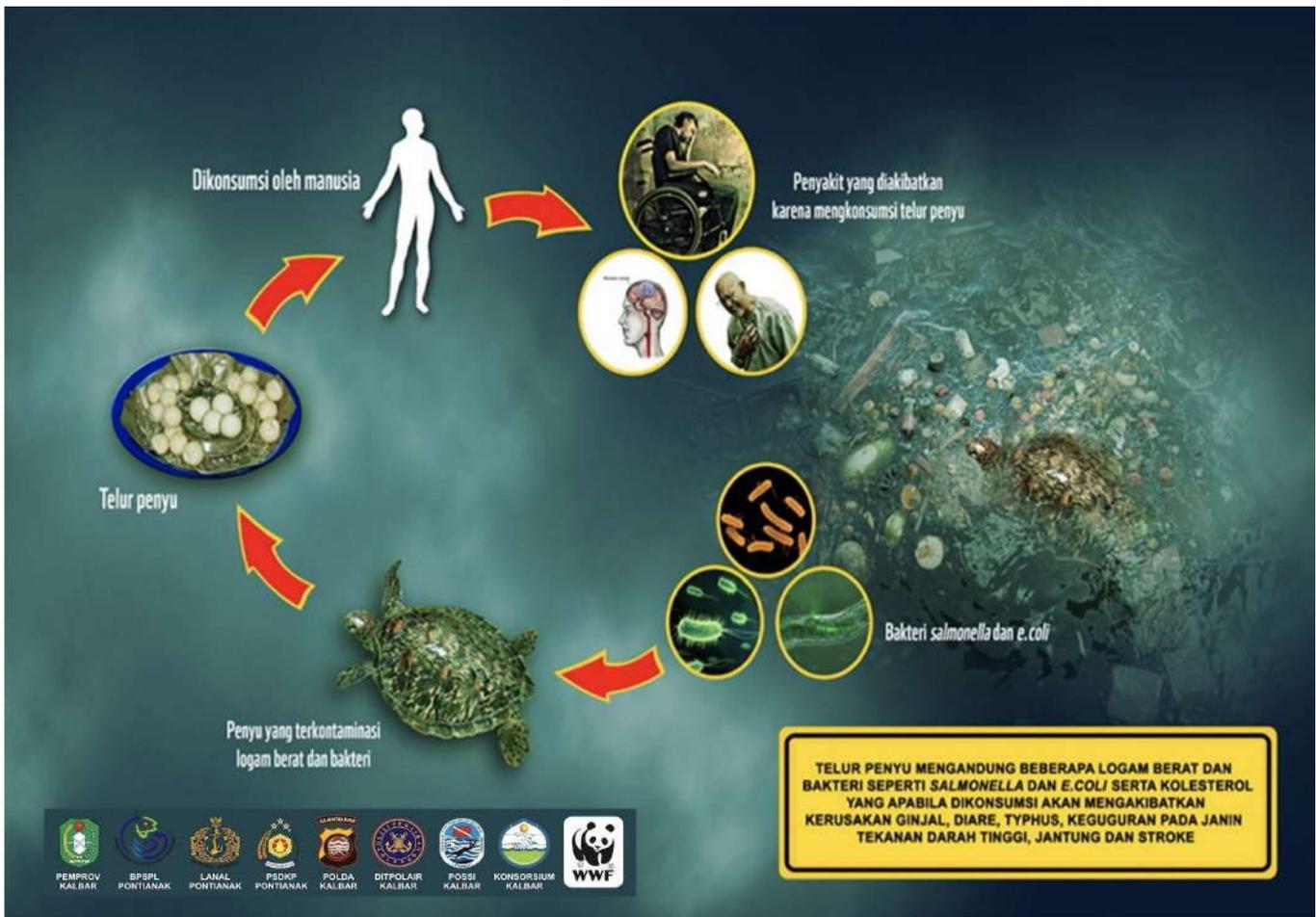
**PERSOALAN PELIKNYA, RANTAI EKOSISTEM MENJADI TIDAK SEIMBANG KETIKA MANUSIA, DARI ZAMAN KE ZAMAN, MENJADI PREDATOR PALING UTAMA DI ATAS SEMUA MAKHLUK YANG ADA DI MUKA BUMI.**



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosah

Namun, manusia memiliki kepentingan atas penyu. Baik dengan mengeksploitasi penyu sebagai satwa, juga telur dan habitatnya. Tak jarang, eksploitasi tersebut di atasnamakan budaya, mitos, kepercayaan, pembangunan, maupun ekonomi.

Aktivitas manusia tersebut menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan bagi keberadaan penyu. Perburuan penyu jelas dilarang oleh undang-undang. Bahkan, bukti medis menunjukkan bahwa mengonsumsi satwa-satwa tertentu, termasuk penyu dapat membahayakan kesehatan. Ironisnya, kecenderungan perburuan penyu masih tetap terus terjadi.



Gambar 1. Poster ancaman kesehatan mengonsumsi penyu dan telurnya.



Di Mentawai, Sumatera Barat, pada 18 Februari 2018, tiga orang tewas dan lainnya dilarikan ke rumah sakit usai mengonsumsi daging penyu ketika melakukan pesta adat. Peristiwa tersebut menambah daftar korban sakit hingga merengas nyawa akibat mengonsumsi daging penyu (Sumber: Mongabay<sup>1</sup>).

Pusat Data dan Informasi Penyu Sumatera Barat, Universitas Bung Hatta, juga menyatakan, sejak tahun 2005 hingga 2018, di Sumatera Barat, tercatat 37 orang meninggal akibat mengonsumsi daging penyu. Bencana terbesar terjadi pada Maret 2013, di Dusun Sao, Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Saat itu, 148 orang dilarikan ke rumah sakit dan empat orang meninggal setelah menyantap daging penyu. Korban tewas termasuk seorang bayi berusia 11 bulan yang terpapar racun melalui air susu ibunya.

<sup>1</sup>Vinolia, Usai Konsumsi Penyu, Puluhan Warga Mentawai Keracunan, Tiga Tewas. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/02/25/usai-konsumsi-penyu-puluhan-warga-mentawai-keracunan-tiga-tewas/>.

Bukti ilmiah menunjukkan penyu memiliki kandungan zat-zat berbahaya dalam tubuhnya sebagai konsekuensi atas kemampuannya menjelajah lautan. Daging penyu berpotensi memendam arsenik dengan kadar toksin lebih tinggi dari pada satwa laut manapun, memiliki kadar logam kadmium yang melebihi kapasitas manusia mencernanya, serta mengandung merkuri.



## **TUBUH PENYU JUGA MENGANDUNG POLUTAN ORGANIK PERSISTEN ATAU CAMPURAN BERBAGAI PESTISIDA, DAN MIKROBA PENYEBAB TUBERCULOSIS DAN SALMONELLA. DAYA TAHAN TUBUH PENYU BERBEDA DENGAN MANUSIA, SEHINGGA SAAT KANDUNGAN-KANDUNGAN TERSEBUT BERPINDAH KE TUBUH MANUSIA, YANG TERJADI ADALAH ANCAMAN PETAKA KEMATIAN.**

Selain dikonsumsi dagingnya, di beberapa wilayah di Indonesia, perburuan penyu marak dilakukan untuk kepentingan dagang. Tubuh penyu, khususnya bagian karapas, diambil untuk bahan aksesoris. Karapas penyu sisik adalah yang paling sering diincar karena lebih tipis, lebih mudah dibentuk, dan bercorak indah. Bahkan, hingga kini, jika ditelusuri di toko-toko daring (*online*), penjualan kalung, gelang, dan tas berbahan dasar karapas penyu masih marak terjadi.

Padahal mengambil karapas sama artinya membunuh penyu. Ada pelaku yang melepas karapas dengan membelah tubuh penyu. Ada yang memanggangnya, yaitu dengan cara penyu diletakkan terbalik di atas pasir yang sudah dipanaskan dengan bara api, karapas terlepas dengan sedikit paksaan, lalu penyu yang sudah kehilangan karapas dikembalikan ke laut dan pada akhirnya mati.

Cara lain yang kerap dilakukan juga adalah dengan mengawetkan penyu secara utuh. Bangkai penyu remaja atau penyu dewasa yang telah diberi zat pengawet dijual sebagai pajangan dinding.

Selain tubuh dan karapasnya, telur penyu juga mengalami eksploitasi yang mengancam populasinya. Bukan rahasia lagi bahwa telur penyu kerap diambil dalam proses peneluran dari sarangnya untuk dikonsumsi atau dijual. Hal ini terjadi nyaris di semua pesisir pantai peneluran penyu yang ada di Indonesia. Mitos bahwa telur penyu mampu menambah vitalitas pria menjadi salah satu alasan maraknya kegiatan perdagangan telur penyu.

Pembangunan di lokasi pantai turut mengancam. Gemerlap cahaya hotel-hotel atau pemukiman di pinggir pantai menyebabkan polusi cahaya dan mengganggu orientasi arah tukik yang baru keluar dari sarang. Untuk menuju ke laut, tukik memiliki naluri mengikuti cahaya horizon lautan. Namun, jika cahaya pantai terlalu terang, tukik akan kehilangan orientasi. Ia lantas mengikuti cahaya dari arah pantai dan menjadi salah arah. Jika tidak ditemukan oleh manusia baik yang rela mengantar mereka kembali ke pantai, tukik akan menghadapi risiko mati dilindas kendaraan, mati disantap predator di darat, atau mati kehabisan energi.

Tak hanya daratan yang mengancam penyu. Di laut, penyu masih menghadapi bahaya yang tidak kalah ganasnya. Alat tangkap perikanan yang ditebar manusia, seperti jaring insang (*gillnet*), pukat harimau (*trawl*), maupun mata pancing (*rawai* dan *longline*) menjadi ancaman yang lebih besar ketimbang hiu, sang predator alami mereka. Hampir sebagian besar nelayan di pesisir Indonesia pernah mengalami bycatch pada penyu, dalam kondisi hidup maupun mati. Alat tangkap yang dibuang ke laut (*ghost net*) juga dapat menjebak mereka. Belum lagi, sampah-sampah plastik yang kerap dikira ubur-ubur, sering menjadi santapan penyu akibat bau sampah plastik di lautan lama-lama akan menyerupai bau makanan bagi penyu. Jika plastik-plastik tersebut memenuhi lambung, maka tinggal menunggu waktu penyu untuk menanti ajalnya.

Penyu juga terancam kehilangan habitat mencari makan karena tekanan pada ekosistem terumbu karang. Contohnya, aktivitas penangkapan ikan tak ramah lingkungan yang menggunakan alat seperti pukat dan bom. Lalu lintas kapal juga menjadi ancaman tersendiri bagi penyu dari sayatan baling-baling kapal.



# PENYU



## KENALI AKU

**NAMA ILMIAHKU,**  
Ada 7 spesies penyu di dunia, dan 6 di antaranya terdapat di Indonesia yang merupakan famili *Cheloniidae* dan *Dermochelyidae*

**PENYU DAPAT MENYELAM HINGGA 5 JAM TERGANTUNG JENIS PENYUNYA**

Populasi ku dari tahun ke tahun menurun

**PANJANG UKURAN PENYU DEWASA**  
0.7 - 2.4 M

**HABITAT**  
Wilayah Lautan dan Pantai

**HAL YANG UNIK**  
Penyu tidak bisa diidentifikasi secara morfologi eksternal ketika penyu belum dewasa kelamin.

**1:1000**  
hanya 1 dari 1000 tukai yang mampu tumbuh hingga dewasa.

**50-150 TELUR**  
DIHASILKAN DI SETIAP SARANGNYA

**DAYA JELAJAH**  
PENYU MERUPAKAN SATWA PENDEMBARA KARENA BISA MENGARUNG LAUTAN HINGGA RIBUAN KILOMETER. BAHKAN PENYU BELUMDUNG MAMPU MELINTASI SAMUDERA PASIFIK.

**MAKANANKU**  
ubur-ubur, kepiting, rumput laut, udang, siput, alga, moluska

## 6 SPESIES PENYU YANG ADA DI INDONESIA



**PENYU BELIMBING**  
*Dermochelys coriacea*



**PENYU HIJAU**  
*Chelonia mydas*



**PENYU TEMPAYAN**  
*Caretta caretta*



**PENYU PIPIH**  
*Natator depressa*



**PENYU SISIK**  
*Eretmochelys imbricata*



**PENYU LEKANG**  
*Lepidochelys olivacea*

## MENGAPA AKU PENTING?



Migrasi penyu berperan dalam menyebarkan ketubuhan di laut



Penyu membantu pertumbuhan terumbu karang dengan memangsa sponge yang merupakan kompetitor terumbu karang



Penyu menjaga stok perikanan dengan memangsa ubur-ubur yang merupakan predator juvenil benih ikan



Memangkas helai helai lamun tua untuk memudahkan lamun muda tumbuh sehingga dapat menjadi habitat perkembang biakan ikan.



Punahnya penyu akan mengganggu rantai makanan di alam, hal ini dapat merugikan manusia dari sisi ketersediaan ikan dan komoditi laut lainnya.

## ANCAMAN KEPUNAHAN



### PERDAGANGAN ILEGAL

Peminfaatan berlebihan penyu (telur, daging dan karapas) untuk tujuan komersial.



### KERUSAKAN HABITAT

Pengembangan kawasan dan pembangunan di wilayah pesisir yang merusak habitat penyu.



### PERUBAHAN IKLIM

Suhu yang ekstrim dapat mengganggu proses inkubasi telur penyu dan pembentukan jenis kelamin tukai saat menetas.



### BYCATCH

10 dari 100 penyu ter tangkap tidak sengaja oleh alat tangkap perikanan.



### PENCEMARAN (LIMBAH)

Pembuangan limbah dan sampah yang tidak bertanggung jawab menyebabkan timbulnya penyakit bahkan kematian pada penyu.

## KONTRIBUSI WWF



**Mensosialisasikan Circle Hook (pancing lingkaran)**



WWF memperkenalkan penggunaan alat tangkap perikanan yang ramah penyu kepada nelayan di antara penyu pancing lingkaran (circle hook), light stick gillnet (LCS) dan TED (turtle excluder device).



**Memperkenalkan alat tangkap perikanan ramah lingkungan.**



WWF mendampingi masyarakat dalam penyadaran pentingnya keberadaan penyu dalam ekosistem, dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama melestarikannya.



**Mendukung Penegakan Hukum**



WWF mendukung penegakan hukum diantaranya memfasilitasi investigasi serta pelatihan penegakan hukum kejahatan perburuan dan perdagangan ILS (tumbuhan dan satwa liar dilindungi).



**Satellite Tracking**



Alat pantau ini dirancang khusus agar dapat dilekatkan pada tubuh penyu tanpa menyakit atau melukai penyu dan akan terlepas dari kulit waktu terbentuk. Pantauan satelit membantu untuk mengetahui pergerakan, tempat mencari makan (feeding ground), dan pola migrasi penyu; serta mengantisipasi kontak penyu dengan aktivitas manusia yang dapat mengancam keberlangsungan hidup penyu. Hasil pantauan bermanfaat dalam pengeloaan kebijakan konservasi penyu.

[wwf.or.id/donate](http://wwf.or.id/donate)

Mengingat keberadaannya yang terancam punah, maka sudah waktunya penyu diberikan perlindungan hukum. Di Indonesia, perlindungan tentang satwa dilindungi, termasuk penyu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah No. 7 dan 8, Tahun 1999.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan *Conservation Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES), semua jenis penyu telah masuk dalam kategori Appendix I yang artinya tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun. Badan konservasi dunia, *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), memasukkan penyu sisik ke dalam spesies yang "sangat terancam punah". Sedangkan penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan, dikategorikan sebagai satwa "terancam punah".

# 1.2 PANTAI PENELURAN PENYU PALOH

## 1.2.1 PANTAI PENYUMBANG POPULASI PENYU HIJAU

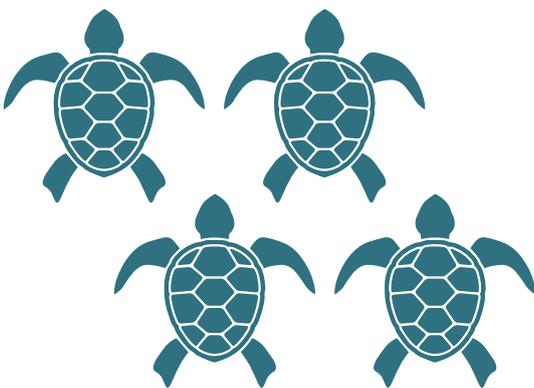
Di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pantai peneluran penyu terhampar dari Dusun Camar Bulan di sebelah utara (perbatasan Indonesia-Malaysia) hingga Pantai Selimpai di bagian

selatan. Pantai berpasir, deburan ombak, ribuan plankton-plankton yang terdampar, serta langkah kaki para nelayan menjadi pemandangan sehari-hari di pantai tersebut.



Desain baliho imbauan untuk pelestarian pantai peneluran penyu dan penghentian perdagangan telur penyu yang dikeluarkan oleh tim Yayasan WWF Indonesia di Paloh.

Dengan hamparan pantai sepanjang 63 kilometer, pantai peneluran penyu Paloh menjadi satu dari dua belas pantai peneluran utama di Indonesia. Setiap tahunnya, kurang lebih 3.700 penyu mendarat di wilayah ini dan hampir setengahnya melakukan kegiatan peneluran.



**EMPAT DARI ENAM JENIS PENYU YANG BERADA DI PERAIRAN INDONESIA DITEMUKAN DI KAWASAN PERAIRAN DAN PESISIR PANTAI KECAMATAN PALOH. KEEMPAT JENIS PENYU TERSEBUT ADALAH PENYU HIJAU (*Chelonia mydas*), PENYU SISIK (*Eretmochelys imbricata*), PENYU LEKANG (*Lepidochelys olivacea*), DAN PENYU BELIMBING (*Dermochelys coriacea*).**

Penyu hijau adalah jenis yang paling sering dijumpai, 98 persen dari total penyu yang naik ke pesisir Paloh adalah penyu hijau. Penyu jenis ini memiliki karapas berwarna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap dan berbentuk menyerupai hati. Jaringan lemak di bawah karapasnya berwarna hijau. Rata-rata penyu hijau bertelur hingga 100 butir dalam sekali peneluran. Persentase tersebut membuat Paloh diduga kuat sebagai penyumbang populasi penyu hijau terbesar kedua, sepanjang jajaran pantai Peninsula Malaysia hingga lautan Sulu Sulawesi.

Sementara yang paling jarang terlihat adalah penyu belimbing. Selama tiga belas tahun terakhir, baru ada satu penyu belimbing yang ditemukan mendarat dalam keadaan hidup dan sehat. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada hari Rabu dini hari, tanggal 15 September 2021. Sayangnya, pada saat itu, penyu belimbing yang naik tidak sampai pada fase bertelur. Kemungkinan disebabkan oleh faktor alami (memeti) atau adanya indikasi gangguan. Sebelum peristiwa mendaratnya penyu belimbing tersebut, keberadaan penyu belimbing pernah teridentifikasi sebanyak tiga kali, namun mati terdampar atau tertangkap tidak sengaja (*bycatch*) oleh nelayan.



*Penyu belimbing terjerat jaring nelayan (bycatch) di Perairan Paloh, 31 Maret 2021, antara pukul 03.00-04.00 WIB.*



**Penyu belimbing naik ke pantai peneluran penyu Paloh, 15 September 2021 pukul 00.40 WIB**

Penyu belimbing merupakan penyu terbesar di dunia<sup>2</sup>. Karapasnya berbentuk menyerupai buah belimbing. Panjang rata-rata karapasnya bisa mencapai lebih dari dua meter. Satu-satunya penyu belimbing yang teridentifikasi naik ke pantai peneluran penyu Paloh memiliki panjang lengkung karapas 174 cm, lebar lengkung karapas 114 cm, dan lebar jejaknya mencapai 194 cm<sup>3</sup>.

Hampir setiap malam penyu yang naik ke darat bisa dijumpai di sepanjang pantai peneluran penyu di Paloh. Bulan Mei hingga Oktober merupakan musim puncak peneluran penyu sehingga di wilayah sepanjang pantai peneluran penyu di Paloh intensitas penyu yang mendarat sangat tinggi. Selama musim peneluran, setiap malam, setidaknya terdapat 20-30 ekor penyu betina yang bertelur. Panjang penyu-penyu tersebut berkisar 75-110 sentimeter.



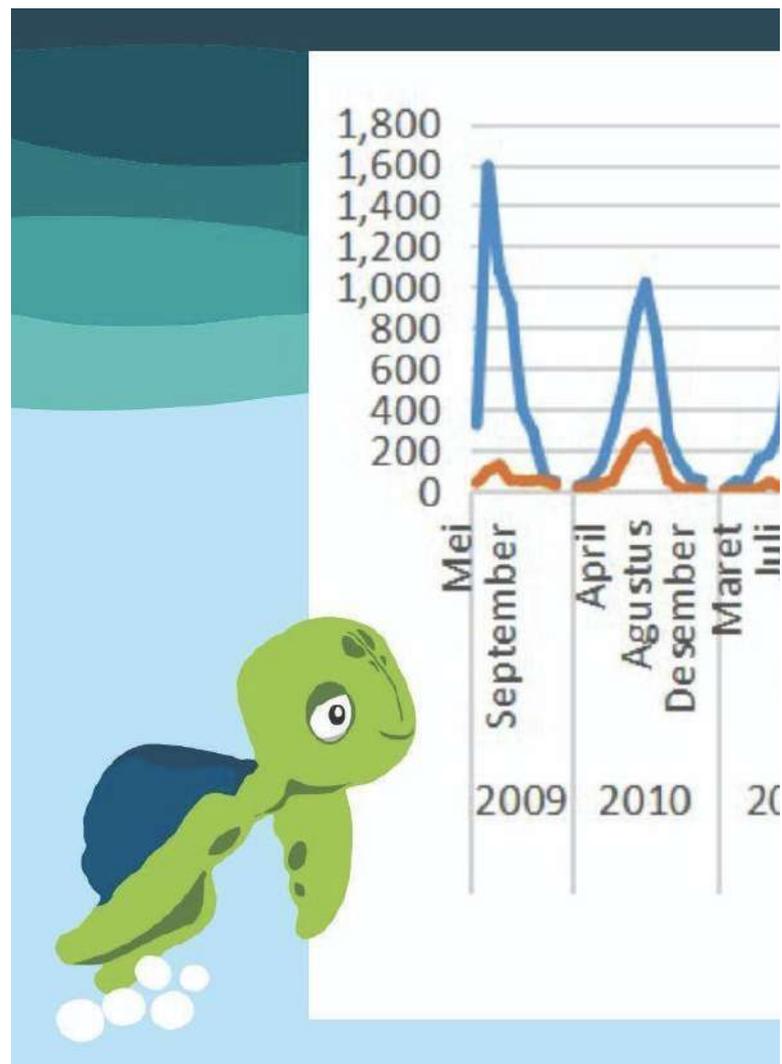
©Roger Leguen/WWF

<sup>2</sup>NOAA Fisheries. Leatherback Turtle. Diakses dari <https://www.fisheries.noaa.gov/species/leatherback-turtle>

<sup>3</sup>Humas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Fenomena Langka, Penyu Belimbing Raksasa Muncul di Pantai Paloh. Diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/34524-fenomena-langka-penyu-belimbing-raksasa-muncul-di-pantai-paloh>



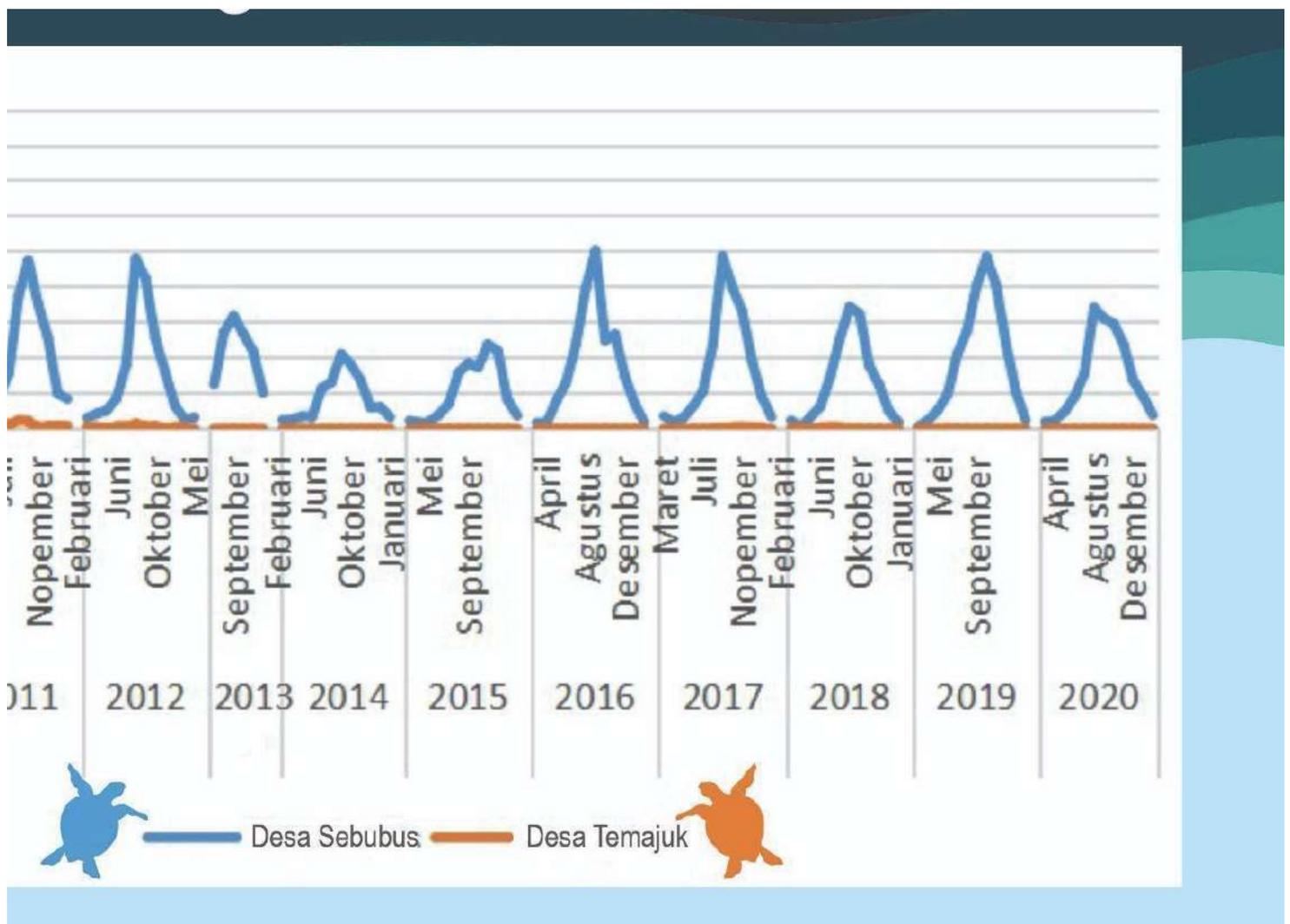
*Lanskap pantai peneluran penyu Paloh.*



Penyu biasanya melakukan peneluran jauh dari bibir pantai. Mereka cenderung memilih bagian pantai yang berbatasan dengan semak belukar atau pohon-pohon khas pantai seperti cemara maupun ketapang untuk bertelur. Tidak jarang, ketika telah jauh naik ke darat, penyu berpapasan dengan manusia atau hewan lain, lalu memilih mundur kembali ke laut. Sebagian, ada pula yang naik ke bibir pantai untuk melakukan observasi lokasi. Sebagian lagi, ada yang telah sampai pada tahap menggali lubang, namun lokasi yang telah dipilih untuk bertelur itu penuh dengan sampah. Akhirnya, penyu-penyu tersebut mengurungkan niat untuk bertelur dan kembali ke laut.



©Yayasan WWF Indonesia/Udiyansyah



Gambar 3. Histogram musim peneluran penyu di pantai peneluran penyu Paloh dalam wilayah Desa Sebusus dan Desa Temajuk.

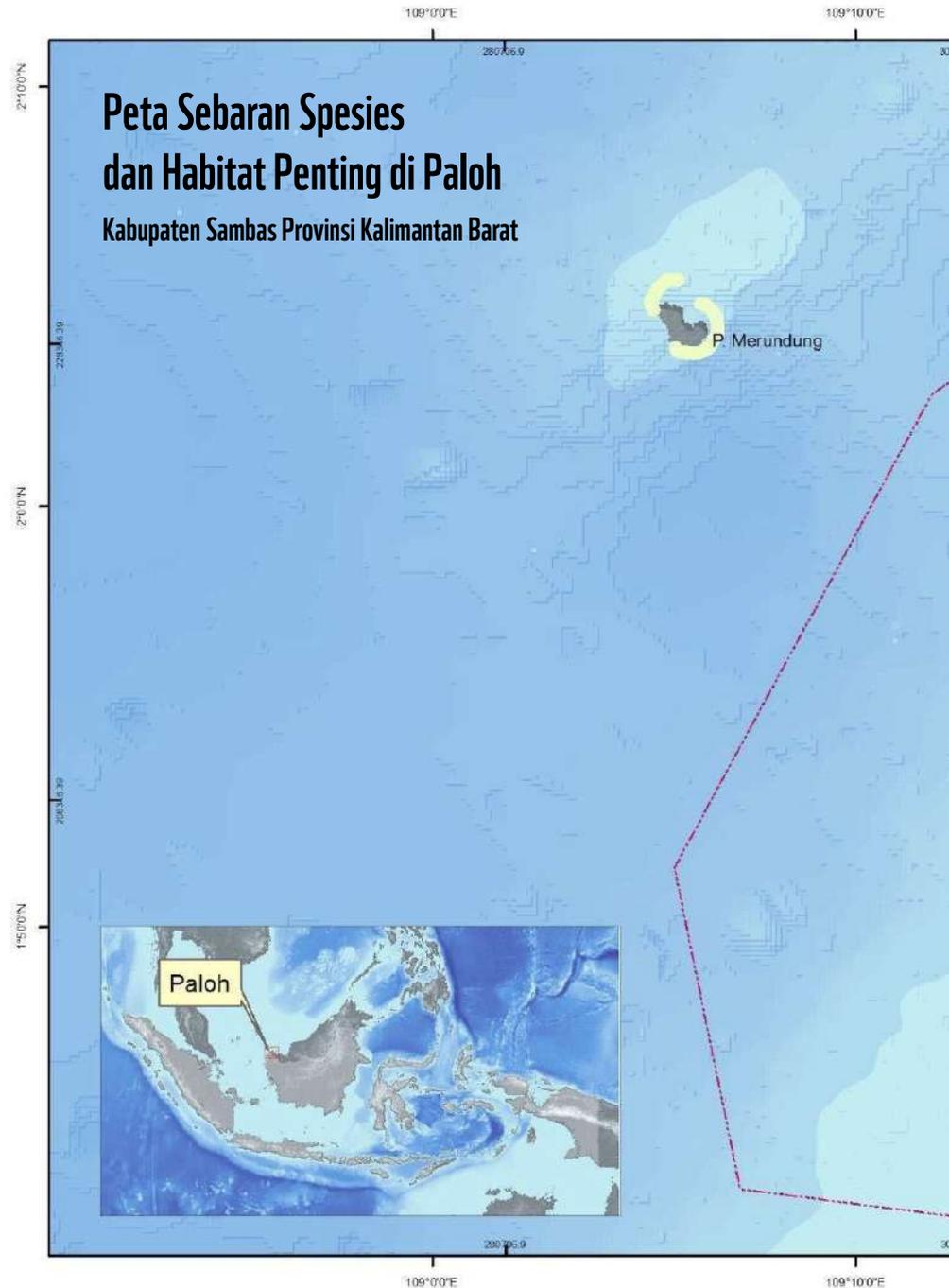
## 1.2.2 KONDISI GEOGRAFI, DEMOGRAFI, DAN SOSIAL MASYARAKAT DI KECAMATAN PALOH

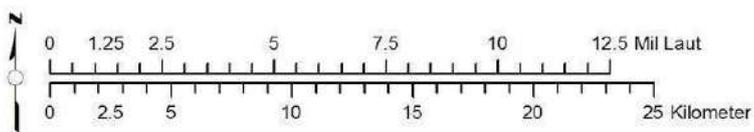
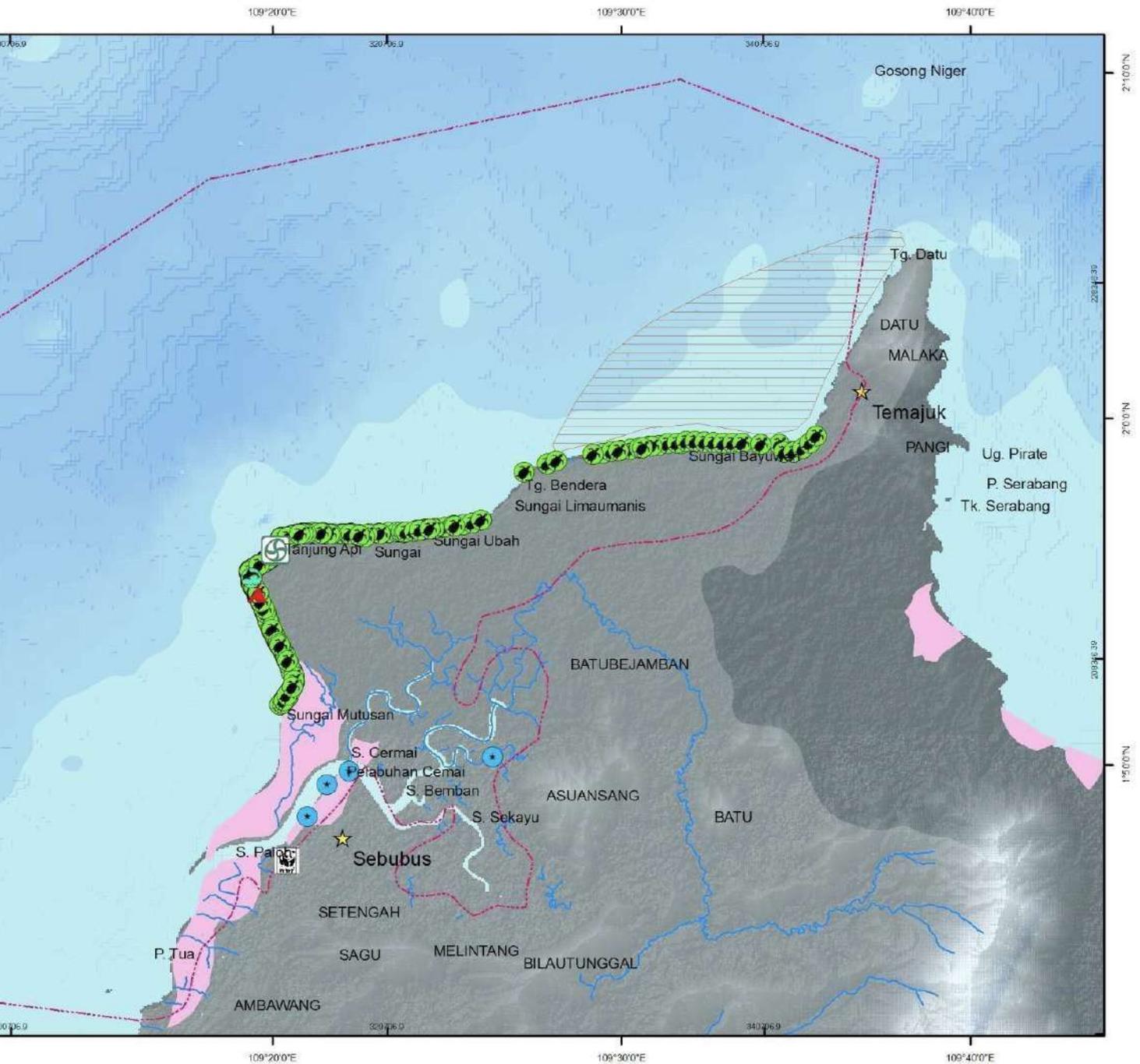
Terletak di ujung utara Pesisir Kalimantan Barat, Kecamatan Paloh berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Perairan ini juga terhubung dengan Laut Natuna Utara.

Pada 2011, Kecamatan Paloh sempat dikenal luas secara nasional karena terjadinya gejolak perebutan kawasan Dusun Camar Bulan antara Indonesia dan Malaysia. Kawasan itu sendiri merupakan bagian dari Kecamatan Paloh. Konflik kawasan Camar Bulan sempat menjadi headline news di beberapa media nasional saat itu. Secara administratif, kecamatan ini berada di bagian utara Kabupaten Sambas yang juga merupakan kabupaten paling utara di pesisir Kalimantan Barat.

Tidak sulit menemukan Paloh di peta. Jika kita melihat peta, Paloh terletak di pesisir barat paling utara Pulau Borneo atau Kalimantan. Jika Sabah, Malaysia, yang terletak di timur laut Pulau Borneo diibaratkan sebagai kepala pulau, maka Paloh adalah ekornya atau *The Tail of Borneo*.

Wilayah administratif Kecamatan Paloh terbagi menjadi delapan desa, yakni Desa Temajuk, Sebusus, Nibung, Malek, Mentibar, Tanah Hitam, Matang Danau, dan Kalimantan. Mayoritas masyarakat Kecamatan Paloh beretnis Melayu (Sambas). Selebihnya adalah China, Jawa, Dayak, dan Batak. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan pada umumnya adalah Bahasa Melayu Sambas. Sebagian besar kosakata bahasa Melayu Sambas sama dengan Bahasa Indonesia, namun diucapkan dengan dialek khas yang mirip dengan dialek Betawi Jakarta.





Sumber Data:

1. Peta Laut DISHIDROS AL. Skala 1:200.000
2. Tim Monitoring WWF & POKMASWAS Kambau Borneo
3. Jarvis A., H.I. Reuter, A. Nelson, E. Guevara, 2008, Hole-filled seamless SRTM data V4, International Centre for Tropical Agriculture (CIAT), <http://srtm.csi.cgiar.org>.
4. General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO), [www.gebco.net](http://www.gebco.net)

**Gambar 4.** Peta sebaran spesies dan habitat penting di Paloh.

Sebagaimana masyarakat Melayu umumnya, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Melayu Sambas dan beberapa etnis lainnya adalah agama Islam. Aktivitas keagamaan maupun kebudayaan pun bernuansa Islami, seperti seni Nazam, Barzanji, Tahar, Radat Sambas dan masih banyak lagi.

Tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat Paloh antara lain adalah Ritual Besiak, Antar Ajong, dan Ngamping. Ketiganya merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen. Selain itu juga sebagai bentuk doa agar panen berikutnya tidak menemui aral melintang. Ritual-ritual tersebut diselenggarakan sekali dalam setahun, yaitu antara bulan Juni dan Juli.



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidells Sentosa



©Yayasan WWF Indonesia/Agri Aditya Fisesa



©Yayasan WWF Indonesia/Hendro Susanto



©Yayasan WWF Indonesia/Hendro Susanto

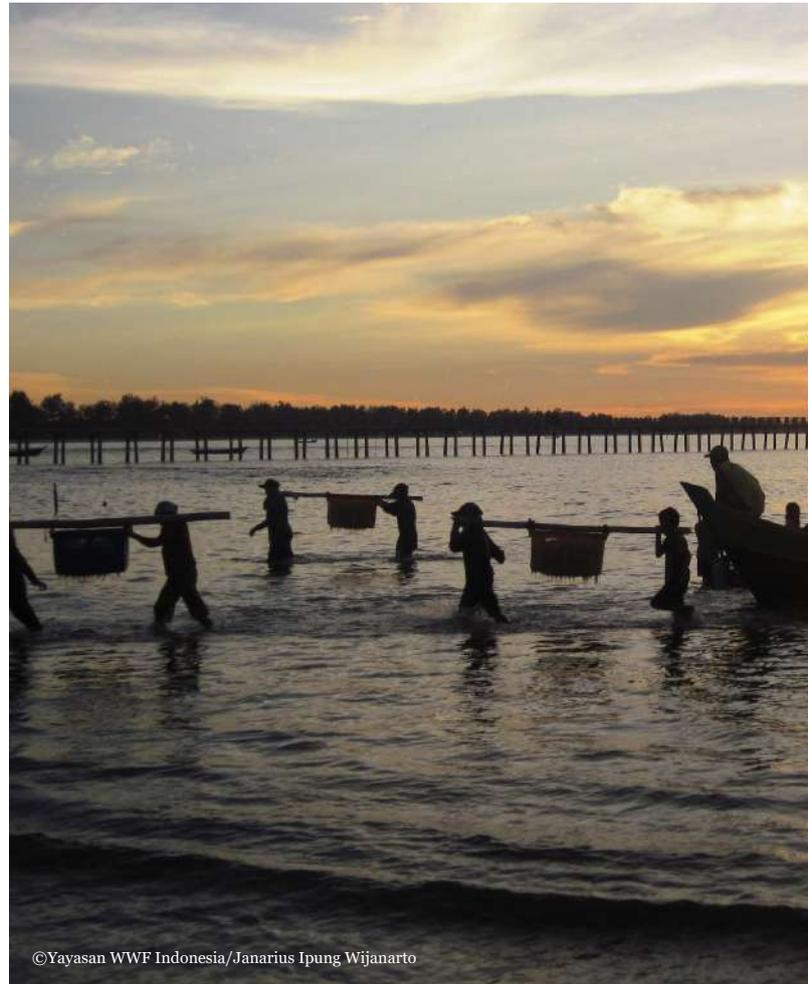
*Berbagai kegiatan ritual dan adat istiadat masyarakat Paloh; Saprahan, Antar Ajong, salah satu prosesi Antar Ajong, dan Ritual Besiak.*

Roda perekonomian masyarakat Paloh pada dasarnya ditopang oleh sektor perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Sementara kegiatan industri kerajinan (*home industry*) serta kegiatan perdagangan dan jasa menjadi sektor-sektor sekunder. Pemukiman masyarakat cenderung berada di ruas jalan lintas utama dengan panjang lebih dari 30 km.

Masyarakat Paloh sangat akrab dengan kehidupan pesisir. Hampir 75% aktivitas masyarakat Paloh sehari-hari dilakukan di area pantai. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Paloh yang memiliki panjang garis pantai lebih dari 100 km, membentang dari selatan ke utara. Sekitar 85% wilayah pantai Paloh sendiri merupakan pantai berpasir.



©Yayasan WWF Indonesia/Hendro Susanto



©Yayasan WWF Indonesia/Janarius Ipung Wijanarto

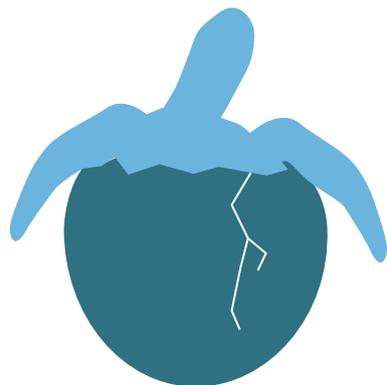


©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosa



©Yayasan WWF Indonesia/Sugeng Hendratno

*Aktivitas nelayan di Kecamatan Paloh.*



**SEKITAR 63 KM DARI PANTAI BERPASIR  
DI PALOH MERUPAKAN PANTAI PENELURAN  
PENYU YANG MELIPUTI KAWASAN  
ADMINISTRATIF DUA DESA:  
DESA SEBUBUS DAN DESA TEMAJUK.**

Area *hotspot* atau area peneluran dengan tingkat pendaratan penyu paling tinggi memiliki panjang pantai sekitar 19,3 km, berada di sepanjang area Sungai Ubah hingga Sungai Mutusan. Sebagian besar area tersebut masuk dalam wilayah administratif Desa Sebusus.

# 1.3 ANCAMAN BAGI PENYU DI PALOH

## 1.3.1 ANCAMAN DI DARAT

Paloh dapat dikategorikan sebagai wilayah yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Pesisir Paloh bukan hanya rumah bagi penyu, melainkan juga rumah bagi beberapa spesies perairan dan spesies darat yang dilindungi. Tidak sedikit pula spesies kunci yang tinggal di sini dan memiliki peranan penting dalam ekosistem. Di antaranya, bekantan (*Nasalis larvatus*), buaya muara (*Crocodylus porosus*), porpoise tak bersirip (*Neophocaena phocaenoides*), lumba-lumba punggung bungkuk (*Sousa chinensis*), ketam tapak kuda (*Tachypleus gigas*), dan beberapa jenis burung enggang (*Buceros spp.*).

Ekosistem perairan Paloh juga kaya akan sumber daya ikan. Beragam jenis ikan yang memiliki habitat di ekosistem terumbu karang, sungai, estuari, dan mangrove dapat ditemukan di Paloh. Kabar baiknya, kondisi habitat beragam spesies ini masih dalam keadaan baik.

**Ragam kekayaan flora dan fauna yang dapat ditemukan di Paloh.**





©Yayasan WWF Indonesia/Udiyansyah



©Yayasan WWF Indonesia/Ridham Supriyanto



©Yayasan WWF Indonesia/Mulyadi



©Yayasan WWF Indonesia/Janarius Ipung Wijanarto

Terdapat lima Taman Wisata Alam (TWA) di Kecamatan Paloh, yakni TWA Tanjung Belimbing, TWA Sungai Liku, TWA Gunung Melintang, TWA Dungan, dan TWA Asuansang. Dari kelima TWA tersebut, hanya TWA Tanjung Belimbing yang menjadi kawasan lindung bagi penyu. Sementara TWA yang lain, berada di darat dan menaungi satwa-satwa terestrial seperti bekantan, jenis-jenis enggang, serta beberapa spesies tumbuhan dilindungi seperti angrek dan kantong semar.

Sejak 1995, TWA Tanjung Belimbing telah diakui sebagai Taman Wisata Alam dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Barat. Pada tahun 2000, statusnya menjadi lebih kuat dan diawasi langsung oleh negara melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat. Pengukuhan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 259/Kpts-II/2000 pada tanggal 23 Agustus 2000. Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing sendiri memiliki luas 810,30 hektar.



**Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing, Paloh.**

Jika dibandingkan dengan total panjang pantainya, TWA Tanjung Belimbing sayangnya tidak memenuhi syarat menjadi kawasan lindung yang ideal untuk peneluran penyu. Panjang pantai TWA Tanjung Belimbing hanya sekitar 12 kilometer saja, jika dibandingkan dengan panjang pantai peneluran penyu Paloh yang keseluruhannya mencapai 63 kilometer.

Berkaitan dengan tingkat perburuan telur penyu, hasil studi awal yang dilakukan oleh Yayasan WWF Indonesia pada tahun 2009-2010 menunjukkan fakta memprihatinkan, yaitu hampir 100% telur penyu diburu di pantai peneluran penyu Paloh. Pada 2009, dari 2,577 sarang yang dijumpai, terdapat 2,553 sarang yang hilang. Dengan kata lain, tingkat kehilangan tersebut mencapai 99,07%.

Pada tahun 2010, dari 2.565 sarang yang ditemui, 2.437 sarang telah hilang. Meski lebih rendah dibandingkan tahun 2009, tingkat kehilangan sarang telur penyu mencapai 95,91%.

Penyebab utama hilangnya telur-telur dari sarangnya dapat dipastikan oleh karena perburuan. Faktor utama penyebab aktivitas perburuan telur penyu di Paloh adalah ketidaktahuan masyarakat umum bahwa penyu beserta telurnya merupakan satwa yang dilindungi. Selain itu juga karena tidak adanya pengawasan serta minimnya akses infrastruktur dan informasi.

Pada tahun-tahun sebelum tahun 2010, Paloh termasuk daerah yang tertinggal dan terisolir. Untuk menuju Desa Temajuk dari Desa Sebus, tidak ada akses jalan darat yang mumpuni, sehingga pantai menjadi jalur utama perjalanan untuk keluar masuk desa. Pasang surut air laut pun menjadi penentu waktu perjalanan untuk dapat dilakukan. Sebab, pasang air laut akan membuat beberapa lokasi pantai terendam air laut sehingga membuat perjalanan akan tertunda.



©Yayasan WWF Indonesia/Mulyadi



©Yayasan WWF Indonesia/Mulyadi



©Yayasan WWF Indonesia/Andi Priansyah



©Yayasan WWF Indonesia/Andi Priansyah

**Sebagian masyarakat masih menggunakan pantai sebagai jalur transportasi antara Desa Sebus dan Temajuk (atas). Telur hasil perburuan dan terduga pelaku yang berhasil diamankan (bawah).**



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosa

Pada saat itulah, ketika berada di sekitar pantai, sesekali ada pengunjung yang singgah sejenak setelah melihat jejak penyu lalu mengikutinya. Jejak-jejak penyu yang terlihat jelas tersebut akan menuntun ke lokasi telur. Pengunjung biasanya akan terdorong untuk menggali pasir hingga sebatas lengan orang dewasa. Di sanalah, telur-telur penyu dapat ditemukan. Jumlahnya puluhan hingga ratusan. Kebanyakan, telur penyu yang ditemukan itu dibawa pergi dengan kantong atau tas. Sebagian besar telur-telur tersebut lalu dijual.

Melimpahnya telur dan populasi penyu sempat dijadikan tradisi oleh masyarakat Paloh. Tradisi perang telur penyu pernah diselenggarakan masyarakat dari tahun 1960-an hingga tahun 1992, tepatnya di bulan-bulan puncak peneluran, antara bulan Juni hingga Agustus. Setelah tahun 1992, telur penyu tidak lagi saling dilempar dalam tradisi perang telur, melainkan direbus dan disantap bersama-sama dalam acara syukuran.

Telur-telur penyu juga pernah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Sambas. Sebelum tahun 2005, Pemerintah Daerah Sambas memberikan izin konsesi kepada pihak swasta pemenang lelang setiap tahunnya untuk mengelola kawasan pantai peneluran penyu, tepatnya di luar TWA Tanjung Belimbing.

Pengelolaan yang diberikan kepada pihak swasta sendiri sebenarnya adalah izin untuk dapat mengambil sebagian telur untuk dijual dan sebagian lagi harus ditetaskan untuk tujuan konservasi. Sayang, pada praktiknya sangat sedikit telur yang ditetaskan dari yang ditetapkan sebelumnya. Maka, pihak swasta pun diwajibkan membayar pajak kepada Pemerintah Daerah Sambas atas konsekuensi kepemilikan mereka terhadap pantai peneluran penyu Paloh.

Akibat eksploitasi tak terkendali, populasi penyu pun terus menurun dan jumlah penyu yang naik ke darat terus berkurang. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Penyu yaitu UU No.5/1990 dan PP No.7/1999 membuat Pemerintah Daerah Sambas perlu mengambil tindakan serius. Tahun 2005, regulasi Pajak Pendapatan Daerah terhadap pelelangan telur penyu akhirnya dicabut. Demikian juga dengan izin konsesi telur penyu yang diberikan kepada pihak swasta.

Namun, pasca tahun 2005, perburuan tidak lantas berhenti begitu saja. Keberadaan penyu masih saja terus terancam. Dicabutnya izin konsesi tidak disertai dengan pengawasan dalam penegakan hukum yang tegas. Meski perburuan telur penyu sudah dilarang dalam rangkaian dan rincian undang-undang, para pelaku hampir tidak mendapatkan hukuman atau konsekuensi apapun atas perbuatannya.

Meski izin konsesinya telah dicabut, kenyataan di lapangan, masih banyak pihak swasta yang berkecimpung di pantai peneluran penyu Paloh. Mereka memanfaatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan mengaku masih memiliki izin, walau sebenarnya sudah tidak lagi sah. Bahkan, mereka memakai tameng oknum pemerintah untuk membohongi masyarakat. Tujuannya untuk memonopoli pantai dan telur penyu yang telah memberikan keuntungan kepada mereka sebelumnya. Situasi ini terjadi selama empat tahun setelah dicabutnya izin konsesi.

Pada 2009, kebohongan mereka terkuak dan membuat masyarakat meradang karena merasa ditipu hingga sempat saling berebut wilayah kekuasaan. Masing-masing dari mereka mengklaim membuat "kavling" kekuasaan di pantai peneluran penyu paloh. Pesisir Paloh yang sebelumnya dikuasai pemegang izin konsesi pun menjadi ladang perebutan. Masyarakat bebas mengklaim wilayah kekuasaan di pantai peneluran penyu Paloh. Persoalan ini terungkap dalam kegiatan field trip jurnalis yang diinisiasi oleh Yayasan WWF Indonesia tahun 2009-2013.

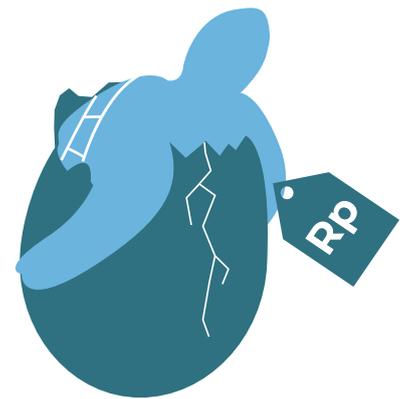


©Yayasan WWF Indonesia/Udiyansyah

Saat itu dapat juga dikatakan sebagai masa-masa kesuraman konservasi penyu. Telur-telur penyu tidak sempat menetas. Dalam beberapa kasus, para pelaku bahkan tidak sabar menunggu telur dikeluarkan secara alami oleh induknya, hingga melakukan tindakan sadis, yaitu membedah induk penyu dan mengambil paksa telur dari tubuh sang induk. Masyarakat sekitar sangat menyayangkan tindakan tersebut, karena sebetulnya masyarakat hanya memperbolehkan para pelaku untuk mengambil telurnya saja, bukan membunuh penyu.

Telur yang berhasil dijarah itu, sebagian besar dijual tidak hanya di wilayah kecamatan saja, namun juga sampai ke Malaysia yang bertetangga langsung dengan Kecamatan Paloh. Di Negeri Jiran, harga telur penyu mencapai hampir dua kali lipat dari harga lokal. Pada musim puncak peneluran, pelaku bahkan bisa menghasilkan jutaan rupiah dengan menjual telur penyu hanya dalam satu malam panen saja.

**DILIHAT DARI KACAMATA MASA LALU, AKTIVITAS PERBURUAN MAUPUN JUAL BELI TELUR PENYU SULIT UNTUK DIKECAM DAN DISALAHKAN. TIDAK ADA INFORMASI APAPUN TENTANG SATWA DILINDUNGI DI PALOH. PENYEBAB UTAMANYA ADALAH KARENA DAERAH INI TIDAK HANYA TERISOLIR SECARA AKSES TRANSPORTASI, NAMUN JUGA MINIMNYA AKSES INFORMASI.**



### 1.3.2 ANCAMAN DI LAUT



©Yayasan WWF Indonesia/Muhammad Nouval Isnin Akbari

*Aktivitas survei tim Yayasan WWF Indonesia di perairan Paloh.*

Kelangsungan hidup penyu ternyata tidak hanya menghadapi ancaman di darat saja, melainkan juga di lautan. Data awal studi bycatch tahun 2012 menunjukkan, setidaknya kurang lebih 500 ekor penyu tertangkap tidak sengaja oleh nelayan setiap tahunnya.

Masalah semakin bertambah oleh sampah-sampah perairan internasional yang mendarat di Paloh. Wilayah perairan Paloh berbatasan dengan perairan luas yang menjadi jalur lalu lintas penting kapal-kapal antar negara, baik kapal perikanan, tanker, maupun kargo. Limbah-limbah dari kapal tersebut tak jarang berakhir di perairan Paloh.



©Magnus Lundgren/WWF



©Yayasan WWF Indonesia/Abdurrahman Maulidi

Ditambah lagi, perairan Laut Natuna Utara juga terhubung dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, dan China. Keterkaitan secara geografis ini ternyata memiliki sisi buruk, yaitu Laut Natuna Utara menjadi jalur sampah di laut (*marine debris*) dari berbagai negara tersebut, yang ujungnya sampah-sampah adakan terdampar di pantai peneluran penyu Paloh.

Terdapat setidaknya tujuh negara yang menjadi sumber sampah yang terdampar ke pesisir Paloh, termasuk Indonesia sendiri. Tidak sulit menebak asal negara penyuplai sampah. Bahasa dan tulisan yang terdapat di label kemasan sampah-sampah tersebut akan merujuk asal sampah. Kebanyakan dari sampah-sampah itu berupa sampah plastik dan botol-botol air mineral, selebihnya adalah sampah organik.



©Yayasan WWF Indonesia/Hendro Susanto



©Yayasan WWF Indonesia/Firman



©Yayasan WWF Indonesia/Zulfian

**Penyu terdampar mati dengan sampah di sekitarnya. Aksi bersih sampah plastik di pantai. Penyu tertangkap tanpa sengaja (bycatch) oleh nelayan Paloh.**

Sampah botol plastik kerap kali terlihat menumpuk dan menutup pantai tempat penyu bertelur. Kondisi semakin memprihatinkan ketika musim badai tiba. Sampah datang ke bibir pantai, bergulung-gulung bersama ombak.

## **BANYAKNYA SAMPAH ADALAH PETAKA BAGI PENYU. MENUMPUKNYA SAMPAH DI PANTAI KERAP MENJADI FAKTOR PENYU MEMBATALKAN PENELURAN. YANG LEBIH FATAL LAGI, PENYU SERING MENGIRA SAMPAH-SAMPAH PLASTIK MERUPAKAN UBUR-UBUR, MAKANAN MEREKA, LALU MEMAKANNYA DAN MEMBAHAYAKAN HIDUPNYA.**

Sampah plastik tidak dapat diproses oleh pencernaan makhluk hidup, termasuk penyu. Dalam jumlah banyak yang melebihi batas toleransi, plastik dalam tubuh bisa mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh hingga berakhir pada kematian. Bahkan, ketika konservasi sudah dilakukan di Paloh, sampah plastik

masih menjadi ancaman bagi keselamatan fauna termasuk penyu.

Contohnya yang terjadi di tahun 2017, sepuluh ekor penyu mati ditemukan terdampar di antara tumpukan sampah. Kejadian ini berlangsung dalam rentang waktu dua bulan. Hasil nekropsi (autopsi pada hewan untuk mengetahui penyebab kematiannya) pada salah satu penyu menunjukkan tidak hanya mikroplastik yang ada di dalam tubuhnya, melainkan juga ditemukan kantong plastik utuh bersarang pada sistem pencernaan di bagian lambung.

Ukuran plastik yang relatif besar, mengakibatkan penyu mengalami penyumbatan makanan pada saluran cerna. Hal itu menyebabkan terjadinya peradangan yang ditandai dengan perubahan patologi berupa bercak merah pada lambung. Penyumbatan mikroplastik pada lambung ini merujuk pada indikasi terjadinya malnutrisi pada penyu yang menyebabkan kematian.

Penyebab yang tidak berbeda ditemukan pada penyu mati yang lain. Selain kantong plastik, ada juga tali plastik (tali pancing) dalam skala kecil yang ditemukan pada salah satu bangkai penyu. Yang lebih mengejutkan, ditemukan pula cairan berwarna hitam pekat yang diduga merupakan cairan aspal. Seluruh saluran cerna yang berwarna kehijauan menunjukkan indikasi bahwa penyu mengalami keracunan hebat.

©Yayasan WWF Indonesia/Andi Priansyah



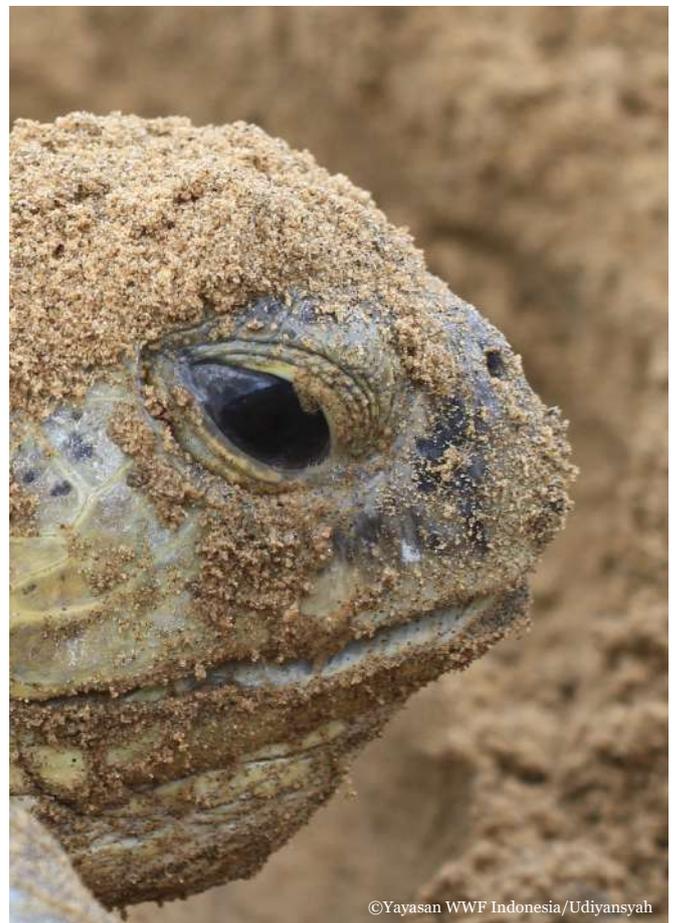


***Bangkai penyu yang terdampar di Pantai Paloh.***

Selama dua bulan di tahun tersebut memang sedikit berbeda. Pasir putih Paloh mendadak ternoda oleh cairan hitam yang berpadu dengan pasir membentuk gumpalan menyerupai aspal. Diduga kuat cairan tersebut berasal dari tumpahan aspal yang diangkut oleh kapal tanker yang berada tidak jauh dari lokasi perairan Paloh. Sepuluh ekor penyu menjadi korban satwa yang berhasil dijumpai dalam kasus tersebut. Besar kemungkinan, jumlah penyu yang mati lebih dari angka yang terdata.

Tahun 2018, peristiwa penyu mati terdampar di Paloh terjadi lagi. Sepanjang bulan Februari hingga April terdapat 21 penemuan. Sejumlah 20 ekor penyu diantaranya ditemukan telah membusuk. Sedangkan seekor penyu yang ditemukan tanggal 9 Februari sempat bertahan hidup. Sayangnya, setelah sembilan hari direhabilitasi, penyu itu tidak terselamatkan dan akhirnya mati.

Kelompok dokter hewan dari IAM Flying Vet melakukan pemeriksaan terhadap kasus 2018 tersebut. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa penyebab kematian penyu adalah faktor keracunan limbah kimia B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang menyerupai aspal. Sedangkan penyu yang sempat hidup memiliki hasil yang berbeda. Ia terdiagnosa malnutrisi akibat tersumbatnya lambung oleh sampah plastik berukuran 5 x 8 sentimeter.



# 1.4 PERAN PENYU BAGI BUMI DAN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) KONSERVASI PENYU

Penyu bukan hanya sejenis satwa purba yang keberadaannya perlu dijaga karena sifat langkanya atau sifat purbanya. Lebih dari itu, penyu merupakan satwa yang menjadi indikator situasi perairan dunia yang sehat. Artinya, keberadaan penyu memiliki peran besar dan menjadi mata rantai penting dalam ekosistem global. Bila dirunut, peranan penyu bagi lautan sangatlah besar. Sementara itu, lautan adalah elemen utama planet ini yang meliputi dua per tiga bagian bumi.

**PENYU MENJADI PENANDA KELESTARIAN SUATU WILAYAH PERAIRAN DAN PANTAI. PENYU MEMAINKAN PERAN BERBEDA SEBAGAI PEMANGSA DAN YANG DIMANGSA DALAM EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT. MASING-MASING JENIS MEMILIKI PERAN TERSENDIRI WALAU SECARA GARIS BESAR MEMPUNYAI PERAN YANG SAMA, YAITU PENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM PANTAI DAN LAUT.**

Penyu hijau adalah spesies pemakan lamun. Penyu jenis ini turut berperan aktif dalam penyebarluasan padang lamun. Rimpang (rhizoma) maupun akar lamun berfungsi sebagai pengikat sedimen yang membuat dasar laut lebih kuat dan stabil. Vegetasi lamun pun turut terjaga dengan keberadaan penyu. Dengan vegetasi lamun yang sehat, area pemijahan ikan pun menjadi terjaga dan akan membawa dampak baik bagi para nelayan.

Penyu sisik berperan penting dalam ekosistem terumbu karang karena merupakan pemakan sponge yang berada pada karang. Karang tua yang patah karena aktivitas penyu sisik saat makan sponge pada karang, akan terbawa arus dan tumbuh menjadi karang baru. Dengan kata lain, penyu sisik turut meregenerasi dan memperluas ekosistem terumbu karang. Terjaganya ekosistem terumbu karang sekaligus membuat kawasan penyangga pantai pun terjaga. Terumbu karang yang lestari mampu menekan terjadinya abrasi pantai dan menjaga keseimbangan wilayah yang menjadi sumber makanan dan pemijahan ikan-ikan karang.

Penyu belimbing merupakan jenis penyu pemakan ubur-ubur sehingga keberadaannya berperan aktif dalam menyeimbangkan populasi ubur-ubur di lautan.

Populasi ubur-ubur yang berlebihan di lautan dapat mengakibatkan arus listrik di perairan akan meningkat dan kondisi ini dapat membahayakan manusia dan ikan-ikan.

Sementara itu, penyu lekang adalah “tempat singgah” bagi burung-burung laut. Penyu lekang mempunyai kebiasaan berada di permukaan laut dalam waktu yang lama dan menjadi tempat bagi burung laut untuk hinggap beristirahat saat bermigrasi. Dengan hinggap di atas karapas penyu, burung-burung itu mencari ikan sebagai bahan bakar energi untuk terbang kembali.

Secara umum, penyu juga merupakan pemindah energi dari laut ke daratan. Proses penggalian sarang yang menjadi salah satu aktivitas peneluran, turut membantu menggemburkan pasir sehingga vegetasi pantai menjadi subur. Sisa telur yang tidak menetas akan turut memberikan nutrisi sebagai penyubur vegetasi. Selain itu, telur-telur yang diinkubasi di pantai merupakan salah satu sumber makanan beberapa satwa predator alami sehingga turut menjaga rantai makanan dalam siklus kehidupan.



**Penyu hijau menuju kembali ke laut (atas) dan sedang melakukan aktivitas peneluran di Pantai Paloh (bawah).**

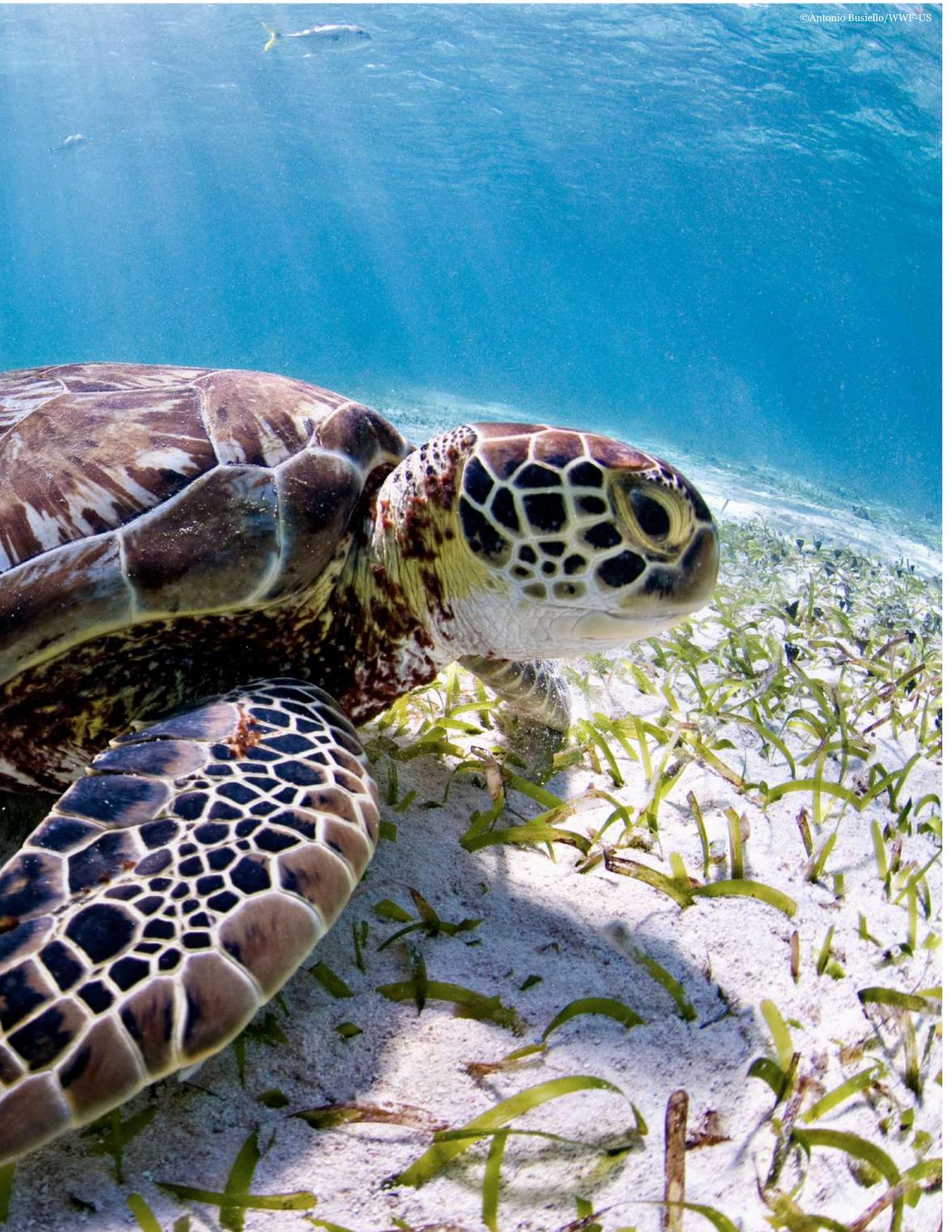
Dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu tahun 2016-2020, telah dirumuskan tujuh poin penting untuk mengatasi permasalahan yang mengancam populasi penyu. Tujuh poin tersebut adalah:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan habitat peneluran penyu di lokasi prioritas,
2. Terwujudnya penurunan penangkapan dan perdagangan penyu dan telur di lokasi prioritas sebesar 50 persen dibanding status data tahun 2016,
3. Terwujudnya penurunan kematian penyu yang tertangkap secara tidak sengaja (*accidental catch*) pada perikanan tuna longline dan gillnet, turun sebesar 30 persen dibandingkan data tahun 2014,
4. Terwujudnya peran aktif masyarakat dalam perlindungan penyu di sekitar lokasi peneluran,
5. Terbangunnya kemitraan strategis dengan berbagai pihak dalam melakukan konservasi penyu,
6. Terimplementasinya ekowisata penyu berbasis konservasi sesuai dengan regulasi di lokasi prioritas pada tahun 2020,
7. Tersedianya sistem informasi dan data base penyu yang terintegrasi pada tahun 2020.

RAN Konservasi Penyu merupakan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap kelestarian penyu, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang agar sumber daya alam yang terancam punah, termasuk penyu, dapat terjaga kelestariannya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, upaya perlindungan penyu sekaligus akan memberi manfaat dan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dari upaya perlindungan tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan sumber daya alam yang ada. Pemanfaatan potensi ekonomi pun dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap spesies tersebut. Hal inilah yang terus diupayakan oleh berbagai pihak, baik pegiat maupun pendukung konservasi di Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat.





# **BAB II: MEMBANGUN PERUBAHAN**



# 2.1 MERANCANG DAN MEMULAI PERUBAHAN

## 2.1.1 DUA LANGKAH AWAL KONSERVASI PENYU DI PALOH

“Seorang pelaut tangguh tak lahir dari lautan yang tenang. Ia justru lahir di tengah badai. Konservasi penyu di Paloh merupakan perjalanan panjang dan berliku dan hanya dapat dilakukan dengan kolaborasi aktif pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.”

Tidak sedikit permasalahan yang ada di Paloh ketika Yayasan WWF Indonesia memutuskan untuk menyelenggarakan aktivitas konservasi di wilayah yang kerap disebut Ekor Borneo ini pada tahun 2009. Berbagai strategi dilakukan agar upaya konservasi penyu yang menjadi tujuan utama dapat terlaksana dengan mulus.

Di awal keberadaannya di Paloh, tim Yayasan WWF Indonesia mengusung dua bentuk tematik kinerja. Kedua bentuk tematik kinerja ini merupakan satu kesatuan, saling mendukung, saling berkaitan satu sama lain, dan sama pentingnya.

**BENTUK KINERJA PERTAMA ADALAH MELAKUKAN KAJIAN SATWA, SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA. KEDUA HAL INI DILAKUKAN SEBAGAI PEMENUHAN DATA ILMIAH YANG BISA DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEABSAHANNYA DAN DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI LANDASAN UNTUK MELAKUKAN PROGRAM SELANJUTNYA.**

Kajian dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat. Dari kajian satwa, sosial, ekonomi, dan budaya yang dilakukan, kemudian mendapatkan

data-data yang meliputi spesies-spesies penyu yang mendarat di pantai Paloh, perkiraan jumlah individu yang naik ke darat, jumlah telur, panjang pantai peneluran, serta akar permasalahan yang mengancam penyu dan habitatnya.

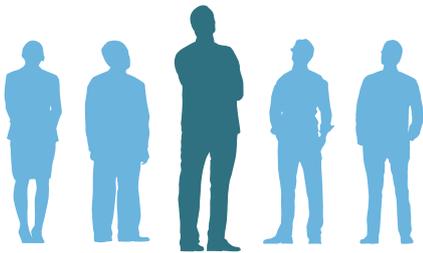
Kajian awal dilakukan pada tahun 2009-2010. Dari kajian tersebut, diketahui bahwa Paloh merupakan pantai peneluran utama yang panjangnya mencapai 63 km. Jenis penyu yang naik ke daratan didominasi oleh penyu hijau. Dari total panjang wilayah pantai peneluran penyu Paloh, 19,3 km di antaranya merupakan *hotspot area* atau area dengan tingkat peneluran paling tinggi. Dalam setahun, rata-rata terdapat sekitar 3.700 pendaratan penyu ke pantai peneluran tersebut.



*Tim Monitoring Penyu Paloh sedang melakukan aktivitas rutin pendataan.*

Meski jumlah pendaratan penyu di pantai Paloh termasuk tinggi, tingkat penjarahan sarang telur penyu pun tak kalah tinggi, yakni hampir mencapai 100%. Akar permasalahan dari penjarahan tersebut sebenarnya disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat

dan minimnya informasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian telur penyu dan populasi penyu. Selain itu juga karena adanya eksploitasi berlebihan atas nama ekonomi, dan kurangnya pemantauan maupun perlindungan di kawasan Paloh.



**BENTUK TEMATIK KINERJA KEDUA ADALAH SOSIALISASI DARI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH HINGGA PEMERINTAH DESA, JUGA KEPADA INDIVIDU-INDIVIDU MASYARAKAT YANG DINILAI MEMILIKI PENGARUH YANG TINGGI DALAM MASYARAKAT.**

Dalam menghadapi masyarakat di lapangan, berbagai kendala dan tantangan terus terjadi. Kadang, strategi pun perlu diubah guna melancarkan gagasan-gagasan baru serta mengembangkan ide-ide kreatif agar nilai-nilai penting konservasi dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Sehingga, pada akhirnya dapat menanamkan kesadaran pentingnya penerapan konservasi.



©Yayasan WWF Indonesia/Sugeng Hendratno

*Penyu hijau menuju lautan usai melakukan peneluran.*

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan audiensi terhadap pihak-pihak tertentu yang dianggap mampu menjadi penjamin bagi keberlangsungan program. Sebagai penjamin pertama bagi keberlangsungan program adalah pimpinan daerah Kabupaten Sambas sendiri.

Pada 1 April 2009, Yayasan WWF Indonesia mengadakan lokakarya di Kota Sambas yang bertujuan menekankan pentingnya konservasi di Paloh. Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan BKSDA Kalimantan Barat yang memaparkan mengenai penyu, satwa laut lain yang dilindungi, dan sistem kelola kawasan.



©Yayasan WWF Indonesia/Agri Aditya Fisesa

Hadir pula sebagai pembicara, Bupati Sambas turut yang memaparkan kondisi dan rencana pembangunan Kabupaten Sambas. Sedangkan perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang membagikan pengalaman pemerintah daerahnya dalam mengelola kawasan konservasi untuk perairan. Lokakarya tersebut diikuti oleh perwakilan dari instansi-instansi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas, kantor kecamatan, dan pemerintah desa.

Usai lokakarya, tim Yayasan WWF Indonesia melanjutkan dengan pertemuan-pertemuan tambahan dengan pihak kantor kecamatan dan pemerintah desa sebagai bentuk komunikasi agar tujuan dan maksud kehadiran tim Yayasan WWF Indonesia di Paloh dapat dipahami dengan jelas.

Kegiatan pengambilan data dilakukan satu bulan setelah lokakarya multipihak dilakukan, tepatnya pada 18 Mei 2009. Dalam waktu satu tahun, pengambilan data hanya dilakukan oleh tim Yayasan WWF Indonesia dan berlokasi di pos pengambilan data di wilayah yang dikenal dengan nama Pantai Sungai Belacan.

Pada awal-awal kehadirannya di Paloh, tak jarang tim Yayasan WWF Indonesia menghadapi kecurigaan dan berbagai pertanyaan masyarakat mengenai kedatangan Yayasan WWF Indonesia dan misi konservasi yang dibawa. Penolakan kerap terjadi mulai dari penolakan halus hingga intimidasi.



©Yayasan WWF Indonesia/Hendro Susanto

*Pertemuan di tingkat kabupaten (atas) dan desa (bawah).*

Penolakan tersebut sebagian besar didasari oleh fakta bahwa saat itu, telur penyu Paloh merupakan sumber ekonomi bagi sebagian masyarakat. Dengan misi konservasi yang dibawa, kedatangan Yayasan WWF Indonesia dengan visi misi konservasinya dianggap akan menghilangkan sumber pendapatan masyarakat yang selama ini ditopang oleh jual beli telur penyu.

Penolakan-penolakan juga dipicu oleh pengalaman di masa lalu yang dialami beberapa masyarakat. Sebagian dari masyarakat khawatir bahwa misi konservasi atau perlindungan satwa yang dibawa Yayasan WWF Indonesia hanyalah kedok pihak tertentu dengan tujuan utama memonopoli keuntungan dari pantai Paloh, seperti yang telah terjadi sebelumnya.

Tim Yayasan WWF Indonesia berusaha menghadapi berbagai prasangka tersebut dengan kepala dingin dan tetap memegang teguh prinsip bahwa konservasi perlu dilakukan dengan tanpa paksaan maupun kekerasan.

Beruntung, sebagian besar anggota tim berasal dari daerah dengan mayoritas penduduk Melayu Sambas sehingga komunikasi dengan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih kekeluargaan, dengan pendekatan melalui kesamaan bahasa Melayu Sambas yang merupakan bahasa mayoritas masyarakat Paloh. Faktanya, pendekatan melalui komunikasi dengan bahasa Melayu Sambas dapat membantu mengenali dan menyesuaikan diri dengan kecenderungan karakter masyarakat mengurai berbagai konflik.



*Kegiatan mencari ikan di laut. Kadang, untuk menjalin keakraban, tim Yayasan WWF Indonesia turut serta mencari ikan dengan bergabung di perahu nelayan.*

## **AGAR TERCIPTA KEAKRABAN, PENDEKATAN PERSONAL LEBIH SERING DILAKUKAN KETIMBANG AUDIENSI ATAU SOSIALISASI DALAM RUANGAN. PENDEKATAN TERSEBUT BUKAN TANPA LANDASAN STRATEGI. TIM YAYASAN WWF INDONESIA MEMETAKAN PIHAK-PIHAK YANG PERLU PENDEKATAN PERSONAL SECARA INTENS.**

Selang beberapa waktu kemudian, tim sudah bisa memetakan pihak-pihak yang berperan sebagai pemburu, penampung, dan penjual telur penyu. Tokoh masyarakat hingga preman pun mulai terpetakan dan dikenali. Dengan pendekatan informal dalam keseharian seperti mengajak sepak bola, tenis meja atau nongkrong di warung kopi menjadi salah satu

strategi untuk melakukan pendekatan personal demi misi konservasi yang menjadi tujuan utama. Strategi pendekatan ini pun terbukti cukup berhasil dan membuat beberapa masyarakat yang awalnya menolak, berbalik arah menjadi pendukung konservasi penyu paling militan.

## 2.1.2 MEMPERKENALKAN PALOH

Tim Yayasan WWF Indonesia juga memfasilitasi kegiatan *field trip* jurnalis yang dilakukan berturut-turut pada tahun 2009 hingga 2013. Rekan-rekan jurnalis dihadirkan langsung ke Paloh untuk meliput kondisi dan keadaan masyarakat dan alamnya.

Kehadiran para jurnalis membuka kisah Paloh yang selama ini tak terekspose. Paloh yang masih tergolong daerah terisolasi saat itu memiliki akses darat yang sangat tidak mudah dilalui, membuatnya jauh dari perhatian. Untuk menjangkau wilayah hingga Desa Temajuk yang berada di bagian paling utara dan berbatasan langsung dengan Malaysia, siapapun yang datang harus menempuh jalan setapak. Siapa sangka, saat ini, Desa Temajuk bahkan menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kalimantan Barat karena keindahan alamnya.

Di Paloh, akses informasi pun terbatas sehingga membuatnya menjadi wilayah yang masih terbelakang jika dibanding dengan wilayah Indonesia lainnya. Meski tahun 2009 perangkat handphone sudah beredar luas dan masyarakat Indonesia secara umum telah mengenal internet, sayangnya sebagian besar wilayah Paloh masih menjadi area yang tidak terjangkau sinyal telepon maupun internet.

Para jurnalis yang datang untuk meliput Paloh tak hanya mereka yang datang dalam rangka *field trip*. Tidak sedikit awak media yang hadir secara mandiri tanpa undangan dan tanpa ada jalinan koordinasi sebelumnya dengan tim Yayasan WWF Indonesia, sehingga peliputan tersebut bebas intervensi tim Yayasan WWF Indonesia. Awak-awak media dari kanal televisi nasional, seperti TV One, Kompas TV, Metro TV, tercatat pernah melakukan peliputan di Paloh dan memuat hasil liputan tersebut dalam program yang berkaitan dengan eksotika panorama alam, satwa liar, pendidikan, dan kearifan lokal.

**KEDATANGAN PARA JURNALIS MEMBUAT INFORMASI TENTANG PALOH TERSEBAR LUAS. TIDAK HANYA TENTANG PENYU, ALAM, MAUPUN MASYARAKATNYA, NAMUN JUGA TENTANG KASUS-KASUS TERITORIAL YANG SELAMA INI HAMPIR TIDAK PERNAH TERUNGKAP. SALAH SATUNYA TENTANG KONFLIK ANTARA INDONESIA-MALAYSIA TERKAIT KEPEMILIKAN CAMAR BULAN.**

Paloh pun sempat dikunjungi beberapa menteri dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014), yakni Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, HR Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dan Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri. Kedatangan ketiga menteri tentu juga disertai kedatangan para pejabat tinggi lain.

Salah satu keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat Paloh dari kunjungan para pejabat tersebut adalah dilakukannya pembenahan infrastruktur. Pelebaran jalan dilakukan pada akses jalan yang menghubungkan Dusun Ceremai di sebelah selatan hingga Desa Temajuk di sebelah utara. Pengerasan jalan juga dilakukan sehingga medan di jalur tersebut tidak lagi berlumpur ketika musim hujan datang.



*Pengerasan dan perluasan jalan di Desa Sebusus, Paloh.*

Setelah itu, Paloh semakin dikenal oleh publik. Padahal, sebelum itu nama Paloh bahkan terdengar asing. Panorama alam Paloh yang indah kemudian menarik para pecinta wisata untuk datang berkunjung. Agenda FESPA (Festival Pesisir Paloh) yang diselenggarakan BPSPL Pontianak dan Yayasan WWF Indonesia, bekerja sama dengan beberapa pihak pada tahun 2012, membuat kedatangan wisatawan meningkat drastis.

Paloh yang semula wilayah terisolasi, perlahan mulai terbuka. Demikian juga dengan berbagai akses termasuk informasi dan transportasi. Masyarakat mulai membuka diri pada informasi-informasi baru sehingga kemudian mereka pada akhirnya memahami alasan di balik semangat konservasi yang dibawa oleh Yayasan WWF Indonesia sejak awal di pesisir Paloh. Dengan kerja sama berbagai pihak ditambah pemahaman masyarakat yang semakin baik tentang konservasi, tingkat perburuan telur penyu di Paloh terus menurun.



©Yayasan WWF Indonesia/Sugeng Hendratno



©Yayasan WWF Indonesia/Udiyansyah

***Pembukaan Pameran Foto PandaCLICK! dalam rangkaian kegiatan Festival Pesisir Paloh (atas) dan dihadiri langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sambas (bawah).***

## 2.1.3 PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN DAN KEGIATAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) KAMBAU BORNEO

Nilai-nilai konservasi yang diusung oleh Yayasan WWF Indonesia semakin dipahami oleh semakin banyak orang dari waktu ke waktu. Maka, selain menyelenggarakan kerja kajian dan sosialisasi, tim Yayasan WWF Indonesia juga melakukan pemetaan potensi dan aktivitas masyarakat. Program yang diusung selanjutnya difokuskan pada cara agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam visi misi konservasi.

Pada tahun 2012, selang dua tahun sejak pertama kalinya konservasi penyu di Paloh dimulai, tim Yayasan WWF Indonesia menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah pelatihan pengawasan pantai peneluran penyu. Bentuk pelatihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran dan tepat guna.

Di tahun yang sama, kesadaran masyarakat tentang konservasi meningkat hingga pada tahap “tindakan nyata”. Beberapa masyarakat berinisiatif membentuk kelompok pengawas pantai.



*Pelatihan tim monitoring (atas) dan pertemuan rutin bersama masyarakat peduli konservasi yang diselenggarakan oleh tim Yayasan WWF Indonesia dalam rangka memperkuat kapasitas kelompok masyarakat (bawah).*

Rencana pembentukan Pokmaswas atau Kelompok Masyarakat Pengawas disambut baik oleh tim Yayasan WWF Indonesia. Segera setelahnya, beberapa koordinasi dan diskusi dilakukan untuk mematangkan konsep dan struktur kelompok. Tepatnya, pada 25 Mei 2011, melalui Surat Keputusan (SK) Desa dengan Nomor 01 Tahun 2011, kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kambau Borneo resmi berdiri. Sebanyak 27 orang menyatakan diri menjadi bagian dari Pokmaswas Kambau Borneo.

Berikut nama-nama anggota Pokmaswas Kambau Borneo berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sebusub Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kambau Borneo:

**Ketua** : Muraizi  
**Sekretaris** : Jefriden  
**Bendahara** : Juli Abidin

**Anggota** :

- Ripani	- Hernadi	- Darmawan
- Minhat	- Hendri	- Rinto Hediono
- Hadian Husin	- Mujiono	- Hendri Jeruju
- Wahyudinata	- Andi Priansyah	- Ismail
- Karyadi	- Hermanto	- Trino Junaidi
- Junaidi	- Misriadi	- Jusmani
- Marjani	- Predi	- Hazini
- Hendrik	- Jamalludin	- Lucki

Setahun berikutnya, tepat di tanggal 25 Mei 2012, eksistensi Pokmaswas Kambau Borneo semakin dikukuhkan oleh Bupati Sambas. Piagam dan Naskah Pengukuhan dari Bupati Sambas diserahkan secara resmi kepada perwakilan kelompok pada 5 Juli 2013. Penyerahan tersebut bertepatan dengan penyelenggaraan Festival Pesisir Paloh (FESPA) yang juga dikoordinir oleh Pokmaswas Kambau Borneo.



*Kegiatan pengawasan dan pendataan yang dilakukan oleh Pokmaswas Kambau Borneo.*

Dalam perjalanannya, Pokmaswas Kambau Borneo mendapat dukungan dari Pemerintah Kecamatan Paloh, Pemerintah Desa Sebus, Polisi Perairan Kalimantan Barat, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sambas maupun Provinsi Kalimantan Barat, dan lainnya.

Tugas dan fungsi utama dari kelompok tersebut, salah satunya adalah menjaga pelestarian penyu Paloh dari ancaman perburuan dan perdagangan telur penyu yang telah mengakar dalam budaya masyarakat selama bertahun-tahun. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota kelompok dalam mengemban misi konservasi.

Kelompok ini juga diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat mengenai pentingnya pelestarian penyu dengan cara menyosialisasikan aturan-aturan hukum, pengamanan pantai peneluran serta melakukan pendataan populasi. Perlahan, keberadaan kelompok ini pun mulai dikenal dan pada akhirnya diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

Pengurus maupun anggota Pokmaswas berasal dari empat dusun di Desa Sebus, Kecamatan Paloh, yaitu Dusun Ceremai, Setinggak, Melati dan Jeruju. Kehadiran mereka sebagai pengurus dan anggota sekaligus menjadi perwakilan dari setiap dusun. Nama Kampau Borneo sendiri memiliki arti, "Kambau" berarti penyu hijau dalam bahasa setempat, sedangkan Borneo adalah nama lain dari Pulau Kalimantan.



*Pokmaswas Kambau Borneo menemukan penyu yang terdampar mati (atas) dan lepasliarkan tukik ke laut (bawah).*

**MENARIKNYA, SEBAGIAN BESAR ANGGOTA KELOMPOK ADALAH MEREKA YANG PERNAH AKTIF MEMBURU TELUR PENYU. BERGABUNG DENGAN POKMASWAS KAMBAU BORNEO MENJADI TANTANGAN TERSENDIRI BAGI MASING-MASING DARI MEREKA YANG MERUPAKAN MANTAN PEMBURU TELUR PENYU. KOMITMEN MEREKA UNTUK BERBALIK ARAH, DARI BERBURU LALU MENJAGA, MENJADI PERTANDA BAHWA KELOMPOK INI TIDAK DIBENTUK ALA KADARNYA.**

Di sisi lain, pengetahuan dan pengalaman mereka ketika menjadi pemburu dapat menjadi modal ketika melakukan pengawasan pantai. Hasilnya, sejak Pokmaswas Kambau Borneo berdiri dalam setahun, untuk pertama kalinya jumlah sarang yang hilang lebih sedikit daripada sarang yang terjaga. Data Yayasan WWF Indonesia tahun 2011 menunjukkan bahwa sarang yang hilang berjumlah 564, sedangkan sarang selamat berjumlah 1.636 sarang. Hal tersebut tentu merupakan prestasi yang patut diapresiasi.



*Tanjung Api, lokasi pos Pokmaswas Kambau Borneo.*

Tren sarang telur penyu yang hilang terus menurun di tahun-tahun selanjutnya sejak kelompok tersebut berdiri dan aktif berkegiatan. Dalam tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2012, 2013, 2014, jumlah sarang yang hilang terus menurun secara signifikan, yaitu di angka 403, 285, dan 260 sarang (selengkapnya lihat Sub-bab 2.2). Melihat hasil yang menggembirakan ini, Tim Yayasan WWF Indonesia berupaya untuk terus mendampingi dan melakukan pelatihan agar ritme dan semangat kerja Pokmaswas Kambau Borneo terjaga baik. Peningkatan kapasitas dilakukan sehingga para pengurus dan anggota mahir dalam aktivitas pengambilan data dan bertahan melalui gelombang masalah yang lebih besar.

Tim Yayasan WWF Indonesia juga memberikan dukungan properti operasional seperti logistik dan bahan bakar minyak pada tahun 2011. Selanjutnya, pada 2012 dan 2013, bentuk bantuan dialihkan dalam skema dana hibah (*sub-grant*) dengan nominal sebesar 180 juta rupiah per tahun. Nominal tersebut diperuntukkan bagi aktivitas pemantauan dan pengembangan sumber ekonomi alternatif.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar turut memberikan sumbangsih yaitu menyediakan beberapa keperluan properti pengawasan pantai. Bahkan, pada 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) memberikan bantuan pembangunan pos bagi Pokmaswas Kambau Borneo. Pos tersebut didirikan di Tanjung Api, salah satu area utama (*hotspot*) pantai peneluran penyu Paloh.





©Yayasan WWF Indonesia/Ismu Wijaya



©Yayasan WWF Indonesia/Agri Aditya Fisesa

*Potret kebersamaan anggota Pokmaswas Kambau Borneo dalam berbagai acara.*

## 2.1.4 PENDAMPINGAN TIM MONITORING PENYU PALOH DI PANTAI SUNGAI BELACAN

Kegiatan Monitoring dan Pendataan Penyu dilaksanakan secara kolaboratif antara Yayasan WWF Indonesia, BPSPL Pontianak, dan kelompok-kelompok mitra lokal. Secara teknis, Yayasan WWF Indonesia memberikan dukungan operasional dan panduan pengelolaan data. BPSPL Pontianak memberikan insentif untuk dua enumerator yang bekerja. Sedangkan kelompok masyarakat memberikan anggota mereka untuk menjadi enumerator.

Para enumerator, yang selanjutnya disebut “Tim Monitoring Penyu Paloh” berasal dari dua kelompok mitra lokal, yakni Pokmaswas Kambau Borneo dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Wahana Bahari Paloh. Pokmas Wahana Bahari Paloh sendiri berdiri tahun 2016, dan merupakan kelompok dengan orientasi kegiatannya berfokus pada tiga hal; konservasi, pengembangan madu kelulut, dan pengembangan wisata edukasi.



*Pos Tim Monitoring Penyu Paloh di Pantai Sungai Belacan.*

Untuk mendukung upaya yang dilakukan, pos permanen didirikan di Sungai Belacan, yang merupakan bekas lokasi tim Yayasan WWF Indonesia saat melakukan kajian awal terkait penyu. Sungai Belacan dan sekitarnya merupakan hotspot area atau area peneluran dengan tingkat pendaratan penyu paling tinggi. Panjang pantai area *hotspot* ini sekitar 19,3 km. Dari total panjang area *hotspot*,

Tim Monitoring Penyu Paloh berkonsentrasi pada sembilan kilometer yang merupakan area utama peneluran. Ketika Paloh ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi, area ini menjadi zona inti 1.

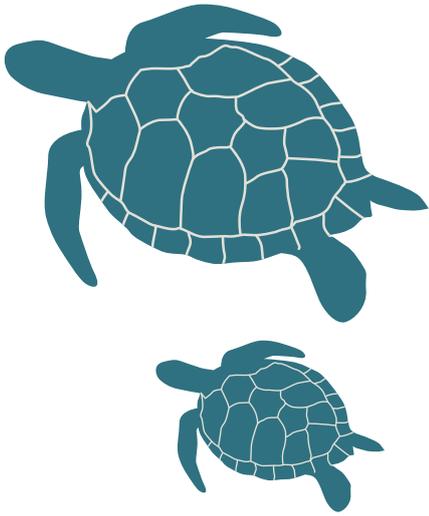
Peran sebagai enumerator dan pengawas pantai adalah peran utama yang wajib dilakukan oleh anggota Tim Monitoring Penyu Paloh setiap malam. Pos monitoring tidak dapat ditinggalkan meski hanya sehari. Terutama, pada musim puncak peneluran yang berlangsung dalam rentang waktu bulan Mei hingga Oktober, intensitas pemantauan dan pendataan lebih diperketat.

Dalam upaya konservasi penyu di Paloh, terdapat dua kategori pengawas dengan komitmen yang berbeda. Kategori pertama adalah pengawas dari Tim Monitoring Penyu Paloh yang menuntut komitmen berupa kewajiban kehadiran yang harus dipenuhi. Tugasnya pun tak hanya mengawasi, namun juga meliputi aktivitas pendataan. Untuk menjadi Tim Monitoring Penyu Paloh, rekrutmen dilakukan secara terbuka dan calon anggota harus melalui serangkaian tes. Meski banyak peminat, tidak banyak yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Tim Monitoring.

Kategori kedua adalah pengawas dari kelompok masyarakat. Komitmen yang dibutuhkan untuk menjadi pengawas ini tidak mutlak seperti anggota Tim Monitoring. Pada kategori pengawas dari kelompok masyarakat, kehadiran yang diharapkan bersifat sukarela. Tugasnya pun sebatas mengawasi pantai untuk memastikan telur yang ditinggalkan oleh penyu aman dari pencurian.



*Zulfian, anggota Tim Monitoring Penyu Paloh, sedang merelokasi telur Penyu Hijau untuk diletakkan di hatchery demi keamanan telur.*



DENGAN ADANYA TIM MONITORING PENYU PALOH, KAJIAN TERHADAP PENYU YANG SEBELUMNYA DILAKUKAN OLEH TIM YAYASAN WWF INDONESIA BERSAMA DKP KALIMANTAN BARAT, BPSPL PONTIANAK, POKMAS WAHANA BAHARI PALOH DAN POKMASWAS KAMBAU BORNEO, SERTA PARA MAHASISWA DARI BERBAGAI UNIVERSITAS DI INDONESIA DAPAT TERUS BERLANGSUNG. TIM MONITORING PENYU PALOH MENDATA SETIAP PENYU YANG NAIK KE DARAT.

Pendataan ini meliputi mengukur rentang jejak penyu (*flipper*), panjang lebar karapas penyu (jika penyu masih bisa dijumpai), titik koordinat, jumlah penyu yang bertelur dan yang tidak, jumlah sarang, dan jumlah telur.



©Yayasan WWF Indonesia/Dian Fika

Juhardi, anggota Tim Monitoring Penyu Paloh bersama Mahasiswa Magang dari Kelautan FMIPA UNTAN sedang melakukan pengukuran penyu belimbing

Hingga tahun 2021, Tim Monitoring Penyu Paloh beranggotakan dua orang. Keduanya bertugas melaksanakan visi dan misi tim, termasuk mengurus hal-hal administratif. Tentu bukan jumlah yang ideal, mengingat panjang area peneluran penyu yang memerlukan pengawasan mencapai 19,3 km.

Sebagai estimasi, pengukuran dengan melakukan optimalisasi tenaga, setidaknya membutuhkan empat

orang. Namun demikian, dengan jumlah tim saat ini masih mencukupi melakukan kegiatan yang diperlukan. Dengan adanya Pokmaswas Kambau Borneo yang fokus mengawasi pantai, Tim Monitoring Penyu Paloh dapat berfokus pada tugasnya. Dengan adanya Pokmaswas Kambau Borneo, tugas tim monitoring pun terbantu, meski tak dapat dikatakan mudah.



*Salah satu lokasi hatchery yang ada di pos Tim Monitoring Penyu Paloh.*

Tim monitoring harus mempertimbangkan berbagai hal agar sarang tetap aman. Bila lokasi telur termasuk rawan pencurian, rawan diburu satwa predator, serta berada di bawah pasang tertinggi, Tim Monitoring Penyu Paloh akan melakukan relokasi telur-telur. Telur diambil dari sarang alaminya, lalu dipindahkan ke tempat penetasan semi alami (*hatchery*).

Pasca telur di dalam sarang alami maupun hatchery menetas, Tim Monitoring Penyu Paloh akan mendata “daya tetas” atau menghitung jumlah cangkang yang berhasil menetas dan jumlah yang gagal menetas. Lokasi hatchery sendiri berada tidak jauh dari bangunan pos Tim Monitoring Penyu Paloh. Pos tersebut menjadi titik bermalam tim Yayasan WWF Indonesia saat memulai kajian data pada tahun 2009 dan tahun-tahun setelahnya. Sebelumnya, pos ini merupakan warung tempat singgah masyarakat yang sedang melakukan perjalanan melewati jalur pantai.

Sebelum 2005, pembalakan kayu sempat sangat marak dilakukan di Kecamatan Paloh. Desa Sebusus dan Temajuk menjadi lokasi sasaran para pelaku pembalakan sehingga selalu ramai. Desa Temajuk bahkan seperti kota di malam hari, ketika para perambah yang kembali dari hutan memadati desa. Sekitar seribu orang bermukim sementara di Desa Temajuk saat itu. Kafe, warung kopi, dan kapal-kapal pengangkut kayu yang bersandar menjadi pemandangan sehari-hari.



**Pos Tim Monitoring Penyu Paloh di Pantai Sungai Belacan ketika belum direnovasi (atas) dan kondisi fisik saat ini (bawah).**

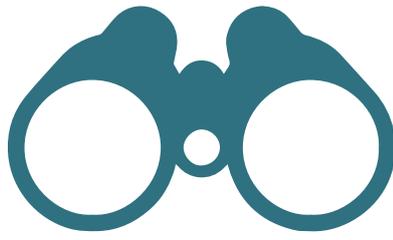
Salah satu bangunan yang berdiri di masa keemasan pembalakan liar tersebut adalah warung Ngah Ali di Sungai Belacan. Warung tersebut cukup ramai dikunjungi karena posisinya yang berada di tepi pantai, di tengah rute Desa Temajuk - Pelabuhan Ceremai. Jalur menuju warung juga terbuka akibat aktivitas *illegal logging*. Menurunnya aktivitas *illegal logging* pada tahun-tahun berikutnya membuat warung menjadi sepi. Hilir mudik orang semakin berkurang sejak 2005. Selain karena pemerintah mulai menerapkan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pembalakan, para pembalok juga sudah tidak memiliki

apa-apa lagi untuk ditebang karena hutan semakin menipis. Satu per satu para pembalok meninggalkan wilayah itu.

Saat tim Yayasan WWF Indonesia tiba pada 2009, kondisi bangunan warung cenderung tidak layak huni. Tim Yayasan WWF Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan bangunan tersebut. Setelah negosiasi dengan pemilik bangunan, tim Yayasan WWF Indonesia pun mendapatkan izin untuk menggunakan dan merenovasi bangunan tersebut untuk keperluan menginap.

Fungsi bangunan atau lokasi pos kemudian tidak hanya menjadi tempat inap saja namun juga menjadi pusat informasi mengenai penyu. Poster, foto, dan berbagai informasi mengenai penyu dipasang di sini. Para wisatawan yang ingin melihat penyu secara langsung, akan diarahkan untuk mengunjungi pos tersebut saat mereka tiba sebagai pengenalan awal dengan penyu di Paloh.

Renovasi dan penambahan bangunan semi permanen di sekitar bangunan utama dilakukan beberapa kali guna membuat pos lebih nyaman dan layak. Biayanya berasal dari Yayasan WWF Indonesia maupun dana kegiatan yang disisihkan.



**ADANYA LOKASI DAN BANGUNAN POS MEMBUAT KEGIATAN KONSERVASI DI PANTAI PALOH LEBIH OPTIMAL. PROYEKSI KE DEPAN, POS AKAN MENJADI MERCUSUAR INFORMASI DAN PUSAT PEMBELAJARAN BAGI MASYARAKAT ATAU PENGUNJUNG YANG INGIN MENDALAMI SELUK BELUK PENYU DAN HABITATNYA, KHUSUSNYA PANTAI PENELURAN PENYU PALOH.**



©Yayasan WWF Indonesia /Zulkifli HZ



©Yayasan WWF Indonesia/Zulkifli HZ

*Berbagai informasi mengenai penyu dan ajakan pelestarian yang terdapat di pos Tim Monitoring Penyu Paloh.*

## 2.1.5 FESTIVAL PESISIR PALOH (FESPA)

Informasi mengenai konservasi penyu di Paloh disebarkan lebih luas dan ditegaskan lagi bertepatan dengan dicetuskannya Festival Pesisir Paloh (FESPA) tahun 2012. Festival ini diinisiasi tim Yayasan WWF Indonesia bersama Pokmaswas Kambau Borneo, Pemerintah Desa Sebusus, DKP Kalimantan Barat, BPSPL Pontianak, dan Pemerintah Kabupaten Sambas.

Jika dilihat sekilas, kegiatan ini seolah tidak berkaitan dengan semangat konservasi. Namun, sebuah festival adalah sebuah ajang pesta yang dihadiri oleh masyarakat luas. Kesempatan seperti ini menjadi kesempatan emas untuk menyampaikan pesan konservasi sehingga dapat menjangkau masyarakat luas. FESPA dijadikan sebagai pemantik cara persuasif untuk mendekatkan skema konservasi pada masyarakat luas dari berbagai usia dan latar belakang.

**SELAMA FESTIVAL BERLANGSUNG, SENGAJA DISELIPKAN AGENDA-AGENDA EDUKASI SEPERTI CERDAS CERMAT, PEMILIHAN DUTA PENYU, KAMPANYE DI SEKOLAH-SEKOLAH, PELATIHAN KETERAMPILAN, PELEPASAN TUKIK, DAN LAINNYA. SEBAGIAN BESAR AGENDA DALAM FESTIVAL TERSEBUT DIJADIKAN SEBAGAI AJANG KAMPANYE PERLINDUNGAN PENYU.**



©Yayasan WWF Indonesia/Aminuddin



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosa

**Para pengunjung antusias melakukan lepas liar tukik. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian acara Festival Pesisir Paloh.**

Salah satu acara utama dalam FESPA adalah pemilihan Bujang Dare (Budare) Penyu Paloh atau duta pemuda dan pemudi yang akan membawa pesan-pesan pelestarian penyu di Paloh. Para Budare berusia belia, yaitu antara 14-21 tahun. Sebelumnya, para finalis diberikan pembekalan terlebih dahulu dengan pengetahuan mengenai penyu, lingkungan, dan informasi lain yang berkaitan dengan pelestarian penyu.

Hadir para penggiat konservasi, pendidik, maupun entrepreneur yang didaulat menjadi dewan juri untuk menentukan Budare terbaik yang akan mengemban tugas menjadi duta pelestarian penyu di Paloh. Namun demikian, tidak berarti finalis yang tidak menang tidak memiliki kontribusi apapun. Finalis-finalis yang tidak terpilih menjadi pemenang tetap dipersiapkan menjadi duta-duta yang akan turut berkontribusi mengampanyekan nilai-nilai penting konservasi.

Sejak tahun 2016, Budare dan finalis Budare telah berhasil mendorong lebih dari 30 kegiatan yang berkaitan dengan penyadartahuan tentang lingkungan dan satwa dilindungi, khususnya penyu. Berbagai kegiatan diselenggarakan di instansi pendidikan, dari tingkat SMP, SMA, hingga universitas. Tidak sedikit dari peserta kampanye yang kemudian mengunjungi Pos Monitoring Penyu Sungai Belacan untuk menyaksikan secara langsung keberadaan penyu dan mempelajari lebih mendalam mengenai satwa tersebut.

Penyadartahuan mengenai pelestarian penyu merupakan salah satu hasil sukses dari diadakannya FESPA. Hal ini menunjukkan bahwa festival ini tak hanya menjadi festival budaya lokal dan pelestarian tradisi, melainkan juga sebagai ajang untuk menginformasikan pentingnya perlindungan terhadap penyu dan habitatnya.

Festival ini juga membuat istilah “konservasi” dikenal masyarakat dan menjadi tren di antara masyarakat. Paradigma bahwa perlindungan penyu dan pantai hanyalah tanggung jawab pihak tertentu pun berubah. Kini masyarakat meyakini bahwa penyu dan pantai perlu mendapat perhatian dan kepedulian bersama dari seluruh lapisan masyarakat.



Atraksi tari-tarian daerah (atas) dan pemberian penghargaan kepada para finalis Bujang Dare Penyu Paloh (bawah) dalam Festival Pesisir Paloh.

FESPA pun menjadi momentum berubahnya tradisi “Lempar Telur Penyu” yang dulunya rutin dilaksanakan setiap musim puncak peneluran menjadi tradisi hidup dengan cara baru, yaitu tidak mengonsumsi dan tidak memperjual belikan telur penyu. FESPA kemudian menjadi agenda festival tahunan di Paloh.

## **MANFAAT SAMPING (MULTI EFFECT) YANG DIDAPATKAN DARI FESPA TIDAKLAH SEDIKIT. BAGI YAYASAN WWF INDONESIA, POKMASWAS KAMBAU BORNEO, DAN PENDUKUNG KONSERVASI DI PALOH, FESPA JUGA MENJADI BERAWALNYA KERJA SAMA MULTIPIHAK UNTUK IKUT TERLIBAT AKTIF DALAM UPAYA KONSERVASI PENYU. KERJA SAMA TERSEBUT DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN BESAR DARI KEGIATAN KONSERVASI, YAKNI MENDORONG PENETAPAN KAWASAN LINDUNG BAGI PENYU DI PALOH.**

Dari sisi ekonomi, pelaksanaan FESPA memberikan manfaat secara langsung. Sekurang-kurangnya, 5.000 pengunjung datang di festival yang berlangsung selama tiga hari itu. Setengah dari para pengunjung FESPA berasal dari luar kecamatan Paloh. Tak hanya itu. Pengunjung mancanegara juga tampak hadir. Bahkan, pada FESPA tahun 2018, lebih dari 500 wisatawan mancanegara yang datang. Masyarakat pun mendapat keuntungan ekonomi langsung dengan adanya keramaian tersebut.

Sedangkan dari sisi pelestarian budaya dan pengembangan wisata, FESPA juga turut berkontribusi. Berbagai atraksi tari, berbalas pantun, lomba memasak kuliner lokal, dan bentuk seni lain budaya lokal diadakan pada acara tersebut. Membuat FESPA tidak hanya menjadi agenda konservasi, namun juga merangkul nilai-nilai lokal untuk dipertahankan.





*Peresmian pembukaan Festival Pesisir Paloh 2016 di Dusun Ceremai, Desa Sebusus yang ditandai dengan pemukulan tahun.*

Tahun 2017, penyelenggaraan FESPA dipimpin langsung oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Wakil Bupati Sambas periode 2016-2021, Hj Khairiah, bertindak langsung sebagai ketua pelaksana. Selanjutnya, pada tahun 2018, tepatnya ketika perhelatan FESPA ke-7, pemerintah dari level daerah, provinsi, kementerian, dan sekitar 50 lembaga atau organisasi saling berkolaborasi dalam pelaksanaan FESPA. Hal ini menjadi bukti bahwa FESPA dianggap memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat secara luas oleh pemerintah daerah maupun nasional.

# 2.2 RAGAM AKTIVITAS KONSERVASI PENYU DI PALOH

## 2.2.1 PENGAWASAN DAN KAJIAN DATA



©Yayasan WWF Indonesia/Udiyansyah

*Tukik penyu hijau.*

Dalam kurun waktu satu dekade, angka sarang telur penyu yang hilang kian menurun. Demikian juga dengan angka perburuan telur mengalami penurunan drastis dalam waktu sepuluh tahun. Adanya peran, komitmen, dan kerja sama dari Pokmaswas Kambau Borneo, Pokmas Wahana Bahari Paloh, Tim Monitoring Penyu Paloh, dan kelompok-kelompok masyarakat lain yang ikut terlibat menjadi faktor keberhasilan penurunan angka kehilangan sarang penyu dan perburuan telur penyu tersebut.

Melalui berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan FESPA, pelibatan media massa untuk mengekspos profil Paloh, pendekatan persuasif, pengembangan sumber penghidupan alternatif, dan

kampanye-kampanye perlindungan penyu, akhirnya berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang berdampak signifikan terhadap penurunan angka perburuan telur penyu yang cukup drastis.

Meski demikian, tingkat perburuan telur penyu belum dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Pada musim puncak bertelur, yakni bulan Mei hingga Oktober, ancaman perburuan masih cukup tinggi. Pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas Kambau Borneo maupun Tim Monitoring Penyu Paloh tidak dapat sepenuhnya menjangkau keseluruhan area peneluran di sepanjang pantai yang mencapai 63 km. Tim lebih berfokus mengatasi *hotspot area* atau area peneluran

dengan tingkat pendaratan penyu paling tinggi. Area hotspot memiliki panjang pantai sekitar 19,3 km yang terletak di Desa Sebusus.

Meski demikian, kabar baiknya adalah angka penurunan perburuan telur penyu telah mencapai lebih dari 90% persen. Hal ini berbanding terbalik dengan sebelum serangkaian kegiatan konservasi dilakukan. Saat itu, perburuan telur penyu mencapai lebih dari 90% dan dapat dirinci sebagai berikut, para tahun 2009 jumlah sarang yang hilang adalah 2,553 sarang dari 2,577 sarang yang dijumpai (tingkat kehilangan 99,07%), dan di tahun 2010, sarang yang hilang berjumlah 2,437 dari 2,565 sarang yang dijumpai (tingkat kehilangan 95,91%).



©Yayasan WWF Indonesia/Dicky Bisingslasi



©Eric Madeja/WWF-MY

Bandingkan angka tersebut dengan angka kehilangan sarang telur penyu pada tahun 2015. Sarang yang hilang hanya berjumlah 522 sarang dari 1,958 sarang yang dijumpai (tingkat kehilangan 16,41%). Pada tahun 2019, angka kehilangan terus menurun. Sarang yang hilang hanya berjumlah 251 dari 2,242 sarang yang dijumpai (11,20%).

Dengan menurunnya tingkat perburuan, status keamanan sarang dan produksi tukik pun turut meningkat. Tingkat penetasan tukik penyu di pantai Paloh menunjukkan angka yang tinggi, yakni mencapai 83,09%. Setiap tahunnya, diambil sampel rata-rata 325 sarang untuk menghitung daya tetas sarang. Hasilnya, jumlah telur yang berhasil menetas rata-rata adalah 26,003 butir per tahun.

### HASIL PENDATAAN DAYA TETAS TUKIK DALAM KURUN WAKTU 6 TAHUN TERAKHIR

TAHUN	JUMLAH SARANG YANG DIHITUNG	CANGKANG KOSONG/SHELL (S)	TUKIK HIDUP DALAM SARANG/LIFE IN NEST (L)	TUKIK MATI DALAM SARANG/DEATH IN NEST (D)	TUKIK TIDAK MENETAS/UNHATCHED (UH/UHT)	TELUR TIDAK BERKEMBANG/UNHATCHED TARM (UD)	PREDATOR/DEPREDASTORED (P)	TOTAL TELUR	PERSENTASE DAYA TETAS	TUKIK SURVIVE	PERSENTASE TUKIK SURVIVE
2016	180	14.096	914	124	1.464	1.935	0	17.495	80.57%	13.058	74.64%
2017	436	33.932	197	72	1.324	4.406	931	40.593	83.59%	33.663	82.93%
2018	234	18.593	13	5	393	1.466	2.147	22.599	82.27%	18.575	82.19%
2019	384	31.166	0	0	100	2.267	4.359	37.892	82.25%	31.166	82.25%
2020	392	33.58	0	28	659	2.649	1.825	38.713	86.74%	33.552	86.67%
* mei 2021	72	5.81	0	1	72	597	444	6.923	83.92%	5.809	83.91%

Rata-rata (diluar 2021)	325	26.273	225	46	788	2.545	1.852	31.458	83.09%	26.003	81.74%
-------------------------	-----	--------	-----	----	-----	-------	-------	--------	--------	--------	--------



Gambar 5. Hasil pendataan daya tetas tukik pada 2016-Mei 2021.

## DALAM MEMBUAT DATA KAJIAN, PARAMETER PENGAMATAN YANG DIGUNAKAN OLEH TIM ADALAH JUMLAH DAN UKURAN LINTASAN PENYU BERTELUR, JUMLAH SARANG TELUR, JUMLAH TELUR PER SARANG, ANGKA PENETASAN, JUMLAH KEGAGALAN MENETAS DAN KECACATAN (DEFORMITAS/DEFORMITY) TUKIK BERDASARKAN PENDATAAN ISI SARANG PASCA MENETAS, LOKASI PENELURAN BERDASARKAN SEKTOR, SERTA PROPORSI SARANG TELUR YANG DICURI DIBANDINGKAN DENGAN PROPORSI SARANG TELUR YANG MASIH UTUH.

Tingginya rerata persentase tetas atau daya tetas tukik di Paloh yang mencapai 83,09% tersebut merupakan salah satu yang paling menggembirakan selama kajian berlangsung. Sarang telur penyu hijau umumnya memang memiliki persentase keberhasilan penetasan yang tinggi ( $\pm 80\%$ ), kecuali jika ada faktor-faktor dari luar yang mempengaruhinya seperti predator, perubahan lingkungan yang signifikan, infeksi mikroba dan lain sebagainya (sumber: Laporan Yayasan WWF Indonesia<sup>4</sup>).

Perburuan sarang dan telur penyu juga menjadi salah satu faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan penetasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan perburuan tersebut memberikan dampak signifikan pada meningkatnya persentase daya tetas tukik, meski berbagai faktor eksternal lainnya masih menjadi ancaman bagi daya tetas tukik.

Di tahun-tahun awal konservasi, pemantauan dilakukan di dua bentang wilayah pantai sepanjang sekitar 43 kilometer. Pertama, di bentang Pantai Sebusus, dari Sungai Ubah hingga Sungai Mutusan sepanjang sekitar 19,3 kilometer. Area ini termasuk dalam hotspot area dan dibagi lagi menjadi lima segmen wilayah pemantauan. Pembagian ini dilakukan untuk mempermudah pendataan. Sedangkan bentang kedua berada di Pantai Temajuk, terbentang dari Sungai Ubah hingga Dusun Camar Bulan. Panjang bentang pantai ini adalah sekitar 23 kilometer, dan juga terbagi dalam lima segmen.

Pemantauan dilakukan pada malam dan siang hari. Pemantauan malam hari dimulai pukul 19.00-05.00 WIB yang difokuskan di bentang pertama atau wilayah Pantai Sebusus. Pemantauan siang hari dilakukan ketika laut sedang berada pada kondisi surut terendah, yakni antara pukul 07.00-17.00 WIB. Observasi siang hari tersebut dilakukan di kedua bentang pantai (Pantai Sebusus dan Temajuk).

Seiring waktu berjalan, bentang pantai yang dipantau (diawasi dan dikaji) berubah, yaitu hanya bentang pertama yakni pantai Sebusus saja. Sementara bentang kedua atau pantai Temajuk, ditinggalkan. Alasan pengurangan panjang pantai yang dipantau tersebut karena Tim Monitoring Penyu Paloh tidak memiliki jumlah tenaga yang mumpuni untuk mencakup keseluruhan panjang pantai peneluran penyu Paloh. Hingga buku ini disusun, hanya ada dua orang anggota Tim Monitoring Penyu Paloh yang rutin melakukan kajian dan pengawasan pantai.

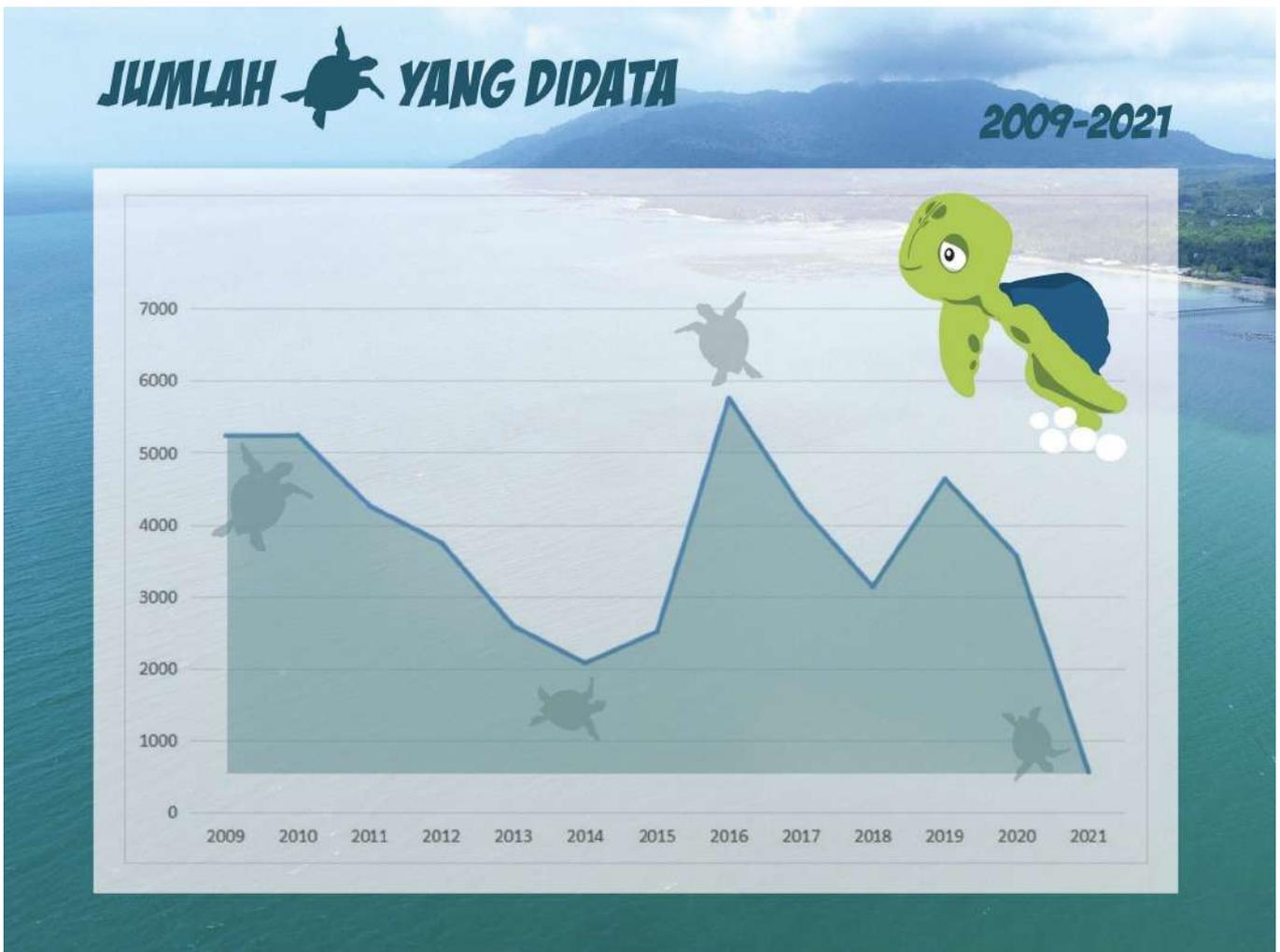


©Yayasan WWF Indonesia/Udiyansyah

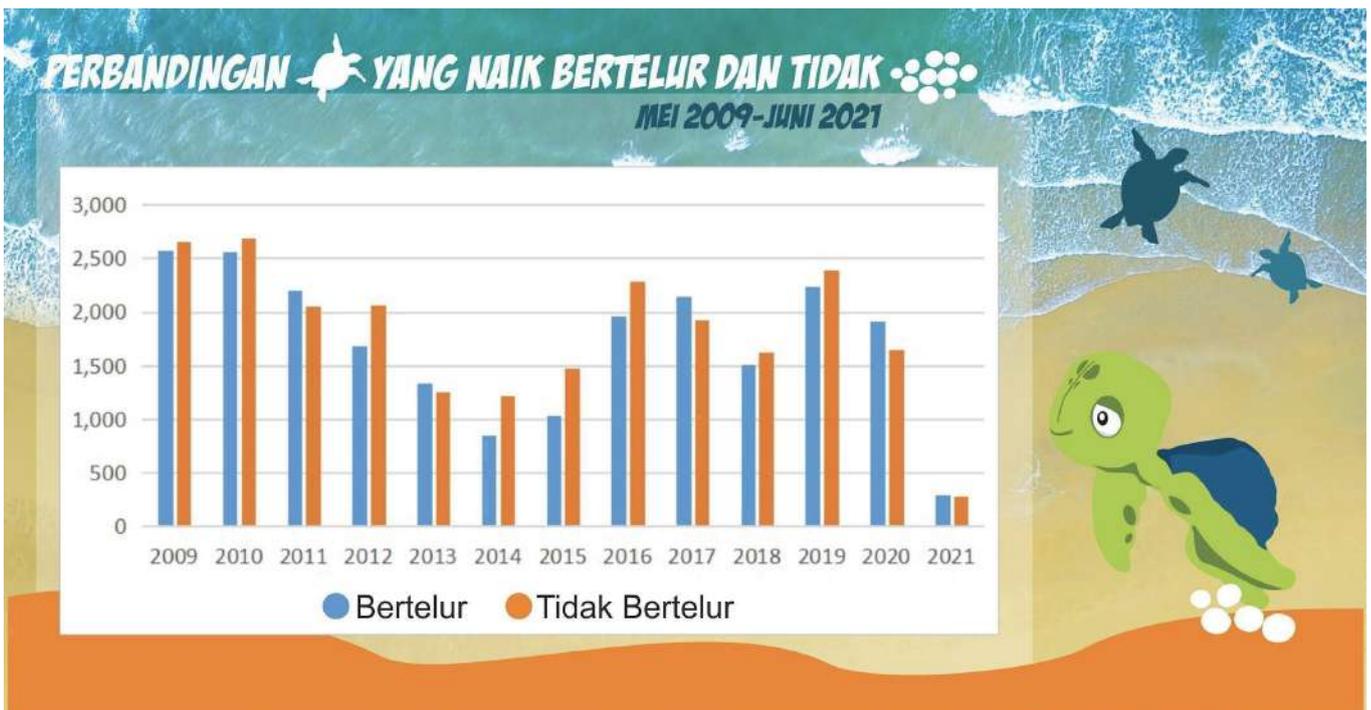
<sup>4</sup>Yayasan WWF Indonesia. *Status Populasi Penyu Di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.*

Alasan lainnya, karena tingkat pendaratan di bentang kedua atau pantai Temajak rendah, yaitu hanya 6%. Sedangkan data tahun 2009 hingga 2018,

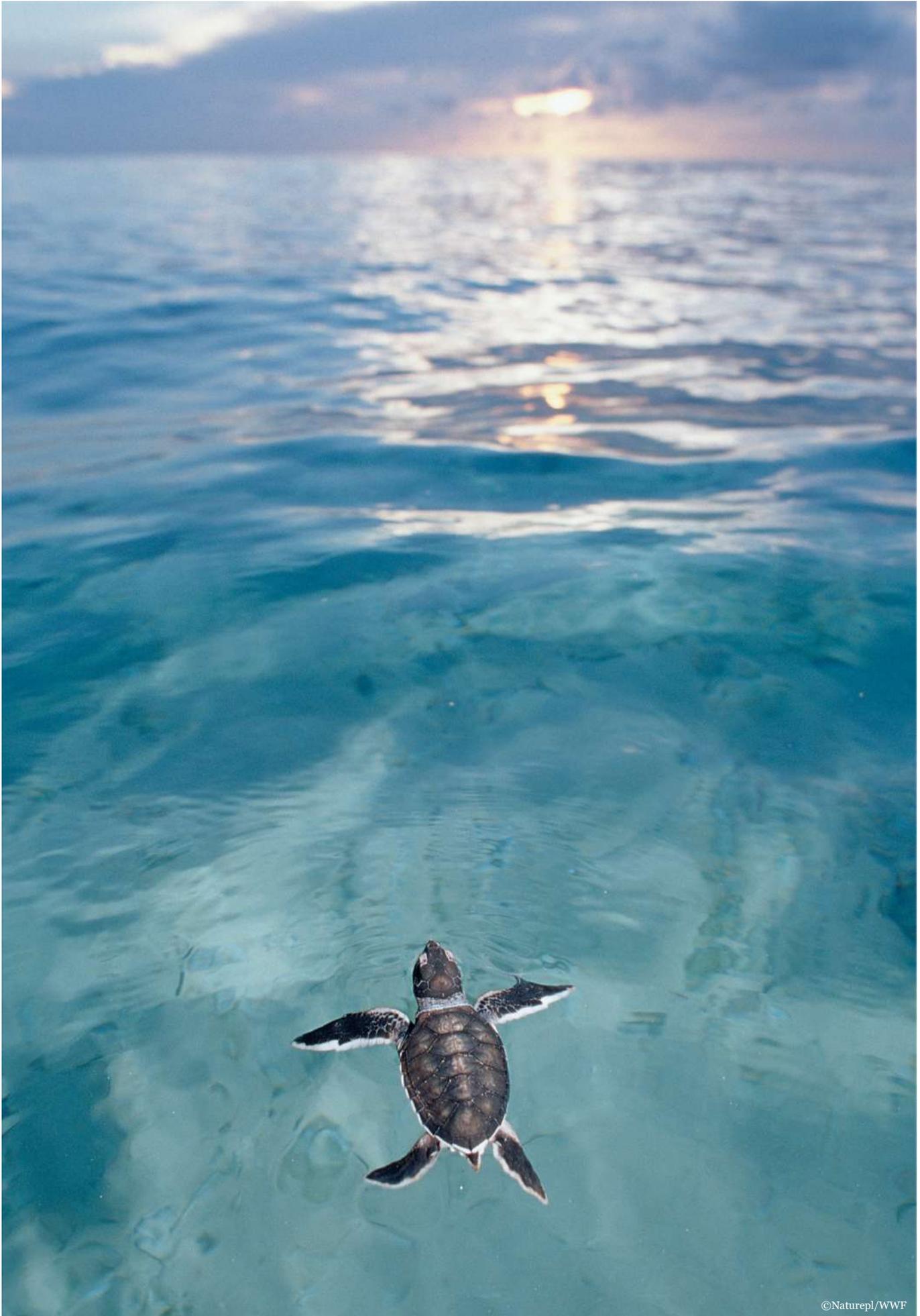
menunjukkan bentang Pantai Sebusus memiliki tingkat pendaratan penyu yang jauh lebih tinggi atau 94% dari total penyu yang naik.



Gambar 6. Jumlah pendaratan penyu dalam rentang tahun Mei 2009-Juni 2021.



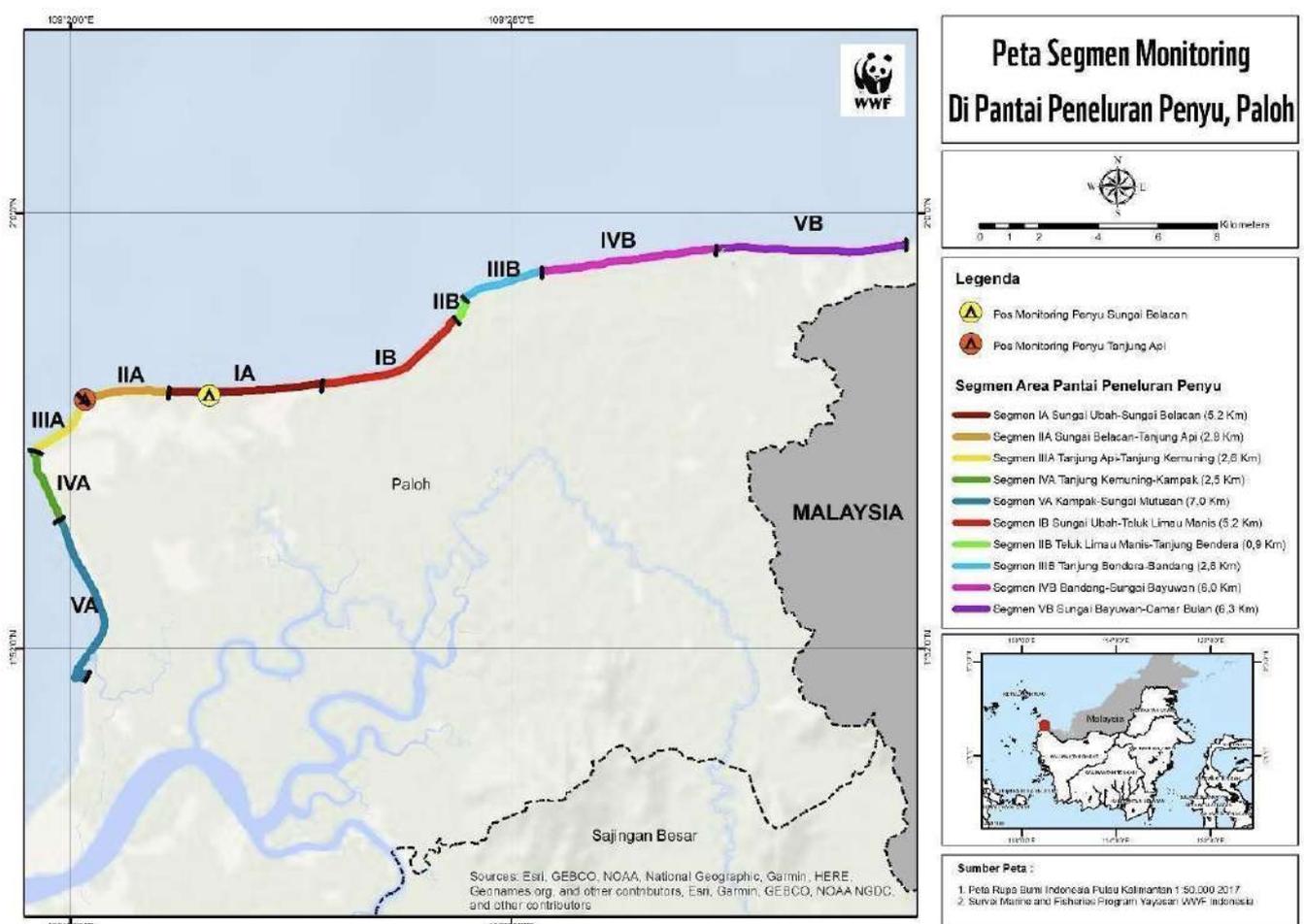
Gambar 7. Perbandingan penyu yang naik bertelur dan tidak bertelur dalam rentang tahun Mei 2009-Juni 2021.



©Naturepl/WWF



Gambar 8. Perbandingan sarang selamat dan hilang dalam rentang tahun Mei 2009-Juni 2021.



Gambar 9. Peta segmen monitoring di pantai peneluran penyu Paloh.

## 2.2.2 PENANGGULANGAN ANCAMAN TANGKAPAN SAMPING (BYCATCH)

Yayasan WWF Indonesia juga berupaya meminimalisir terjadinya tangkapan samping (*bycatch*) di laut. Seperti yang kerap terjadi sebelumnya, nelayan sering kali mendapati jala yang mereka tebar justru menjerat penyu, alih-alih ikan konsumsi yang menjadi tujuan penangkapan. Wilayah Paloh sebagian besar merupakan perairan dan jalur pelayaran internasional yang sering dilewati oleh kapal-kapal besar. Wilayah perairan ini juga menjadi incaran penangkapan ikan bagi kapal-kapal nelayan negara lain.



*Penyu lekang tertangkap tanpa sengaja (bycatch) di perairan Paloh.*

Dengan wilayah laut yang demikian luas, Kecamatan Paloh menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang cukup berlimpah. Musim teduh yang berlangsung antara bulan Maret hingga Oktober setiap tahunnya menghasilkan tangkapan yang bahkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal hingga ke pasar luar kecamatan. Selain potensi perikanan yang melimpah, perairan Paloh juga merupakan ruaya pakan atau wilayah yang menjadi sumber makanan bagi beberapa jenis penyu, serta menjadi jalur migrasi mamalia laut seperti paus, lumba-lumba serta porpoise.

Sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kecil dengan kapal tangkap berkekuatan 2-5 GT, menjadikan ikan-ikan konsumsi seperti bawal, tenggiri, dan kakap, serta tangkapan lain seperti layur sebagai tangkapan utama. Mayoritas nelayan di Paloh menggunakan alat tangkap jaring insang (*gillnet*). Ukuran jaring disesuaikan dengan target tangkapan serta musim yang sedang berlangsung. Jika sedang tidak banyak ikan besar, maka ukuran celah jaring yang digunakan berukuran lebih kecil.



*Kasus tangkapan samping (bycatch) juga terjadi pada satwa lain seperti pada porpoise (atas). Observer sedang mengidentifikasi dan mendaftarkan penyu yang terjat (bawah).*

Penggunaan jaring kadang menghasilkan tangkapan samping (*bycatch*) yang merugikan nelayan karena satwa yang tertangkap, dalam keadaan hidup atau mati, membuat alat tangkap tersebut rusak. Tidak ada keuntungan yang didapatkan dari kasus *bycatch* ini. Baik bagi nelayan maupun satwa. Tangkapan samping dialami oleh hampir 90% nelayan dengan frekuensi penangkapan yang cukup intens terjadi setiap kali trip. Hasil pengamatan di perairan Paloh pada 2009 hingga 2013 menemukan informasi yang menyebutkan bahwa kematian beberapa satwa terjadi akibat *bycatch*. Satwa-satwa tersebut terdiri dari penyu, hiu, lumba-lumba, dan porpoise. Agustus 2013, salah satu spesies hiu yang diduga hiu zebra (*Stegostoma fasciatum*) tertangkap jaring nelayan perairan Paloh.

Di tahun yang sama, tim Yayasan WWF Indonesia juga mencatat bahwa sekitar 500 ekor penyu per tahun tertangkap tidak sengaja di jaring nelayan Paloh. Peristiwa ini cukup mengkhawatirkan mengingat adanya kemungkinan penyu bisa saja mati karena hal tertangkap jaring nelayan.

## TINGGINYA ANGKA BYCATCH DI PERAIRAN LAUT PALOH MEMICU SEJUMLAH INISIATIF. DI ANTARANYA DENGAN MELAKUKAN UJI COBA PENGGUNAAN LAMPU LIGHT-EMITTING DIODE (LED) HIJAU PADA JARING. CAHAYA HIJAU YANG DIHASILKAN OLEH LAMPU LED MAMPU TERDETEKSI OLEH PENYU SEHINGGA SATWA ITU DAPAT MENJAUH ATAU MENGUBAH ARAH RENANG DAN MEMINIMALISIR TERJERAT OLEH JARING.

Lampu LED dipilih karena alasan penyesuaian dengan alat tangkap yang umum digunakan di Paloh, yakni *gillnet*. Tim Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia di lokasi lain, juga telah menerapkan teknologi *Turtle Excluder Device* (TED) untuk pukat trawl dan circle hook pada alat tangkap rawai. Pada rentang tahun 2013-2017, kegiatan penanggulangan bycatch difokuskan pada uji coba penggunaan LED. Pengambilan data dilakukan oleh dua orang observer dengan cara mengikuti secara langsung operasi penangkapan bersama nelayan di atas kapal.



©Yayasan WWF Indonesia/Abdurrachman Maulidi



©Yayasan WWF Indonesia/Abdurrachman Maulidi

*Pengoperasian penggunaan lampu LED di kapal nelayan Paloh.*

Alat tangkap yang digunakan untuk uji coba yaitu dua unit jaring yang dioperasikan oleh masing-masing armada dalam waktu yang bersamaan dengan lokasi yang berdekatan. Salah satu jaring dipasang dengan lampu LED untuk uji coba. Sedangkan satu jaring lainnya sebagai alat tangkap kontrol tanpa ditambahkan alat apapun.

Sementara itu, pada tahun 2016 hingga 2017, Yayasan WWF Indonesia juga melaksanakan agenda *Training of Trainer* (ToT) dalam rangka sosialisasi penanganan bycatch penyu yang sesuai dengan *Better Management Practices* (BMP). Di dalam kegiatan tersebut, Yayasan WWF Indonesia juga memberikan beberapa tips khusus kepada nelayan yang mengalami *bycatch* dengan harapan penyu dapat kembali ke laut bebas dengan selamat.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa penggunaan lampu LED hijau sangat efektif menurunkan laju penyu yang tertangkap tanpa sengaja oleh nelayan hingga 62,5 persen. Sebaliknya, hasil tangkapan nelayan meningkat sebesar 15,23 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nelayan ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil tangkapan. Berlatarkan keberhasilan tersebut, pada 2018, Paloh dikunjungi oleh WWF-Malaysia yang ingin belajar dan melihat langsung upaya mitigasi *bycatch*. Selanjutnya, dalam tiga tahun berturut-turut, yakni 2018 hingga 2021, Yayasan WWF Indonesia aktif melakukan sosialisasi dan pengenalan lampu LED kepada nelayan pengguna *gillnet* di Paloh dan sekitarnya.

Di tahun 2021, Yayasan WWF Indonesia melebarkan fokusnya pada analisa valuasi ekonomi penggunaan lampu LED hijau dalam aktivitas penggunaan *gillnet*. Analisa ini bertujuan untuk memastikan apakah keberhasilan penggunaan LED di Paloh dapat berjalan dengan tanpa mengorbankan sisi ekonomi nelayan dan memungkinkan untuk dapat meningkatkan ekonomi para nelayan.

Umumnya, para nelayan menanggapi dengan antusias dengan diperkenalkannya lampu LED hijau ini. Mereka tidak keberatan jaring mereka dipasang lampu LED. Mereka juga tidak menemui banyak kendala. Satu-satunya kendala adalah ketika jaring bergulung karena arus yang cukup deras, sehingga membuat lampu LED terlilit dan berbelit-belit. Nelayan mau tidak mau memperbaiki tatanan jaring dan kegiatan ini membutuhkan waktu cukup lama, hampir seharian.

Kabar baiknya, selama uji coba, terjadi peningkatan pemahaman nelayan dalam penanganan *bycatch*. Nilai akhir rata-rata post test mengenai penanganan *bycatch* yang sesuai dengan BMP adalah 73,7. Angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan hasil pre test yang hanya berada di angka 27,8.

Melalui uji coba, ditemukan juga perbandingan valuasi ekonomi antara biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan jaring akibat *bycatch* dan biaya penggunaan

lampu LED. Rata-rata biaya perbaikan jaring karena *bycatch* adalah sebesar Rp1.762.500,- per tahun per kapal. Sedangkan rata-rata biaya penggunaan lampu LED per pis jaring adalah Rp1.222.449, -. Umumnya, seorang nelayan memiliki lebih dari 50 pis jaring setiap kapalnya.

Artinya, perbandingan valuasi penggunaan lampu LED terhadap biaya perbaikan jaring sangat jauh berbeda. Pada praktiknya nanti ketika diterapkan di luar uji coba, akan berat jika dibebankan kepada nelayan. Oleh karenanya, solusi agar harga lampu dapat ditekan atau setidaknya ada subsidi bagi nelayan pengguna lampu LED terus diupayakan. Peluang pengembangan teknologi tenaga surya untuk meringankan beban biaya energi untuk pengadaan lampu LED juga terus dicari.

Penggunaan lampu LED awalnya merupakan salah satu program *Smart Gear* yang sudah disosialisasikan oleh WWF-United State (US) dan *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA: Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang berfokus pada kondisi samudera dan atmosfer). Di Indonesia sendiri, Paloh menjadi lokasi pertama penggunaan lampu LED untuk menghalau penyu mendekati jaring nelayan. Hingga kini, cara ini baru dilakukan di dua lokasi. Selain di Paloh, para nelayan yang didampingi penggiat konservasi di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, juga menerapkan penggunaan lampu LED.



©Yayasan WWF Indonesia/Abdurrahman Maulidi

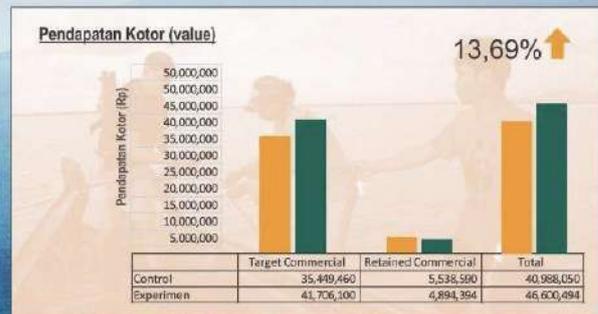
Jaringan	Setting	Total Bawal	Penyu Tertangkap			
			P. Hijau	P. Sisik	P. Lekang	Total
Tidak di pasang lampu LED (control)	71	488	14	3	7	24
Dipasang lampu LED (Experimen)	71	560	6	2	1	9

Menurunkan bycatch Penyu

**62,5 %** ↓

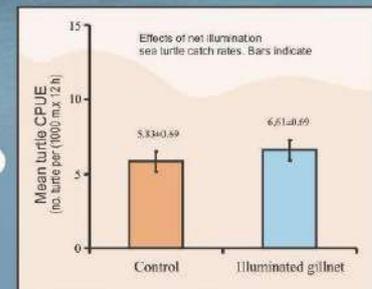


## Pengembangan Teknologi Mitigasi Bycatch Penyu



Pendapatan Kotor (value)

**↑ 13,69 %**



Meningkatkan hasil tangkapan

**↑ 15.23 %**

321 Nelayan Paloh dilatih

**43,96 %**

Nelayan Mampu menangani Penyu dengan baik (n=96)

Gambar 10. Infografis hasil kajian mitigasi tangkapan samping (bycatch) melalui penggunaan lampu LED hijau pada jaring insang.

## 2.2.3 RESTORASI VEGETASI PESISIR

Meningkatnya pembangunan di Kecamatan Paloh, pembukaan lahan untuk dijadikan sebagai jalan paralel tidak jauh dari pesisir pantai Desa Sebusubus hingga Desa Temajuk, serta kepentingan lain dari pembangunan memicu pembukaan lahan secara besar-besaran oleh masyarakat. Dampaknya, vegetasi hutan pantai peneluran penyu menjadi terbuka.

Perkembangan ini mengakibatkan meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar pesisir pantai. Sementara itu, penyu merupakan satwa yang sensitif terhadap cahaya maupun getaran. Beberapa titik di

wilayah hotspot area menjadi mulai jarang didatangi penyu untuk mendarat. Penyu enggan mendarat untuk bertelur karena adanya aktivitas manusia, serta terbukanya akses cahaya dari jalan, maupun lalu lintas kendaraan.

Untuk mereduksi akibat dari pembangunan tersebut, tim Yayasan WWF Indonesia, Pokmaswas Kambau Borneo, Pokmas Wahana Bahari Paloh, Tim Monitoring Penyu Paloh, dan pihak-pihak lain kemudian menggalakkan kegiatan restorasi lahan kosong.



**Kondisi lahan terbuka di vegetasi hutan pantai peneluran penyu.**

**RESTORASI DILAKUKAN DENGAN MEMANFAATKAN BENIH TUMBUHAN LOKAL YANG ADA DI PESISIR PALOH. KAJIAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA FAKULTAS KEHUTANAN, UNIVERSITAS TANJUNGPURA, TAHUN 2017, MENGHASILKAN KESIMPULAN BERUPA DAFTAR SPESIES YANG MERUPAKAN TANAMAN ASLI PENYUSUN EKOSISTEM HUTAN PANTAI PALOH, YAKNI CEMARA LAUT (*Casuarina equisetifolia*), PANDAN LAUT (*Pandanus tectorius*), POHON KETAPANG (*Terminalia catappa*), DAN BERUWAS LAUT (*Scaevolla taccada*).**

Kajian tersebut sangat membantu tim Yayasan WWF Indonesia dalam memilih jenis pepohonan. Dengan adanya restorasi, diharapkan akan terbentuk vegetasi pesisir seperti sediaan yang sangat dibutuhkan oleh penyu sebagai lokasi bertelur. Selama jangka waktu dari tahun 2016 hingga 2019, kegiatan restorasi berhasil dilaksanakan di area seluas kurang lebih 37 hektar dengan tingkat survival rate di atas 50 persen.

Kegiatan penanaman sendiri berlangsung minimal satu kali dalam setahun. Biasanya, kegiatan penanaman dilakukan bersamaan dengan agenda-agenda tertentu yang melibatkan publik dan keramaian orang, sehingga partisipasi kegiatan restorasi berasal dari berbagai macam kalangan. Salah satu kontribusi besar diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Barat pada 2018. Mereka turut berpartisipasi dalam penanaman 9.500 batang cemara laut yang dilakukan di area seluas 9 hektar. Tahun 2020, DKP Kalimantan Barat kembali berpartisipasi dalam penanaman 4.000 batang di area seluas 4 hektar.



©Yayasan WWF Indonesia/Andi Priansyah



©Yayasan WWF Indonesia/Andi Priansyah



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosa



©Yayasan WWF Indonesia/Firman



©Yayasan WWF Indonesia/Andi Priansyah

**Aksi restorasi kawasan pesisir Paloh digalakkan oleh kelompok masyarakat, penggiat lingkungan, dan para pengunjung.**

## 2.2.4 PEMBERSIHAN PANTAI DARI SAMPAH

Selain kerap disinggahi penyu untuk bertelur, ironisnya Pantai Paloh juga menjadi tempat terdamparnya sampah-sampah yang sebagian besar adalah botol-botol plastik bekas penampung air mineral maupun bekas kemasan minyak pelumas yang berasal dari kapal nelayan. Selain mengotori pantai, sampah-sampah yang tidak dapat terurai tersebut mengganggu aktivitas peneluran penyu.

Saat musim teduh (Maret - Oktober) jumlah sampah-sampah kiriman tersebut berkisar antara 10 hingga 20 botol per hari. Saat musim ombak besar (November - Februari) sampah yang terdampar menjadi lebih banyak karena terbawa arus dari arah utara.

Sampah yang mendarat di pantai peneluran penyu Paloh berasal tidak hanya dari dalam negeri melainkan juga dari negara lain. Setidaknya ada sekitar enam negara di sekitar Indonesia yang menjadi asal sampah-sampah plastik tersebut, Malaysia, Singapore, Filipina, Thailand, China, dan Vietnam. Ini merupakan data hasil observasi yang dilakukan sejak 2011, botol-botol air mineral yang terdampar di pantai Paloh umumnya memiliki label produksi dari negara-negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sampah tersebut adalah sampah kiriman dari berbagai negara, sebab posisi Pantai Peneluran Paloh berhadapan langsung dengan Laut Natuna Utara yang dikelilingi oleh beberapa negara. Di Desa Sebusus sendiri, belum ada sarana dan prasarana untuk tempat pembuangan sampah akhir dan pengelolaan sampah yang memadai. Masyarakat lebih sering membuang sampah hasil rumah tangga ke sungai maupun dibakar di pekarangan rumah mereka.



©Yayasan WWF Indonesia/Firman



©Yayasan WWF Indonesia/Firman



©Yayasan WWF Indonesia/Agri Aditya Fisesa



©Yayasan WWF Indonesia/Janarius Iptung Wijanarto

***Kegiatan pembersihan pantai dari sampah plastik oleh kelompok masyarakat dan para pengunjung.***

Data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2012 menyatakan bahwa sampah yang dihasilkan setiap orang mencapai 2 kg setiap harinya. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar sampah yang dihasilkan. Kecamatan Paloh yang terletak di Kabupaten Sambas sendiri berpenduduk sekitar 25.485 jiwa (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas 2019<sup>5</sup>) dan berpotensi menghasilkan jumlah sampah yang besar.

Tim Yayasan WWF Indonesia pernah menggagas pengadaan mesin pencacah sampah, penetapan lokasi atau rumah produksi pengolahan sampah, serta pelatihan pengolahan sampah organik dan non organik untuk menanggulangi masalah ini. Gagasan tersebut diinisiasi sejak tahun 2012. Survei terkait potensi pasar, alat serta bahan mesin, bahan baku untuk menunjang operasional, dan lokasi yang representatif untuk dijadikan rumah produksi pun dilakukan.

## **MESIN PENCACAH BERHASIL DIADAKAN. NAMUN, TERNYATA LEBIH BANYAK KENDALA LAPANGAN BERKAITAN DENGAN BAHAN BAKU DAN PASAR YANG MEMBUAT RENCANA TIDAK DAPAT BERJALAN SECARA MENYELURUH.**

Kendala yang dihadapi dari inisiasi penanggulangan sampah ini antara lain, jumlah sampah yang harus dicacah minimal mencapai sekitar 8 ton sedangkan untuk mencapai angka itu dengan pasokan sampah dari pantai pesisir Paloh dibutuhkan waktu berbulan-bulan. Untuk mengambil sampah dari masyarakat, sangat dibutuhkan sumber daya yang besar dan personil yang tidak sedikit mengingat wilayah Kecamatan Paloh yang sangat luas. Lokasi pemukiman yang tidak terkonsentrasi di satu titik dan infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya beraspal juga menjadi kendala tersendiri.

Kendala lainnya, tidak ada pihak pasti di Paloh yang bersedia menampung sampah hasil cacahan atau pengolahan. Untuk menemukan pihak penampung, perlu perjalanan ke Kota Pontianak dan membutuhkan biaya tambahan yang tidak murah. Jika diimplementasikan, maka akan memakan biaya yang cukup banyak yang tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan.



<sup>5</sup>BPS Kabupaten Sambas. Kecamatan Paloh dalam Angka. Diakses dari <https://sambaskab.bps.go.id/publication/2019/09/26/cdfeddc483a746c607378cb3/kecamatan-paloh-dalam-angka-2019>.



©Yayasan WWF Indonesia/Hermanto



©Yayasan WWF Indonesia/Yanto Aldiano Anong

**Aktivitas pengolahan sampah botol plastik menggunakan mesin pencacah.**

Meski rencana pengolahan sampah tidak sesuai rencana dan harapan, kegiatan bersih-bersih sampah tidak lantas berhenti. Beberapa kelompok masyarakat, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Cermi Kampak Indah, punya agenda rutin untuk bersih-bersih sampah terutama setelah musim gelombang besar.

Begitu pula dengan Pokmaswas Kambau Borneo, Tim Monitoring Penyu Paloh, dan Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh. Di tengah kegiatan melakukan pemantauan dan pengawasan pantai, mereka tekun mengumpulkan sampah yang ditemui terserak di pantai. Sebagian sampah langsung dibakar. Sampah yang bisa didaur ulang akan dikumpulkan di sebuah bak sampah besar yang berada di pos monitoring. Kegiatan pembersihan pantai juga diselipkan ke dalam agenda-agenda tertentu seperti saat diadakan FESPA maupun saat restorasi. Beberapa komunitas pecinta lingkungan dan pelajar yang berkunjung pun sering kali tidak hanya sekadar datang untuk berwisata, namun juga membawa agenda melepas tukik ke laut dan bersih-bersih sampah.

## 2.3 DISEMINASI INFORMASI

### 2.3.1 DOKUMENTASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

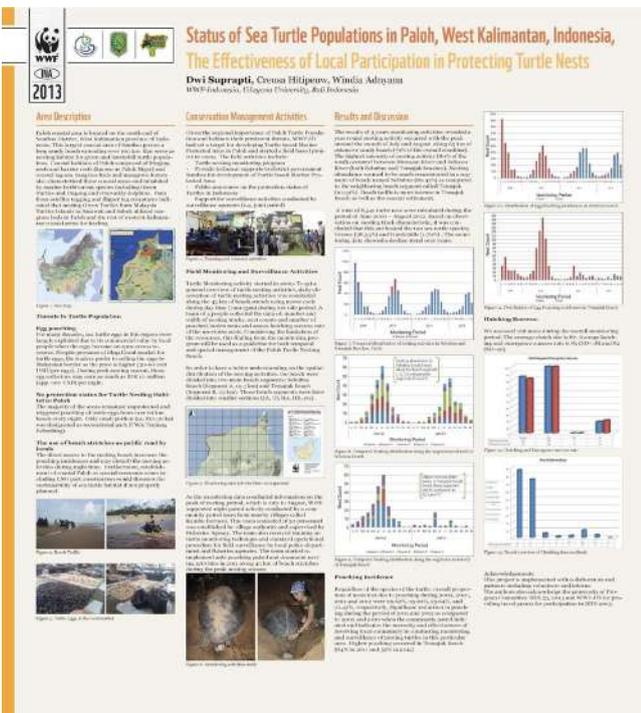
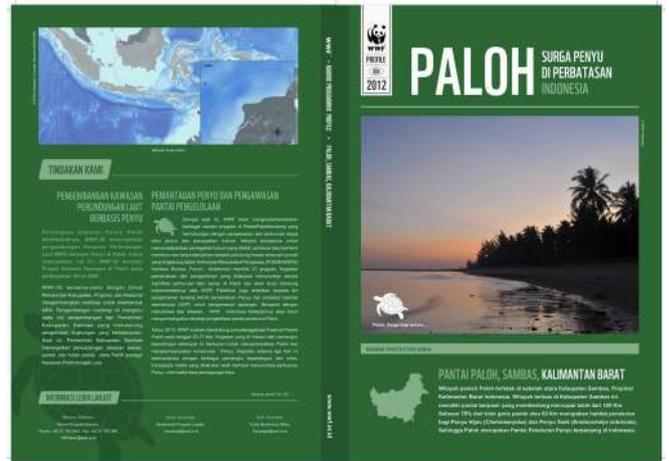
FESPA memang menjadi ajang penting dalam penyebaran informasi mengenai perlindungan penyu. Festival ini mampu menjangkau khalayak ramai, dari berbagai usia dan latar belakang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Meski demikian, efisiensi kampanye melalui festival ini masih sangat sulit untuk diukur. Tidak ada jaminan bahwa ramai dan banyaknya masyarakat yang datang ke festival kemudian mengetahui, menyadari, dan langsung berpihak pada upaya perlindungan penyu.



Oleh karenanya, tim Yayasan WWF Indonesia juga berinisiatif untuk memproduksi produk komunikasi dalam bentuk visual (foto, video, film) dan tulisan (buku, poster, laporan populer, dan sebagainya). Harapannya, produk-produk komunikasi tersebut dapat menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat atau berbagai pihak yang memiliki keinginan untuk mempelajari lebih dalam tentang konservasi penyu, pendampingan masyarakat, hingga cara membangun kerja sama dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan konservasi. Melalui produk komunikasi tersebut, diharapkan dapat memperoleh target sasaran yang lebih jelas dan hasilnya lebih terukur.

Produk komunikasi yang telah diproduksi dan disebarluaskan antara lain adalah laporan populer (*popular report*), lembar fakta (*factsheet*), seri foto (*photos series*), ringkasan kebijakan (*policy brief*), hingga buku pembelajaran (*lesson learned*).

©Yayasan WWF Indonesia/Mario Lourdi



Lembar fakta yang menjadi salah satu produk komunikasi tim Yayasan WWF Indonesia di Paloh.

Laporan populer adalah salah satu produk komunikasi dengan ciri penyajian reportase mendalam tentang aktivitas lapangan yang bertujuan sebagai bahan laporan kepada donor dan para mitra.

Lembar fakta adalah sajian naratif berdasarkan fakta dan temuan lapangan yang dikemas dalam bentuk yang populer yang memuat informasi-informasi dengan kekuatan visual.

Seri foto adalah produk komunikasi dalam format visual atau fotografi yang bertujuan memberikan informasi aktual tentang isu yang sedang terjadi di desa dampingan.

Sementara itu, buku pembelajaran merupakan produk komunikasi berbentuk buku yang bertujuan untuk merekam praktik terbaik dan pengalaman-pengalaman lapangan, hambatan dan solusinya.

Beragam produk komunikasi tersebut memiliki fungsi tersendiri. Bentuk visual (foto dan video) berfungsi untuk menarik perhatian audiens dan memaparkan gagasan dan kondisi di tahap awal. Bentuk komunikasi visual dapat bersifat fleksibel, yaitu dapat digunakan dalam momen apapun. Foto juga dapat berdiri sendiri, seperti misalnya dalam pameran ataupun sebagai penunjang tulisan-tulisan.

# PRODUK KOMUNIKASI MEMILIKI PERAN PENTING SEBAGAI ALAT DOKUMENTASI DARI KEGIATAN YANG SUDAH BERLANGSUNG, DAN MENJADI SARANA YANG PENTING GUNA MENGUBAH POLA PIKIR, MENGGUGAH KESADARAN, SERTA MENINGKATKAN PENGETAHUAN BERBAGAI PIHAK SEHINGGA MEMILIKI KOMITMEN YANG DATANG DARI KEINGINAN DIRI SENDIRI UNTUK Mendukung KONSERVASI PENYU BESERTA HABITATNYA.

Tak dipungkiri, terkadang biaya untuk memproduksi berbagai produk komunikasi menjadi persoalan tersendiri. Hal tersebut biasanya disiasati dengan melibatkan pihak-pihak lain atau program-program

lain yang memiliki kepentingan dan misi sama. Untuk diseminasi produk komunikasi, pemanfaatan media tak berbayar seperti media sosial dapat menjadi alternatif.



©Yayasan WWF Indonesia/Hendro Susanto

©Yayasan WWF Indonesia/Redi Mahardika



*Wawancara dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan kampanye penyadartahuan terhadap konservasi penyus.*

## 2.3.2 PELATIHAN FOTOGRAFI MASYARAKAT MELALUI PANDACLICK!

Tim Yayasan WWF Indonesia juga menyelenggarakan pelatihan fotografi untuk masyarakat yang dinamakan program PandaCLICK!

Pada dasarnya, program PandaCLICK! tidak berbeda jauh dengan konsep *citizen journalism* (jurnalisme warga). Secara detail, program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendokumentasikan hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keadaan lingkungan atau alam, sosial masyarakat, ataupun budaya tradisional. Tujuan lain dari program ini juga merekam proses perubahan, kelebihan, harapan-harapan di masa depan, serta tantangan yang dialami dan dihadapi masyarakat.

### PROGRAM PANDACLICK! MENGAJAK MASYARAKAT AGAR DAPAT MELIHAT, MELINDUNGI, DAN MENGONTROL LINGKUNGAN, TATA MASYARAKAT, ALAM, BUDAYA, PEMBANGUNAN, DAN HAL-HAL PENTING LAINNYA DI WILAYAH MEREKA SENDIRI MELALUI MEDIA REKAM VISUAL.

Metode tersebut juga digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi secara visual dan naratif, termasuk menambah pengetahuan dan nilai-nilai setempat untuk perencanaan pembangunan, konservasi alam, dan budaya. Hal-hal tersebut diharapkan dapat memperluas dan melengkapi informasi yang sebelumnya sudah ada sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi para pembuat keputusan, terutama keputusan-keputusan yang berkaitan dengan arah pembangunan daerah di masa depan.

Pengembangan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program PandaCLICK! dengan konsep konservasi Penyu bertujuan untuk menekan tingkat ancaman terhadap penyu dan habitatnya. Adanya informasi yang memadai dan menyeluruh dari masyarakat yang menjadi peserta PandaCLICK! menjadi data yang faktual tentang berbagai hal, termasuk praktik ekonomi, kearifan lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, dan banyak lagi. Pemerintah maupun pihak lain dapat menggunakan data yang berupa bukti-bukti visual sebagai representasi gagasan yang dibuat langsung oleh masyarakat tersebut sebagai bahan pertimbangan saat mengambil keputusan pembangunan.

Kegiatan PandaCLICK! di Paloh berlangsung pada tahun 2011. Sekitar 30 orang terlibat dalam program ini. Mereka dilatih teknis penggunaan kamera dan

konsep membuat foto yang mampu berbicara serta menjadi media penyampai gagasan. Foto-foto hasil jepretan para peserta PandaCLICK! beberapa kali dipamerkan di acara FESPA. Pada April 2016, foto-foto hasil dari program PandaCLICK! dari Paloh dan daerah lainnya, ditampilkan dalam acara roadshow dan talkshow PandaCLICK! di Yogyakarta. Salah seorang peserta PandaCLICK! asal Paloh, yakni Mega Sari, hadir langsung di Yogyakarta untuk memaparkan kisah-kisah tentang penyu dan masyarakat Paloh melalui foto-foto hasil bidikannya.

Selain dipamerkan dalam berbagai pameran, foto-foto yang dihasilkan oleh para peserta PandaCLICK! juga digunakan untuk kepentingan kampanye konservasi penyu, seperti dipakai untuk pembuatan poster dan materi buku. Tidak sedikit juga foto-foto mereka yang digunakan oleh kelompok masyarakat dan aparat pemerintah desa untuk menunjang proposal yang berkaitan dengan kegiatan kelompok dan pembangunan desa.



*Pelatihan fotografi masyarakat dalam program PandaCLICK!.*

# **BAB III: MENJAGA KEBERLANJUTAN KONSERVASI DI PALOH**



# 3.1 PENGESAHAN PALOH SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI DAN RENCANA PENGELOLAANNYA

## 3.1.1 PROSES MENDORONG DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) MENJADI PERATURAN DAERAH (PERDA)

“Sejak awal memulai kegiatan konservasi di Paloh tahun 2009, Pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait dan Yayasan WWF Indonesia telah berkomitmen untuk mengupayakan agar pantai Paloh dapat menjadi kawasan yang terlindungi secara hukum.”

Berbagai kegiatan kajian data, restorasi, Festival Pesisir Paloh (FESPA), penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok serta aktivitas lainnya yang dilakukan para pemangku kepentingan dan Yayasan WWF Indonesia beserta para mitra memiliki tujuan utama, yakni agar kawasan pantai peneluran penyu Paloh mendapatkan status Kawasan Konservasi. Target status yang hendak dicapai adalah Paloh menjadi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) dengan target konservasi perlindungan penyu dan habitatnya.



©Yayasan WWF Indonesia/Udiyansyah

*Tim Yayasan WWF Indonesia sedang melakukan pengumpulan data biofisik untuk kelengkapan dokumen penunjang.*

Kawasan Konservasi Perairan menurut Permen KP Nomor 17 Tahun 2008 merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Istilah ini dipersingkat penyebutannya menjadi Kawasan Konservasi dalam Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Setelah adanya regulasi terbaru tersebut, maka setidaknya terdapat empat regulasi yang tidak lagi berlaku, meliputi:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Konservasi Perairan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
- d. Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kawasan Konservasi menurut Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tersebut menyebutkan bahwa kategori pengelolaannya meliputi Taman, Suaka dan Kawasan Konservasi Maritim. Karena proses inisiasi hingga penetapan Kawasan konservasi di Paloh melalui perubahan-perubahan regulasi yang ada, maka penyebutan istilah yang ada mengikuti pada waktu proses tersebut dilakukan.



©Yayasan WWF Indonesia/M. Nouval Isnin Akbari

**RZWP3K (RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL) MERUPAKAN SALAH SATU INSTRUMEN DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT YANG BERADA DALAM WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI. AGAR DOKUMEN RZWP3K DAPAT MENJADI DOKUMEN YANG SAH DAN LEGAL, LEGALITASNYA MELALUI PERDA YANG DISETUJUI OLEH BADAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF PROVINSI MENJADI SANGAT DIPERLUKAN. KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RZWP3K DIATUR DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

Agar cita-cita besar itu terwujud, DKP Kalimantan Barat, BPSPL Pontianak yang didukung oleh Yayasan WWF Indonesia menginisiasi lebih dari sepuluh pertemuan multipihak sejak tahun 2013 hingga 2017. Pemda Kabupaten Sambas, Pemerintah Desa, LSM/NGO, perwakilan masyarakat, hingga akademisi turut diundang di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Sebagai tahap awal, pada tahun 2009 telah dilakukan inisiasi pencadangan di tingkat Kabupaten Sambas. Selanjutnya, pada tahun 2013, dilakukan upaya tindak lanjut inisiasi tersebut dengan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Sambas.

RZWP3K merupakan rencana yang sangat vital bagi perlindungan dan sistem pengelolaan sebuah kawasan pesisir. Setidaknya ada tiga tujuan dari disusunnya RZWP3K. Pertama, melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal. Kedua, memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan wilayah laut yang berskala nasional dan internasional. Ketiga, mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.



*Rapat penguatan bahan kajian yang diselenggarakan di pos Tim Monitoring Penyuluhan Paloh.*

Perubahan tersebut terjadi dengan alasan peraturan perundang-undangan sebelumnya pada tahun 2007 dinilai lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya secara mendalam.

Di tahun yang sama, terjadi pula perubahan wewenang terhadap kawasan laut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa bidang kelautan tidak lagi menjadi wewenang pemerintah daerah/kabupaten, melainkan wewenang pemerintah provinsi. Konsekuensinya, penyusunan RZWP3K tidak lagi harus mengacu pada kebijakan pemerintah daerah/kabupaten, melainkan langsung kepada pemerintah provinsi.

Dengan berbagai perubahan undang-undang, penyesuaian pun dilakukan ketika melakukan penyusunan dokumen. Terdapat perubahan poin-poin tertentu. Misalnya saja, sebelumnya kewenangan provinsi hanya mencakup 4-12 mil wilayah perairan (terhitung dari bibir pantai). Sementara di dalam undang-undang baru, wewenang provinsi diperluas menjadi 0-12 mil.

Tiga tahun pasca perubahan undang-undang, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2017 diadakan rapat konsolidasi di DKP Kalimantan Barat untuk merencanakan penyusunan dokumen RZWP3K Kalimantan Barat. DKP Kalimantan Barat bertindak sebagai ketua kelompok kerja dan tim teknis, sebagaimana mandat Gubernur Kalimantan Barat yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor:321/DKP/2017.

Usai rapat konsolidasi, pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan upaya pengumpulan data dilakukan beberapa kali. Berbagai pihak yang memiliki kepentingan di wilayah kerja pesisir Kalimantan Barat sangat berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Di antaranya, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat. Masing-masing menyampaikan data pendukung yang kemudian diakomodir di dalam dokumen awal RZWP3K Kalimantan Barat.

Salah satu dokumen penting yang diakomodir adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 193/DKP/2017 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam surat keputusan tersebut tercantum pencadangan empat lokasi kawasan konservasi perairan yang terdapat di empat kabupaten pesisir di Kalimantan Barat. Keempat kabupaten tersebut yakni Paloh di Kabupaten Sambas, Pulau-Pulau Kecil Pulau Randayan di Kabupaten Bengkayang, Pesisir Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya, serta Pulau-Pulau Kecil Kendawangan di Kabupaten Ketapang. Total luasan kawasan yang dicadangkan mencapai lebih dari 740 ribu hektar.

Peta alokasi pemanfaatan ruang laut merupakan satu dari berbagai problematika yang menjadi topik penting untuk dibahas dalam setiap pertemuan. Pasalnya, ditemukan adanya perbedaan data antara dua dokumen pengajuan walaupun keduanya berasal dari survei dan penelitian yang terperinci. Sebagai contoh, dalam usulan untuk luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Paloh, luas kawasan yang diajukan mencapai 150.000 hektar, sedangkan pada Surat Keputusan Gubernur hanya mencapai 105.252,79 hektar.

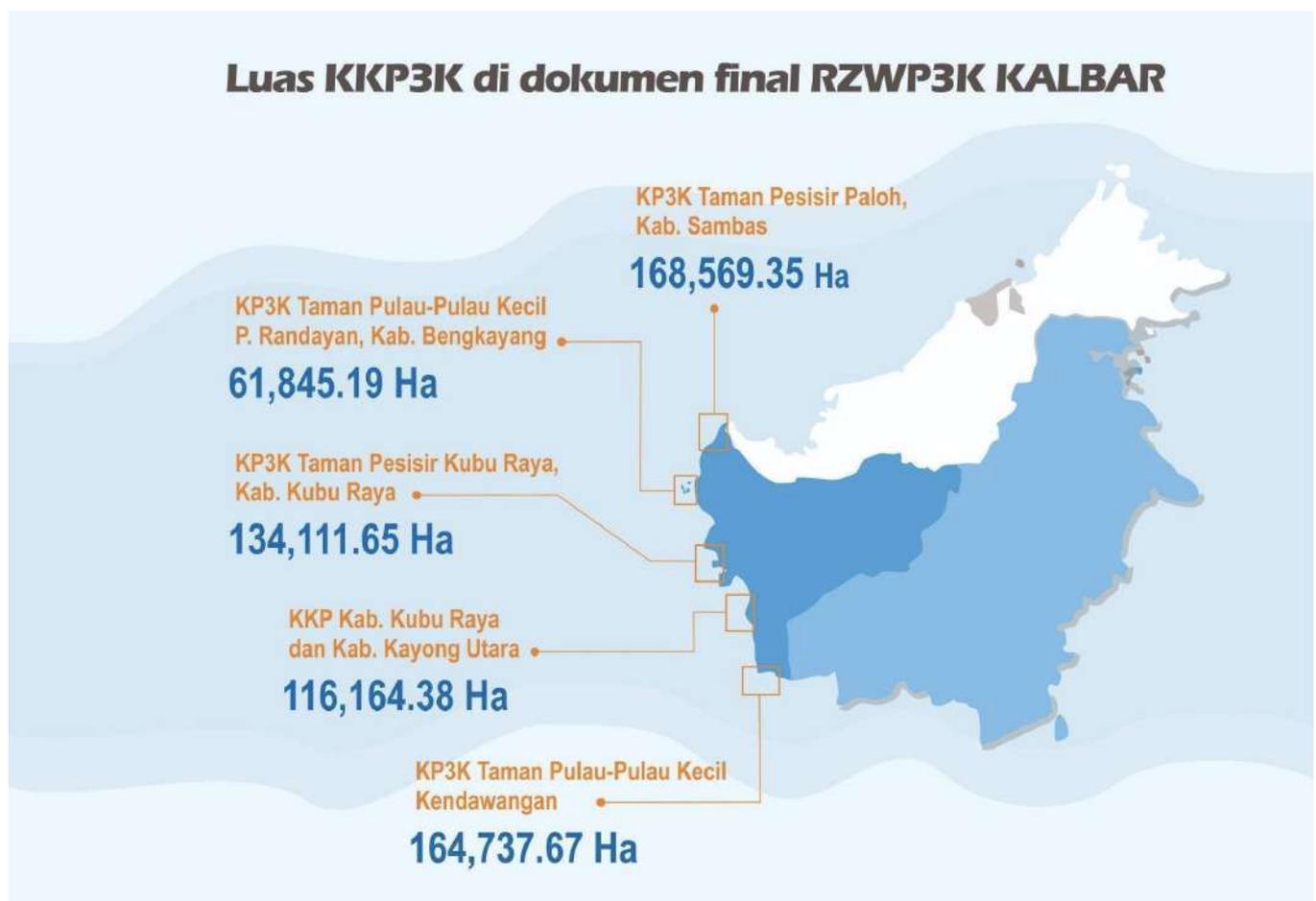
Selisih angka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam berita acara Laporan Antara agar dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis. Keputusan akhir tetap berada di tangan tim teknis. Setelah berhasil menemukan solusi dari akar permasalahannya, kemudian dilakukan konsultasi teknis dokumen awal di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada awal bulan Oktober 2017. Selain itu, diadakan pula konsultasi publik yang membahas tentang dokumen awal penyusunan RZWP3K Kalimantan Barat.

Guna melengkapi dokumen awal penyusunan RZWP3K tersebut sehingga dapat disajikan dengan berbagai informasi dan data yang lebih valid, beberapa perbaikan dan penguatan data pun dilakukan. Yayasan WWF Indonesia memberi masukan terkait perlindungan satwa perairan (penyu, lumba-lumba, dan *porpoise*), jalur migrasi satwa khususnya pesut, profil kawasan Paloh, alur pelayaran, peta pencadangan KKPD dan zonasinya, kajian biota spesies laut dilindungi, isu *bycatch*, ekosistem (mangrove, lamun, terumbu karang, pantai, estuaria), dan tiga

pilar konservasi (keberlanjutan, kedaulatan, dan kesejahteraan) untuk dituangkan dalam penyusunan tersebut.

Pada konsultasi publik selanjutnya yang berlangsung pada 6 Desember 2017, dilakukan pembahasan juga tentang KKP3K di empat lokasi perairan Kalimantan Barat. Penyesuaian luas kawasan konservasi berdasarkan analisa konflik pun dilakukan, dan dengan berbagai pertimbangan, total kawasan konservasi Paloh yang sebelumnya 744.636 hektar, dikerucutkan menjadi 504.933 hektar.

Proses selanjutnya adalah revisi dan konsultasi dokumen ke kementerian terkait. Setelahnya, dokumen kemudian diusulkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kalimantan Barat. Selama proses revisi, total luasan KKP3K itu bertambah seiring dengan adanya penambahan satu KKP3K dalam usulan akhir, yakni KKP3K Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara, sehingga total terdapat lima KKP3K dengan total luasan 645.428,24 hektar.



Gambar 11. Rincian luasan lima KKP3K di dokumen RZWP3K Kalimantan Barat.

Pada akhir Desember 2018, usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas dokumen RZWP3K masuk dalam Prolegda dan dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat.

Pengesahan RZWP3K sebagai Perda tidak mengalami hambatan yang cukup signifikan. Akhirnya, pada awal tahun 2019, Peraturan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RZWP3K Kalimantan Barat ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, SH, M. Hum.

### 3.1.2 PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI (RPZ) SEBAGAI SYARAT PENETAPAN KKP3K

Adanya Perda RZWP3K menimbulkan optimisme akan terealisasinya KKP3K di Kalimantan Barat. Paloh menjadi satu di antara lima KKP3K yang dialokasikan ke dalam ruang laut Kalimantan Barat (RZWP3K). Jika otoritas pengesahan RZWP3K ada di tangan Pemerintah Provinsi, pengesahan KKP3K berada di bawah wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Artinya, koordinasi dan konsultasi demi pengesahan Paloh dan kawasan lain sebagai KKP3K harus dilakukan ke pusat.

Syarat penting untuk mengajukan sebuah kawasan menjadi KKP3K adalah dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ). Jika RZWP3K hanya mengakomodir terjaminnya sebuah kawasan sebagai kawasan yang

dilindungi, maka di dalam RPZ, zona-zona peruntukan di dalam kawasan tersebut sudah harus disusun. Zona-zona tersebut antara lain zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya.

Analoginya dapat diibaratkan RZWP3K hanya menjamin peruntukan bagi sebuah lahan. Contohnya, jika lahan tersebut digunakan untuk menjadi kebun atau menjadi lokasi sebuah bangunan, namun tidak diatur di bagian mana dari lahan tersebut yang akan ditanami rambutan atau durian seandainya peruntukan lahan adalah sebagai sebuah kebun. Melalui RPZ, letak pohon rambutan dan durian di dalam sebuah kebun diatur dengan cermat.



©Yayasan WWF Indonesia/Hendro Susanto

*Kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi.*



©Yayasan WWF Indonesia/Agri Aditya Fisesa



©Yayasan WWF Indonesia/Agri Aditya Fisesa



© Yayasan WWF Indonesia/gri Aditya Fisesa

RZWP3K sendiri tidak menjadi syarat utama dari penyusunan RPZ. Di beberapa tempat, misalnya Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, RPZ disusun terlebih dahulu dan berhasil mengantarkan Kepulauan Derawan ditetapkan sebagai KKP3K sebelum RZWP3K menjadi Perda. Namun, sejak 2017, pemerintah mendorong agar RZWP3K disusun terlebih dahulu dengan tujuan agar tidak terjadi konflik antar provinsi jika kawasan yang dicadangkan meliputi wilayah dua atau lebih provinsi. Dengan demikian, ketika Paloh dan kawasan lain diajukan untuk menjadi KKP3K, penyusunan RPZ juga mengakomodir RZWP3K sebagai salah satu dokumen penunjang. Realisasinya menjadi lebih mudah dan sistematis.

Di dalam Peraturan Daerah Kalimantan Barat dengan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RZWP3K Kalimantan Barat, tercantum lima lokasi perairan yang dialokasikan menjadi KKP3K di Kalimantan Barat, yakni KKP3K Taman Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas, KKP3K Taman Pulau-Pulau Kecil Pulau Randayan di Kabupaten Bengkayang, KKP3K Taman Pesisir Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya, KKP3K Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara, serta KKP3K Taman Pulau-Pulau Kecil Kendawangan di Kabupaten Ketapang.

Di dalam rencana penyusunan RPZ serta pembentukan unit pengelola yang nantinya akan disertakan sebagai syarat penetapan KKP3K, DKP Kalimantan Barat selanjutnya melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Pertemuan multipihak ini diselenggarakan dengan tujuan agar terjadi kesepakatan bersama mengenai perumusan RPZ beserta hal-hal teknis terkait penyusunannya, sebelum kemudian RPZ diserahkan kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Salah satu koordinasi yang dilakukan adalah Pertemuan Kemitraan pada 26 Februari 2019 di Aula Rapat Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat Konvensi dan Jejaring Konservasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Muhammad Firdaus Agung Kunto Kurniawan. Dalam Pertemuan Kemitraan tersebut, Firdaus menjelaskan strategi-strategi pengelolaan konservasi. Salah satunya adalah penguatan kelembagaan dengan pengembangan mitra serta pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan.

## **SATU HAL PENTING YANG PERLU DIKETAHUI BERSAMA ADALAH TERBATASNYA SUMBER DAYA SEPERTI PENDANAAN, SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA. KETERBATASAN TERSEBUT DAPAT DISIASATI DENGAN MEMBENTUK KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH, KELOMPOK MASYARAKAT, MASYARAKAT ADAT, LSM, KORPORASI, LEMBAGA PENELITIAN MAUPUN PERGURUAN TINGGI.**

Pertemuan Kemitraan ini lalu ditindaklanjuti dengan penandatanganan Deklarasi Kelautan Kalimantan Barat oleh para mitra, yakni jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, jajaran kementerian, akademisi, dan LSM/NGO. Penandatanganan dilakukan di Aula DKP Kalimantan Barat. Total, terdapat 25 pihak yang hadir.

Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalbar; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Barat; Dinas Perhubungan Kalbar; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalbar; dan Biro Hukum Setda Kalbar.

Jajaran kementerian terdiri dari BPSPL Pontianak;

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat; Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak; serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan Kelas I Supadio Pontianak.

Sementara itu, pihak akademisi berasal dari beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Barat yang mempunyai fokus di bidang kelautan seperti Universitas Tanjungpura Pontianak dan Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Dari kategori LSM/kelompok dan organisasi masyarakat, hadir Konsorsium Mitra Bahari Kalimantan Barat; POSSI Kalbar; Orca Diving Club Pontianak; JARI Indonesia Borneo Barat; Jejak Pesisir Nusantara (JPN) Kalbar; Yayasan Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalbar; Yayasan Planet Indonesia (YPI) Kalbar; WeBe Adventure Ketapang; Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI); dan Yayasan WWF Indonesia.

Terdapat delapan poin yang tercantum di dalam Deklarasi Kelautan, yakni: (1) Perencanaan pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan; (2) Pemantauan, perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan; (3) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan Kawasan konservasi; (4) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan konservasi perairan; (5) Peningkatan pengawasan kawasan konservasi perairan; (6) Penelitian dan pengembangan data/informasi di kawasan konservasi perairan; (7) Pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat; (8) Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.





©Yayasan WWF Indonesia/Agri Aditya Fisesa



©Yayasan WWF Indonesia/Agri Aditya Fisesa

**Pertemuan jejaring kawasan konservasi perairan serta penandatanganan Deklarasi Kelautan Kalimantan Barat.**

Setelah terselenggaranya Pertemuan Kemitraan, berbagai koordinasi digelar bergantian oleh Yayasan WWF Indonesia, DKP Kalimantan Barat, serta BPSPL Pontianak dalam rangka membahas rencana penyusunan RPZ. Unit pengelola KKP3K yang menjadi syarat pengajuan RPZ pun turut dibentuk. Rancangan RPZ disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja), sehingga hal pertama yang dilakukan adalah pembentukan Pokja.

Pokja sendiri dipimpin langsung oleh DKP Kalimantan Barat. Agar Pokja mampu secara efektif mengemban

misi berat penyusunan RPZ, Yayasan WWF Indonesia berinisiatif melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi Miradi serta aplikasi Marxan sebagai media dalam penyusunan dokumen RPZ.

Aplikasi Miradi dan aplikasi Marxan merupakan piranti penting dalam kinerja penyusunan dokumen RPZ. Aplikasi Miradi bermanfaat untuk mendukung penyusunan rencana pengelolaan (non-spasial), sedangkan aplikasi Marxan diperuntukkan untuk mendukung rencana zonasi (spasial).

BPSPL Pontianak memfasilitasi kegiatan yang berlangsung pada 25 Februari hingga 1 Maret 2019 tersebut. Selain dihadiri oleh BPSPL Pontianak selaku penyelenggara dan Yayasan WWF Indonesia selaku inisiator, pelatihan juga diikuti oleh DKP Kalimantan Barat, tim konsultan RPZ serta akademisi yang terkait di bidang kelautan. Akademisi tersebut antara lain berasal dari Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Nahdlatul Ulama, dan Politeknik Negeri Pontianak.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, disebutkan bahwa penyusunan pengelolaan kawasan harus disesuaikan dengan kondisi kawasan yang bersangkutan. Untuk KKP3K Taman Pesisir Paloh, zonasi yang disusun berupa zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Kajian sumber daya yang ada di kawasan serta kesanggupan dari pengelola juga diakomodir di dalam dokumen.

Sedangkan kerja Pokja selanjutnya didukung oleh Surat Keputusan oleh Kepala DKP Kalimantan Barat Nomor 116 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat pada Mei 2019. Terpilih sebagai ketua Pokja adalah Kepala Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan, Ir. Dionisius Endy Vietsaman, MMP.

Surat Keputusan Pembentukan Pokja menjadi acuan para pihak melakukan berbagai upaya, bergerak bersama, serta melewati tahapan demi tahapan untuk finalisasi dokumen RPZ. Di sini, kolaborasi kemitraan begitu kental terasa. Hal tersebut nampak dalam menyalasi keterbatasan anggaran untuk penyusunan RPZ. DKP Kalimantan Barat hanya memiliki anggaran untuk penyusunan satu dokumen RPZ saja, yaitu KKP3K Paloh, sedangkan KKP3K lainnya belum terakomodir. Kemitraan kemudian mendorong adanya penganggaran di BPSPL Pontianak, yang diperuntukkan bagi penyusunan RPZ untuk KKP3K lainnya.

Pihak yang tergabung di dalam Pokja memberikan dukungan semaksimal mungkin berdasarkan tugasnya masing-masing. Yayasan WWF Indonesia ambil bagian dalam melakukan asistensi teknis dan pendampingan tim Pokja. Salah satu pembicaraan yang penting dalam asistensi tersebut adalah menggabungkan KKP3K Taman Pesisir Kubu Raya dengan KKP3K Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara yang menjadi satu.

Selain memberikan dukungan peningkatan kapasitas dalam analisis spasial dan non spasial, Yayasan WWF Indonesia juga memberikan pelatihan penulisan naskah akademik dan pendampingan analisis spasial yang dilakukan pada 9-13 September 2019. Kegiatan ini melibatkan tenaga ahli dan tim Pokja dengan studi kasus KKP3K Paloh.

Dalam semua tahapan yang dilalui, Yayasan WWF Indonesia selalu menghadirkan cerita pembelajaran, pengalaman dan ketrampilan dari proses sebelumnya yang pernah terjadi di tempat lain. Tim *Marine Protected Area* (MPA) memberikan dukungan teknis dan analisis untuk zonasi KKP3K Taman Pesisir Paloh dan memberikan rekomendasi pilihan skenario untuk zonasi yang didasarkan pada data ilmiah dan kondisi *existing*. Tim MPA juga secara aktif terlibat dalam memberikan dukungan teknis penyusunan dokumen RPZ pada kawasan tersebut.

Harapan untuk mewujudkan Kawasan Konservasi pun semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Penyusunan dokumen final RPZ lima Kawasan Konservasi Perairan di Kalimantan Barat akhirnya selesai dilaksanakan. Proses penyerahan dokumen dari tim Pokja ke DKP Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 16 dan 27 Desember 2019.

DKP Kalimantan Barat kemudian menempuh langkah selanjutnya, yaitu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selaku pimpinan tertinggi provinsi, Gubernur Kalimantan Barat pun melakukan perannya, yaitu bersurat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan pada 15 Januari 2020, yang isinya mengenai permohonan penetapan lima KKP3K di Kalimantan Barat.

Proses berlanjut, bola berpindah dari provinsi ke pusat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kemudian memulai proses evaluasi pada 20 April 2020. Melalui platform daring, KKP mengundang DKP Kalimantan Barat, BPSPL Pontianak dan Tim Pokja untuk mendiskusikan revisi dokumen RPZ. Terdapat revisi minor dalam KKP3K Paloh untuk luasan zonasi dan aturan zona yang perlu segera dieksekusi perbaikannya.

DKP Kalimantan Barat merespon dengan mengundang kembali tim Pokja untuk melakukan revisi. Pada 20 Mei 2020, platform daring kembali digunakan untuk proses diskusi. Salah satu rekomendasi utama adalah mengubah jenis kawasan. Selain itu, KKP3K Taman Pesisir Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya serta KKP3K Kubu Raya dan Kayong Utara yang sebelumnya menjadi satu usulan, dipisahkan kembali. Artinya, kembali pada gagasan semula, yakni lima KKP3K.

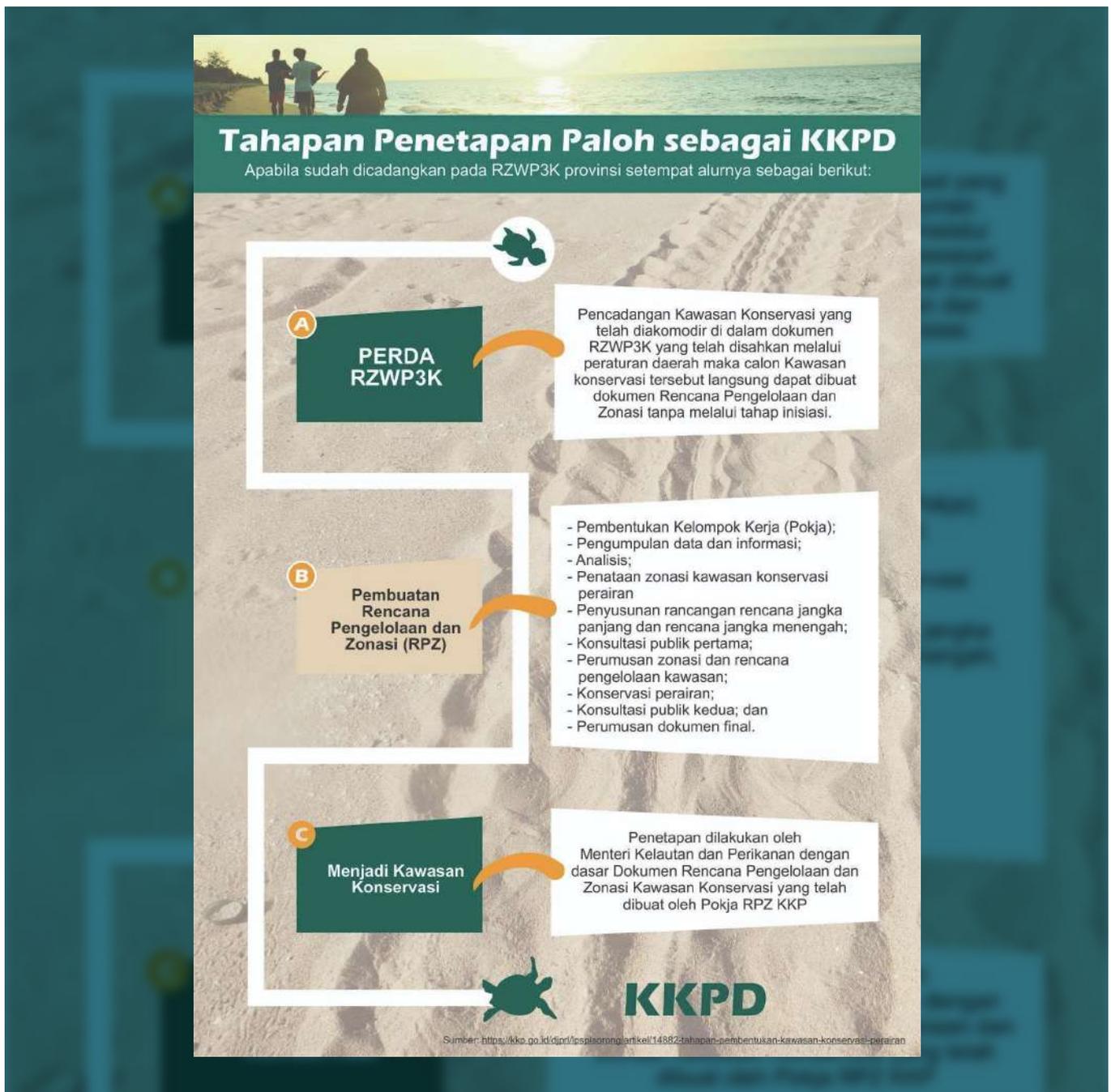
Mendekati tahap akhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Biro Hukum Organisasi (BHO) mengadakan Rapat Pembahasan Rancangan Kepmen Kawasan Konservasi Kalimantan Barat pada 9 Juli 2020. Hasilnya, peta zonasi KKP3K Taman Pesisir Paloh perlu direvisi kembali dengan menghilangkan sub-zona dan perubahan warna pada legenda. Hal itu ditujukan supaya format menjadi seragam dengan peta KKP3K lainnya. Penyesuaian peta pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Tim MPA melakukan tugasnya dengan sempurna. Sedangkan tim lapangan terus melakukan koordinasi secara intensif.

Mimpi besar itu pada akhirnya terwujud. Seolah masa-masa sulit dan tantangan-tantangan yang dilalui sejak pertama kali menginjakkan kaki di Paloh terbayar sudah. Selama 12 tahun perjalanan kerja kolaborasi tanpa henti DKP Kalimantan Barat, BPSPL Pontianak, Pemda Kabupaten Sambas, yang didukung Yayasan WWF Indonesia, masyarakat, dan pihak-pihak terkait akhirnya membuahkan hasil yang menggembarakan.

Pada 22 September 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo, mengesahkan penetapan KKP3K Paloh di Kalimantan Barat melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 93/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Paloh dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Kawasan Konservasi tersebut selanjutnya dikelola sebagai Taman Pesisir Paloh dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat. Mengingat Kawasan Konservasi ini dikelola oleh pemerintah provinsi, maka penyebutan secara umum bisa menggunakan istilah Kawasan Konservasi Daerah (KKD). Namun demikian juga bisa menyebutkan penamaan khususnya yaitu Taman Pesisir (TP) Paloh.

Penetapan KKD Paloh ini juga bersamaan dengan penetapan empat Kawasan konservasi lainnya di Kalimantan Barat meliputi KKP3K Taman Pulau Kecil (TPK) Randayan dan Perairan Sekitarnya; KKP3K Taman Pulau Kecil (TPK) Kendawangan dan Perairan Sekitarnya; KKP Taman Wisata Perairan (TWP) Kubu Raya dan Kayong Utara; serta KKP3K Taman Pesisir (TP) Kubu Raya dan Perairan Sekitarnya.



Gambar 12. Infografis tahapan kerja penetapan KKD Paloh dan keempat Kawasan Konservasi lainnya di Kalimantan Barat.

### 3.1.3. KOLABORASI KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN KKD PALOH

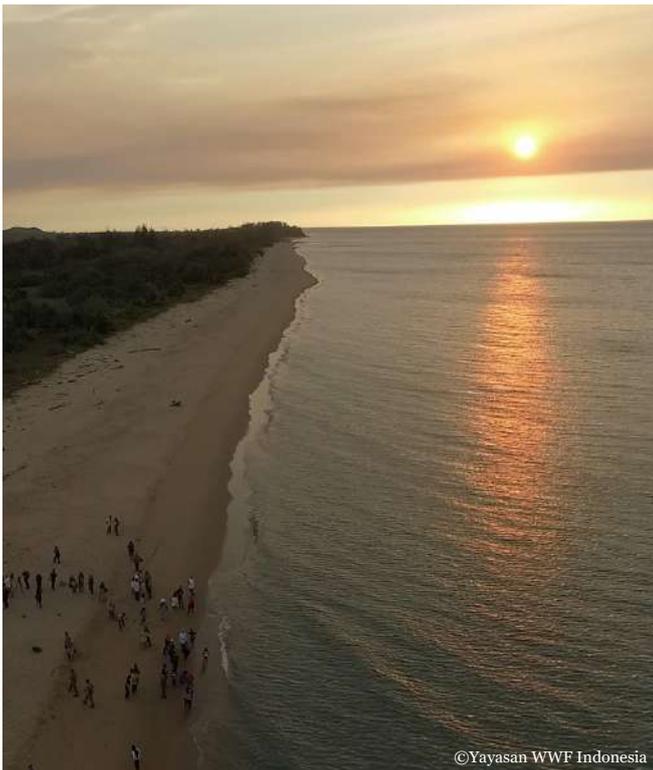
Paloh dan kawasan-kawasan lainnya menjadi KKP3K karena wewenang pengelolaannya berada di bawah kendali provinsi, atau dapat juga disebut sebagai Kawasan Konservasi Daerah (KKD). Sementara itu, jika kawasan konservasi dinaungi oleh pemerintah pusat, maka disebut dengan Kawasan Konservasi Nasional (KKN).

KKD Paloh memiliki luas keseluruhan 168.291,06 hektar dengan daratan seluas 422,69 hektar yang diperuntukkan menjadi area perlindungan peneluran penyu. Sedangkan luas perairannya 167.868,37 hektar.

Dari total luasan KKD Paloh, 9,83% atau 16.543,46 hektar ditetapkan sebagai zona inti, dengan target utamanya konservasi penyu. Selain itu, terdapat zona pemanfaatan terbatas seluas 151.682,12 hektar dan zona lainnya dengan luas 65,48 hektar.

Usai penetapannya, kawasan konservasi tersebut segera dikelola oleh para pihak. Mereka saling sepakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan KKD Paloh agar tujuan besar yakni melindungi ekosistem pantai Paloh dapat dicapai dengan lebih efisien. Harapannya, kawasan konservasi akan lebih terkelola sehingga juga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Yayasan WWF Indonesia sendiri turut memberikan dukungan kepada DKP Kalbar dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan KKD Paloh melalui skema kemitraan, yakni dengan membangun *multi stakeholder platform*.



©Yayasan WWF Indonesia

Sementara itu, DKP Kalimantan Barat sudah menyampaikan secara lisan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam rapat formal mengenai pengelolaan KKD yang ada di Kalimantan Barat. Pengelolaan akan ditangani langsung di bawah Bidang KP3KP DKP Kalimantan Barat. Untuk Paloh, agenda yang telah disepakati antara lain adalah penyusunan masterplan pengembangan wisata di KKD Paloh oleh mahasiswa magang dari arsitektur Politeknik Universitas Tanjungpura (UNTAN); memulai proses kerjasama antara DKP Kalbar, Pemerintah Desa Sebusubus, dan Pokmaswas Kambau Borneo; serta memulai penyusunan regulasi pendukung berupa peraturan desa tentang pengembangan desa wisata di Desa Sebusubus.

Pada 14 Desember 2020, DKP Kalimantan Barat mengundang Kepala Desa Sebusubus, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kambau Borneo, dan Yayasan WWF Indonesia untuk melakukan rapat koordinasi pengelolaan KKPD Paloh. Rapat tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor DKP Kalimantan Barat. Kegiatan juga dihadiri oleh mahasiswa yang sedang melakukan program magang dan dosen pembimbing dari jurusan arsitektur Politeknik Negeri Pontianak.

Seminggu sebelumnya, pada 8 Desember 2020, dilakukan pertemuan daring membahas koordinasi pengelolaan KKPD di Provinsi Kalimantan Barat yang difasilitasi oleh Bappeda Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut mengangkat tema “Program/Kegiatan Strategis dalam Pengelolaan KKPD”.

DKP Kalimantan Barat mengusung semangat kolaborasi dengan menggandeng semua pihak terkait untuk mewujudkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah di Kalimantan Barat. Acuanannya adalah Deklarasi Kelautan Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh 25 lembaga pada tanggal 27 Maret 2019.

Diskusi tersebut dipimpin oleh Ir. Dionisius Endy Vietsaman, MMP, selaku Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil DKP Kalimantan Barat. Dalam pengantarnya, Endy menyampaikan bahwa tujuan dari pengelolaan KKD adalah memberikan kesejahteraan setinggi-tingginya kepada masyarakat di sekitar kawasan. Dengan sumber daya yang terbatas, maka diperlukan pengelolaan yang bersifat kolaboratif. Kemitraan dapat menjadi jalan keluar demi mengakses pendanaan untuk mendukung efektivitas pengelolaan KKPD Paloh.

Salah satu peluang yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong kerjasama antara DKP Kalimantan Barat selaku *management authority*, Pokmaswas Kambau Borneo, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Desa Sebusub. DKP Kalimantan Barat berwenang memberikan legalitas kepada kelompok masyarakat untuk terlibat langsung di dalam pengelolaan, seperti misalnya dalam pengembangan wisata. Pemerintah Desa Sebusub, pada tahun 2021 ini, sedang dalam upaya menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang wisata. Dengan adanya Perdes, penarikan retribusi wisata akan menjadi sah sehingga dapat meningkatkan ekonomi kelompok dan masyarakat di sekitar KKD Paloh.

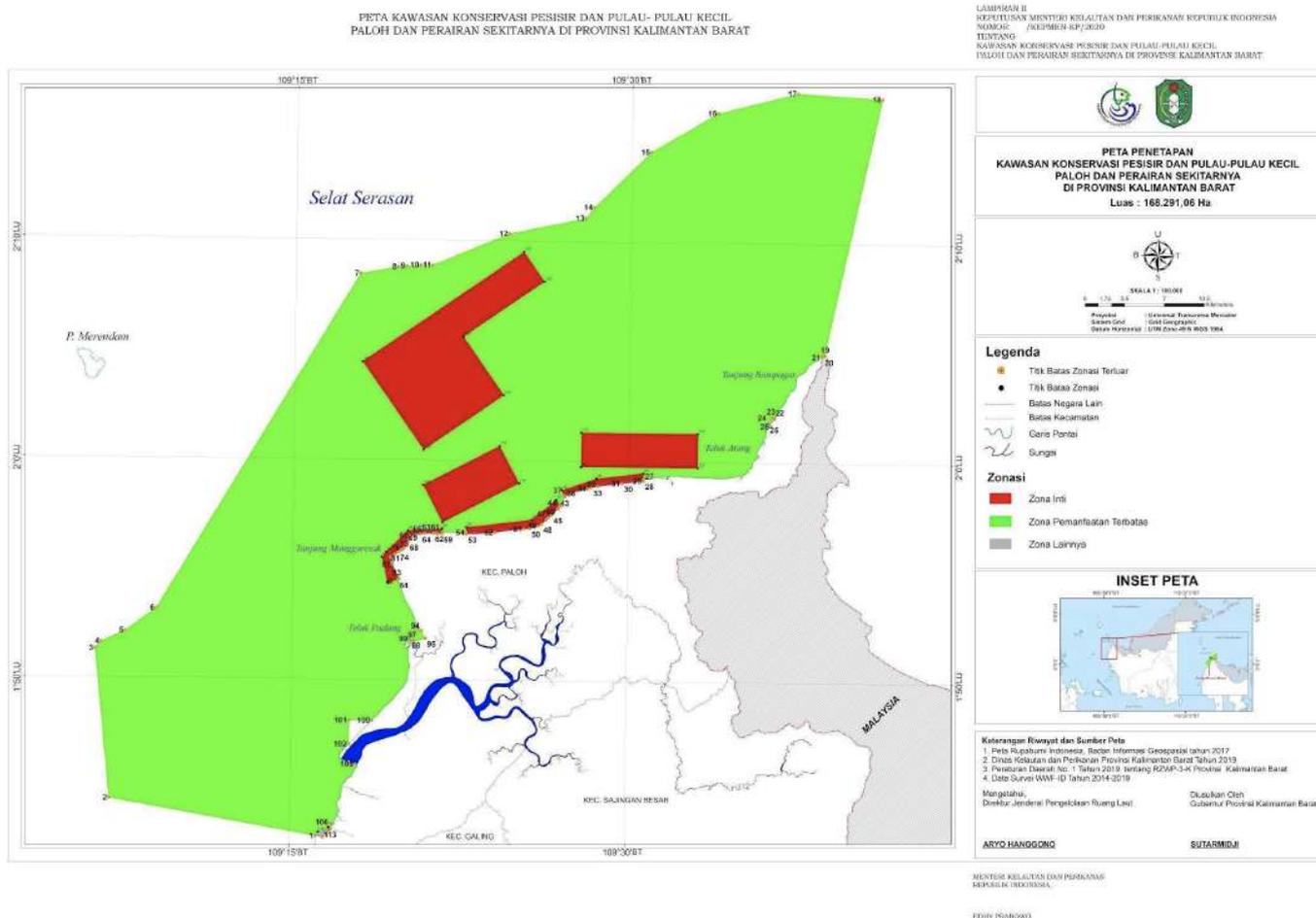
Selain tengah merancang Perdes tentang wisata, Pemdes Desa Sebusub sendiri juga sedang dalam proses pembentukan BUMDes Wisata. BUMDes dapat menjadi perpanjangan tangan Pemdes yang tujuannya untuk mengontrol dan mengembangkan kegiatan wisata di wilayah desa. Kegiatan wisata dipercaya merupakan opsi yang tepat, mengingat selain memiliki Penyus, Paloh juga memiliki aneka kearifan lokal maupun budaya.

DKP Kalimantan Barat sendiri menjadi salah satu pihak yang siap mendampingi Desa Sebusub, Kecamatan Paloh untuk mempersiapkan diri dalam pengembangan wisata. Beberapa gagasan seperti

penyediaan homestay yang memiliki standar ideal, telah diutarakan dalam acara “Program/Kegiatan Strategis dalam Pengelolaan KKD”. DKP Kalimantan Barat dan para pihak juga harus terlibat aktif dalam melakukan sosialisasi tentang KKD kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut penting dilakukan terutama agar terbentuk kesadaran mengenai tujuan dari sistem zonasi KKD.

Di dalam KKD sendiri terdapat zona inti yang sejatinya merupakan lokasi karang. Selama ini, zona itu menjadi lokasi favorit masyarakat untuk menangkap ikan. Dengan ditetapkannya Paloh sebagai KKD, maka siapapun tidak diperbolehkan menangkap ikan di zona inti tersebut. Oleh karenanya, akan ada potensi timbulnya polemik di masyarakat, terutama oleh para pihak yang menjadikan aktivitas menangkap ikan di zona inti sebagai tumpuan hidup. Dan untuk itu, perlu langkah antisipatif yang disiapkan sedini mungkin.

Selain itu, dari pihak masyarakat sendiri juga perlu memiliki kesadaran penuh tentang manfaat KKD, mendukung upaya konservasi, dan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat berkelanjutan dan berdampak luas. Perlu pemahaman yang dalam pula bahwa status KKD bukan bertujuan mematikan ruang gerak masyarakat, namun sebaliknya, memberi peluang yang lebih baik.



**Gambar 13. Peta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pesisir Paloh atau juga disebut Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Paloh.**

## 3.2 PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI ALTERNATIF

Pengembangan ekonomi alternatif menjadi salah satu kunci agar penetapan Paloh sebagai KKD dapat memberi nilai manfaat. Dua hal yang didorong untuk dikembangkan sementara ini adalah pengembangan budidaya madu kelulut dan wisata edukasi. Keduanya dipilih berdasarkan besarnya potensi yang mungkin dapat disegerakan dengan adanya KKD bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Pertimbangan lainnya, keduanya sebenarnya telah dilakukan oleh masyarakat. Sederhananya, pengembangan ekonomi alternatif sebenarnya telah menjadi sebuah kultur. Namun, karena selama ini belum adanya konsep manajerial dan regulasi yang tepat dan mumpuni, maka menjadi kurang berkembang.

Kekurangan itu yang kemudian mendorong DKP Kalimantan Barat, BPSPL Pontianak, Pemerintah Desa Sebusus, dan Yayasan WWF Indonesia untuk mencoba memperbaikinya dengan menyelenggarakan fasilitasi dan pendampingan.



©Yayasan WWF Indonesia/Muhammad Nouval Isnin Akbari

### 3.2.1 PENGEMBANGAN BUDIDAYA MADU KELULUT

Berdasarkan lembar fakta (*factsheet*) yang dilansir Yayasan WWF Indonesia pada 2017 disebutkan bahwa kelulut (*Heterotrigona itama*) adalah spesies lebah tak bersengat (*stingless bee*). Habitatnya dapat dijumpai di hutan dipterokarpa tropis dataran rendah. Di Kalimantan Barat, jenis umum yang dikenal adalah Kelulut Itama (*Heterotrigona itama*). Di kawasan Indo Malaya terdapat 35 spesies kelulut yang sudah ditemukan.

Kelulut mengambil resin untuk membuat sarang yang ditemukan pada jenis-jenis tumbuhan seperti pohon

meranti (keruing), karet, mangga, nangka, sukun, dan lain-lain. Dalam satu koloni, terdapat ratu (penghasil telur), betina (pencari makanan/madu, nektar, polen, resin), *drone* (pejantan), pekerja (membuat sarang). Ratu kelulut hanya hidup selama tiga tahun. Masa produktif ratu kelulut hanya dua tahun (kawin dan bertelur). Sisa satu tahun merupakan masa pemilihan ratu baru. Terdapat telur yang lebih besar ukurannya bila dibandingkan dengan telur lain. Jumlahnya sekitar 5-6 butir. Telur-telur besar inilah yang merupakan bakal calon ratu baru.



©Yayasan WWF Indonesia/Udiyansyah



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosa

Hasil produksi dari lebah kelulut dimulai dari yang memiliki nilai paling tinggi adalah propolis, *bee pollen/bee bread*, dan madu. Empat hal dasar utama dalam budidaya lebah kelulut adalah resin (getah) 60%, nektar (madu/sari bunga) 15%, polen (serbuk sari) 15%, dan air 10%.

Proses pemanenan madu dan peralatan yang digunakan.

Bagi warga Paloh, budidaya kelulut ini menggiurkan. Tidak rumit melakukannya, menyenangkan, juga menghasilkan. Bagaimana tidak, jika produktivitas madu pada periode panen (Maret-November) rata-rata 400 mililiter per bulan per log<sup>6</sup> (batang kayu yang digunakan sebagai sarang lebah), maka diperkirakan potensi produksi madu kelulut di Kecamatan Paloh adalah 7-9 ton dalam setahun.

Hasil studi awal pada Desember 2016 di delapan desa di Kecamatan Paloh terdapat sedikitnya 82 pembudidaya *Trigona itama* dengan jumlah total sarang sebanyak 2.627 log. Dari jumlah tersebut, 85% merupakan pembudidaya pemula dengan masa budi daya di bawah satu tahun. Yayasan WWF Indonesia kemudian mengajak 30 orang warga Paloh sebagai pembudidaya pemula. Mereka didampingi dalam hal peningkatan kapasitas, khususnya teknik budidaya kelulut. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan mutu pengolahan dan kemasan madu lebah kelulut melalui metode berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Jumlah pembudidaya meningkat dari tahun ke tahun sejak pembudidayaannya digaungkan. Hingga 2019, telah ada 91 pembudidaya madu kelulut di Paloh dengan peningkatan kapasitas budi daya 42%. Survei yang dilakukan para bulan Maret 2019 terhadap 29 pembudidaya dampingan menunjukkan bahwa selama tahun 2018, produksi madu kelulut Paloh yang berhasil dipasarkan mencapai 4 ton dan turut memberikan penghasilan tambahan Rp 2.140.000 ke setiap pembudidaya per bulannya.

Target pasar yang disasar tak hanya area Kecamatan Paloh dan sekitarnya, namun juga daerah yang lebih jauh seperti Kota Sambas, Singkawang, Pontianak, Jakarta, hingga Sematan (Malaysia). Potensi pengembangan pasar cukup terbuka karena para pembudidaya dipersilakan memanfaatkan jaringan Yayasan WWF Indonesia dan fasilitator yang lain. Meski peluang pengembangan pasar terbuka lebar, pemasaran madu sementara ini masih terbatas dari mulut ke mulut. Sebagian produk diikutkan ke dalam kegiatan pameran. Sementara beberapa pembudidaya berinisiatif mempromosikannya melalui media sosial.



---

<sup>6</sup>Fadhilah, Rizky & Rizkika, Kiki. *Laba Lebah Tanpa Sengat*. (Jakarta: Trubus Swadaya, 2015)



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosa

***Kemasan akhir madu kelulut yang diproduksi oleh Tim Monitoring Penyuluh Paloh.***

Selain peningkatan kapasitas, para pembudidaya madu kelulut juga didorong untuk memenuhi beberapa persyaratan regulasi untuk sebuah produk yang sah. Misalnya, nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Setempat, label halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan juga didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jika persyaratan tersebut terpenuhi, peluang untuk memperluas pasar, seperti merambah ke pasar ritel, sangat mungkin dilakukan.

Oleh sebab itu, Yayasan WWF Indonesia juga memfasilitasi pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Kemasan Produk kepada kelompok dampungannya yang menjadi salah satu syarat untuk pengajuan nomor sertifikat PIRT. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada 22-23 Maret 2019 di Kecamatan Paloh dan diikuti oleh anggota Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh serta beberapa masyarakat yang mempunyai produk usaha.

Pada pelatihan yang dilakukan selama dua hari ini, peserta diberikan materi berupa Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pangan; Keamanan Pangan; Teknologi Proses Pengolahan Pangan; *Hygiene* (Kebersihan) dan Sanitasi Pengolahan Pangan; Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga; Bahan Tambahan Pangan; Label dan Iklan Pangan; serta Kemasan Produk.



**ADA TUJUAN TERSIRAT DI PELATIHAN TERKAIT MADU INI, YAITU AGAR PENGEMBANGAN MADU KELULUT SEBAGAI PENGHASILAN ALTERNATIF WARGA DAPAT MENEKAN LAJU PERBURUAN TELUR PENYU. NELAYAN TIDAK PERLU KHAWATIR LANTARAN TAK BISA MELAUT DI MUSIM BADAI. SEBAB, MASIH ADA PENGHASILAN LAIN, YAKNI DARI MADU KELULUT, YANG BISA DILAKUKAN TANPA HARUS BERBURU TELUR PENYU.**



©Yayasan WWF Indonesia/Zulkifli HZ

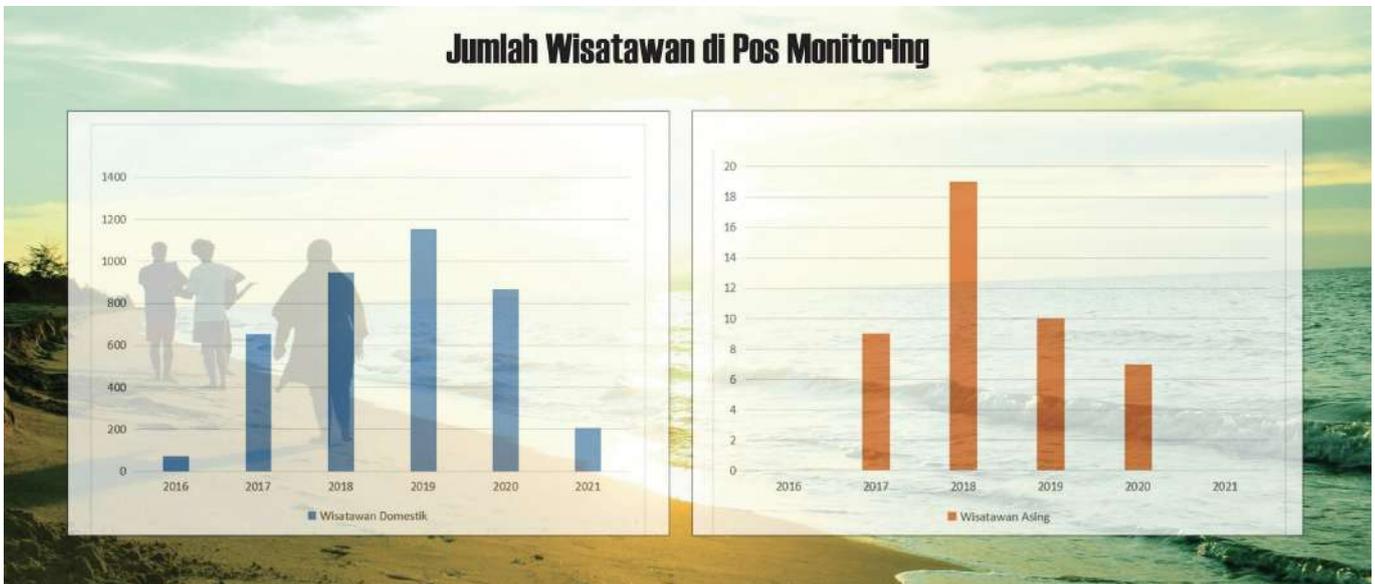
**Para peserta pelatihan budi daya dan pengembangan potensi madu kelulut Paloh.**

### 3.2.2 PENGEMBANGAN WISATA EDUKASI

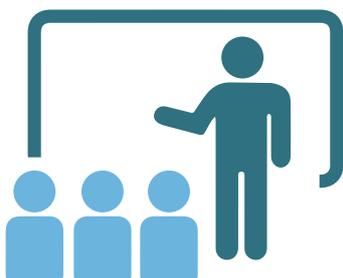


Sejak Pos Monitoring Penyu Paloh dibangun, tidak sedikit orang yang datang berkunjung. Mereka yang datang, umumnya memiliki motivasi baik. Ada yang hanya bermaksud melihat penyu secara langsung. Ada juga yang datang dengan agenda terlibat di dalam kegiatan konservasi, seperti penanaman mangrove dan bersih-bersih pantai.

Kunjungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2016, jumlah wisatawan yang terdata adalah 74 orang. Pada 2017, terdata sejumlah 663 orang wisatawan dengan 9 wisatawan mancanegara/wisman. Pada 2018, sejumlah 947 wisatawan datang, dengan 19 wisatawan wisman. Puncaknya, pada tahun 2019, wisatawan yang berkunjung adalah 1.153 orang dengan 10 wisman.



Gambar 14. Infografis jumlah kunjungan wisatawan di Pos Monitoring Penyu Sungai Belacan Paloh dari 2016-Mei 2021.



**KEPADA WISATAWAN, TIM MONITORING PENYU PALOH SELALU MEMBERI EDUKASI BERKAITAN DENGAN PENYU DAN HABITATNYA. TIM JUGA MENDAMPINGI WISATAWAN YANG INGIN MELIHAT PENYU SECARA LANGSUNG DEMI KENYAMANAN DAN KEAMANAN MEREKA.**

Tata cara melihat satwa diterapkan dengan sungguh-sungguh ketika kunjungan berlangsung. Misalnya, tidak boleh menyalakan senter, *blitz* kamera, atau *handphone* ketika bertemu dengan penyu yang sedang naik, tidak boleh menunggang penyu, tidak boleh memindahkan penyu dari jalurnya, tidak boleh membuang sampah ke pantai atau laut, dan lain sebagainya.

**PANDUAN MENGAMATI DAN BERINTERAKSI DENGAN PENYU**

Proses peneluran penyu terjadi melalui beberapa tahap, dimulai dari **munculnya induk dari permukaan laut, telur dikeluarkan, hingga lubang sarang ditutup**. Ada beberapa tahap dimana induk penyu menjadi sangat sensitif dan jika merasa terganggu akan membatalkan proses peneluran sepenuhnya.

**Jangan mengganggu tempat peneluran penyu.**  
 Juga jangan meninggalkan benda-benda yang bisa menghalangi penyu naik ke pantai untuk bertelur.

**Jangan menyorot lampu ke arah kepala penyu.**  
 Penyu sangat sensitif terhadap suara dan cahaya. Apabila merasa terganggu, penyu dapat membatalkan proses peneluran.

**Jangan mengganggu proses peneluran.**  
 Apabila ingin mengambil gambar harus dari arah belakang tubuh/kepala dengan intensitas cahaya sedang.

**Menjauh saat penyu menutupi lubangnya.**

**Hindari kontak fisik dengan penyu atau telurnya.**  
 Kontak fisik hanya diperbolehkan dalam hal aktivitas penelitian satwa seperti pengukuran tubuh dan pemasangan tag.

**Jangan menghalangi penyu yang akan naik ke darat atau menuju balik ke laut.**  
 Proses pengamatan penyu yang naik ke darat untuk bertelur, dilakukan dari arah belakang agar tidak menghalangi perjalanannya kembali ke laut.

**Proaktif dalam menjaga kawasan peneluran penyu dari sampah dan kerusakan lainnya.**  
 Penyu selalu kembali ke tempat ia menetas. Bila kawasan tersebut rusak, kemungkinan penyu tidak akan kembali.

Wisatawan yang ingin menginap dapat menggunakan area di sekitar pos Tim Monitoring Penyu Paloh. Kebutuhan kuliner juga disediakan jika sudah ada permintaan sebelumnya dari wisatawan. Bahkan, terdapat kemajuan cukup signifikan dalam hal akses telekomunikasi. Pada 2021, sinyal internet sudah tersedia di pos monitoring. Maka tidak jarang, warga sekitar atau pendatang, berkunjung ke pos hanya untuk mengakses internet.



Gambar 15. Panduan mengamati dan berinteraksi dengan Penyu.



©Yayasan WWF Indonesia/Zulkifli HZ

**Selain sebagai lokasi peneluran penyu, pantai Paloh yang landai juga merupakan lokasi favorit masyarakat Paloh dan sekitarnya untuk berwisata.**



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosa

**Panorama perbukitan tidak jauh dari pantai peneluran penyu Paloh.**



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosa



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosa



©Yayasan WWF Indonesia/Zulkifli HZ

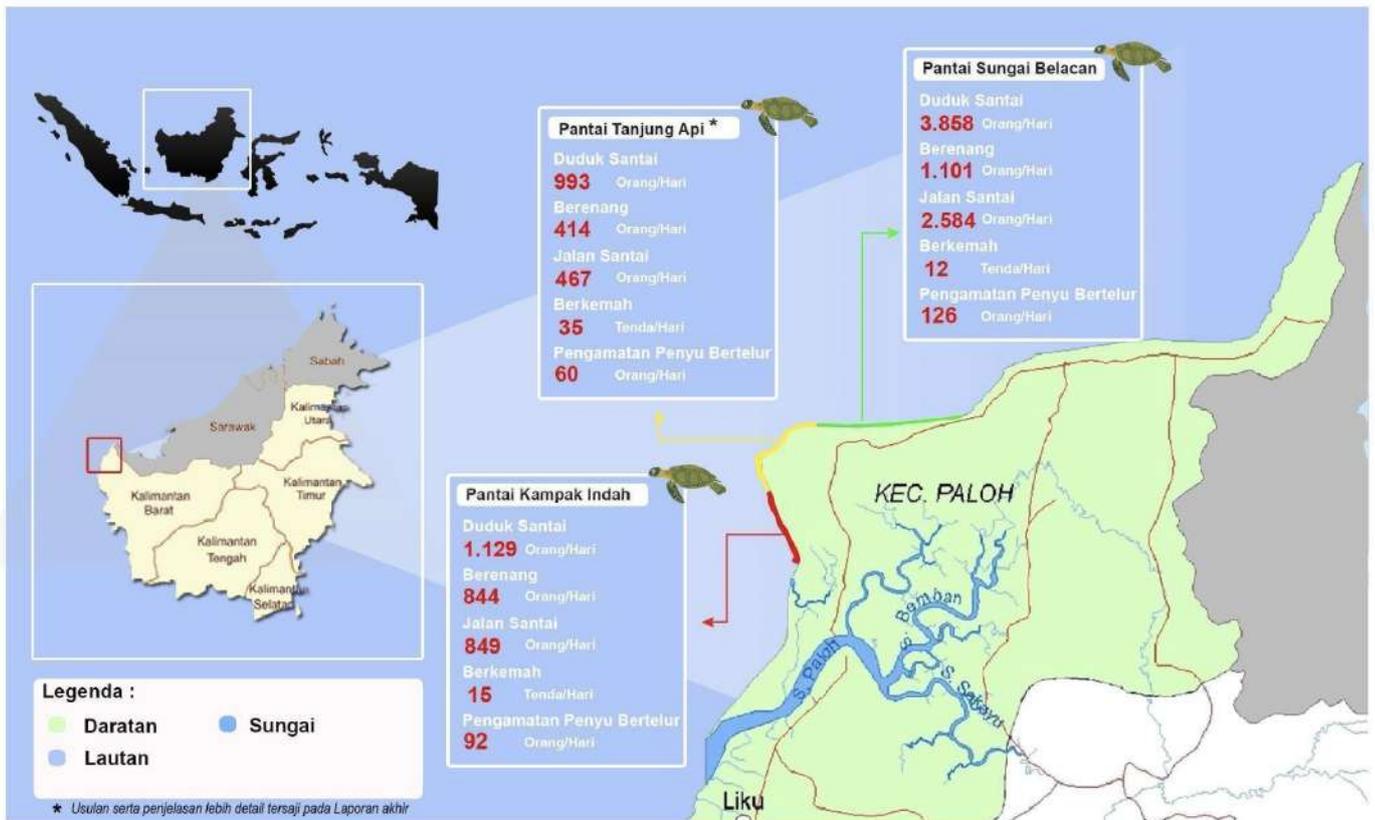
*Lokasi perkemahan yang berada di area Pos Monitoring Penyu Sungai Belacan Paloh.*

Sementara ini, di tahun 2021, belum ada standar tarif harga masuk ke area peneluran penyu, menginap, maupun untuk biaya jasa guide. Wisatawan dipersilakan menentukan sendiri besar-kecil nominal yang diberikan kepada Tim Monitoring Penyu Paloh. Alasan utama belum adanya ketetapan harga adalah karena belum adanya peraturan, setidaknya di tingkat desa, yang mengayomi kegiatan wisata. Penentuan harga yang tidak didasarkan pada standar pun terkadang menimbulkan kekhawatiran akan terjadi penarikan harga tinggi kepada pengunjung.

Kepala desa dan aparat Desa Sebusus, termasuk Badan Pembangunan Desa (BPD) tidak abai tentang potensi wisata di wilayah mereka. Peraturan desa mengenai wisata sedang digarap dan diupayakan untuk dapat disahkan pada tahun 2022. Untuk mendukungnya, Yayasan WWF Indonesia bekerja sama dengan tim tenaga ahli dari Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Tanjungpura, melaksanakan kajian daya dukung wisata bahari (21-31 Mei 2021) di pantai peneluran penyu Paloh. Kajian tersebut, antara lain meliputi tingkat keamanan bagi pengunjung maupun satwa, harga tiket ideal, fasilitas yang telah ada dan yang harus ada, dan kesiapan masyarakat desa menerima wisatawan.



## DAYA DUKUNG EFEKTIF KEGIATAN WISATA DI KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAMAN PESISIR PALOH



Gambar 16. Infografis hasil kajian daya dukung efektif kegiatan wisata di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Taman Pesisir Paloh.

Hasil dari kajian yang berupa data dan rekomendasi, diberikan kepada pemerintah desa untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan Perdes. Rekomendasi tersebut meliputi estimasi standar jumlah pengunjung, nominal tiket masuk, dan teknis pengelolaan. Menurut pengakuan Kepala Desa Sebusus, Irpan Riadi, SE, Sy., M.Pd (wawancara tanggal 28 Mei 2021), dalam sejarah pemerintahan Desa Sebusus, Perdes tentang wisata akan menjadi Perdes kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sebusus. Selama ini, Pemerintah Desa Sebusus hanya mengesahkan Perdes-Perdes administratif.

Sebagai turunan dari Perdes, akan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berwenang mengakomodir pengelolaan wisata. Adanya BUMDes tidak dimaksudkan untuk menjadi pesaing pelaku

wisata, melainkan menjadi alat Pemerintah Desa Sebusus untuk mengontrol kegiatan wisata yang dilakukan kelompok-kelompok. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Di dalam PP tersebut, disebutkan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa sebesar-besarnya.

BUMDes nantinya akan menjadi badan yang mewadahi aktivitas wisata yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Selain Tim Monitoring Penyu Paloh, terdapat beberapa kelompok yang siap menjalankan kegiatan wisata, yakni Pokmaswas Kambau Borneo, Pokmas Wahana Bahari Paloh, dan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Cermai Kampak Indah. Mereka dapat dianggap menjadi pihak yang menerima manfaat secara langsung dengan legalitas wisata lewat Perdes. Jika kemudian terdapat pihak luar yang ingin berinvestasi di sektor wisata, BUMDes juga memiliki

wewenang untuk menarik pajak dari investasi tersebut demi kepentingan desa.

Manfaat adanya kegiatan wisata edukasi diharapkan dapat bersifat menyeluruh, meliputi berbagai sektor, dan tidak semata-mata hanya memberi benefit pada pihak/kelompok pelaku wisata saja. Dengan demikian, KKD tidak akan mematikan ruang gerak masyarakat, melainkan justru menjadi pemantik masa depan yang lebih baik, serta dapat terbukti dan terimplementasi dengan sendirinya.



©Yayasan WWF Indonesia/Victor Fidelis Sentosa



©Yayasan WWF Indonesia/Zulkifli HZ

*Juhardi (atas) dan Zulfian (bawah) dari Tim Monitoring Penyu Paloh memberi informasi terkait penyu kepada para wisatawan.*



**SEKTOR-SEKTOR LAIN DAPAT TURUT MENDAPATKAN MANFAAT DARI ADANYA LEGALITAS WISATA. PELAKU USAHA DI BIDANG KULINER, TRANSPORTASI, DOKUMENTASI, DAN LAIN-LAIN, DAPAT IKUT MEMETIK MANFAAT KETIKA PERDES TENTANG WISATA TEREALISASI. KEMAJUAN WISATA PUN TIDAK DIPUNGKIRI MEMERLUKAN DUKUNGAN DARI BANYAK SEKTOR USAHA.**



©Yayasan WWF Indonesia /Victor Fidelis Sentosa



©Yayasan WWF Indonesia /Juhardi

*Para pengunjung yang didampingi oleh anggota Tim Monitoring Penyu Paloh menyaksikan langsung kegiatan penyu bertelur.*

# **BAB IV: DEDIKASI DI TINGKAT TAPAK**



# 4.1 MASYARAKAT SEBAGAI PILAR KONSERVASI

“Penetapan pantai peneluran Paloh sebagai KKD tidak terlepas dari dukungan warga Paloh selama bertahun-tahun. Tanpa dukungan di tingkat tapak, cita-cita konservasi barangkali hanya berpendar pada tataran ideologis, tak akan terwujud secara realistis.”

Saat tim Yayasan WWF Indonesia melakukan kajian dan sosialisasi di tahun-tahun awal, ada beberapa orang warga yang menjadi bagian dari tim Yayasan WWF Indonesia. Mereka turut memberikan sumbangsih terhadap kegiatan pemantauan penyu dan pantai peneluran penyu Paloh, serta membantu dalam upaya penyadartahuan masyarakat.

Yayasan WWF Indonesia menyadari bahwa dukungan masyarakat bersifat mutlak. Dengan kata lain,

masyarakat adalah tuan rumah yang bertemu,berhubungan, serta berkaitan erat secara langsung dengan laut dan pantai peneluran Penyu. Sehingga, hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat akan memiliki dampak bagi laut dan pantai peneluran. Begitu pula sebaliknya. Apa yang terjadi pada laut dan pantai peneluran, akan turut berpengaruh pada masyarakat.



*Diskusi antara Yayasan WWF Indonesia, Pokmaswas Kambau Borneo, Pokmas Wahana Bahari Paloh, dan Tim Monitoring Penyu Paloh dalam rangka mematangkan rencana wisata edukasi di Paloh.*

Dalam perjalanan konservasi penyu Paloh, mulai dari masa-masa masyarakat belum mengetahui apapun tentang konservasi hingga kemudian pantai peneluran ditetapkan sebagai KKP3K Taman Pesisir Paloh, ada dua kelompok masyarakat yang memiliki peran penting. Kelompok tersebut adalah Pokmaswas Kambau Borneo dan Pokmas Wahana Bahari Paloh. Keterlibatan mereka, khususnya dalam kolaborasi kinerja di dalam Tim Monitoring Penyu Paloh, sangat berpengaruh dalam kegiatan konservasi penyu.

Kelompok-kelompok tersebut selanjutnya didukung juga oleh kelompok masyarakat yang lain, salah satunya adalah Pokdarwis Pantai Cermi Kampak Indah. Walau Pokdarwis Pantai Cermi Kampak Indah menekankan aktivitas mereka di sektor wisata, dalam praktiknya kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan penyu juga mereka lakukan. Mereka menjadi pilar-pilar penopang konservasi di tingkat tapak, membuat dukungan masyarakat umum terhadap konservasi semakin meluas.

Seringkali, mereka diuji dengan datangnya berbagai persoalan, baik dari luar maupun dari dalam. Satu di antara persoalan-persoalan yang mereka hadapi adalah masih terjadinya perburuan telur penyu. Pemantauan pantai bukanlah hal yang mudah. Luas wilayah yang harus diawasi tidak sebanding dengan jumlah pengawas. Banyak sekali jalan belakang yang memudahkan para pemburu untuk beraksi. Bahkan, tempat relokasi penyu (*hatchery*) yang berada di pos Tim Monitoring Penyu Paloh pernah didatangi pemburu.

Masalah menjadi lebih pelik karena terdapat oknum masyarakat yang mengaku sebagai bagian dari kelompok namun menjalankan aksi perburuan telur. Hal ini membuat citra kelompok menjadi buruk di mata masyarakat. Semakin buruk citra kelompok ketika terkuak ada anggota kelompok yang memang melakukan tindakan perburuan dan perdagangan telur penyu secara diam-diam. Meski begitu, anggota kelompok yang berada di jalur yang benar tetap terus berjuang.

Berbagai solusi diupayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kampanye mengenai pelestarian lingkungan dan perlindungan penyu tidak henti-hentinya digaungkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Oknum-oknum yang berada di tubuh kelompok pengawas diproses secara hukum untuk memberikan efek jera. Oknum-oknum tersebut juga dikeluarkan dari kelompok.



©Yayasan WWF Indonesia/Zulfian



©Yayasan WWF Indonesia/Juhardi



©Yayasan WWF Indonesia/Juhardi

**Aktivitas pendataan yang dilakukan oleh Tim Monitoring Penyu Paloh.**

Kontribusi Pokmaswas Kambau Borneo, Tim Monitoring Penyu Paloh, dan Pokmas Wahana Bahari Paloh beberapa kali membuahkan apresiasi dari pemerintah maupun pihak lain dalam melakukan upaya konservasi pantai peneluran penyu Paloh. Pokmaswas Kambau Borneo sempat memenangkan Juara 1 Pokmaswas se-Kalimantan Barat pada 2012 dalam ajang Penghargaan Adibakti Mina Bahari di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP). Pada 2013, mereka terpilih menjadi Juara 2 dalam ajang yang sama.

Salah satu bentuk apresiasi yang didapatkan adalah bantuan pembangunan pos pengawasan pantai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Bantuan tersebut diserahkan kepada Pokmaswas Kambau Borneo di tahun 2016. Pos Pokmaswas Kambau Borneo itu kini berdiri di Tanjung Api, salah satu titik lokasi pantai peneluran penyu. Selain itu, anggota Pokmaswas Kambau Borneo dan Pokmas Wahana Bahari Paloh yang tergabung di dalam Tim Monitoring Penyu Paloh, sejak 2017, mendapatkan apresiasi langsung dari BPSPL Pontianak dan Yayasan WWF Indonesia. Apresiasi tersebut berbentuk bantuan honor dan perangkat perlengkapan monitoring seperti *headlamp*, *handphone*, dan baju.

Tantangan terbesar kelompok-kelompok masyarakat yang dihadapi saat ini adalah cara menjadi mandiri secara finansial. Untuk itulah, demi menyongsong cita-cita kemandirian di masa depan, inovasi-inovasi ekonomi alternatif dikembangkan. Budidaya madu kelulut telah dikembangkan dan saat ini masyarakat sedang berusaha memproduksi lebih banyak serta menjangkau pasar yang lebih luas. Sektor wisata juga sedang diupayakan legalitasnya oleh pemerintah desa agar masyarakat nantinya berhak menarik retribusi dari kegiatan wisata.

Tim Monitoring Penyu Paloh mencoba inovasi lain. Selain budidaya madu kelulut dan aktivitas wisata, mereka berupaya membudidayakan kambing. Inisiatif ini berawal dari tahun 2016. Sebagian kecil dana restorasi yang menjadi hak personal, dialihkan dengan pembelian tiga kambing dewasa dan dengan sistem kepemilikan personal, bukan kelompok. Keputusan tersebut disetujui oleh setiap orang.

Dari tiga kambing pertama, pada tahun 2021 telah berkembang menjadi lebih dari enam puluh ekor kambing. Sebuah keputusan baru kemudian diambil. Pihak luar dapat menyumbangkan kambing untuk dijadikan aset kegiatan konservasi. Kambing yang disumbangkan akan ditenakkan oleh Tim Monitoring Penyu Paloh. Saat anak kambing yang disumbangkan berkembang biak, anak-anaknya akan dijual begitu memasuki umur layak jual. Hasil penjualannya, dibagi dua. Setengah akan masuk ke kas Tim Monitoring Penyu Paloh. Sedangkan setengah lainnya akan menjadi hak personal anggota (atau dapat dikategorikan sebagai honor).

Sistem donasi kambing ini merupakan inisiatif anggota tim monitoring dalam usaha untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Kambing hasil donasi diperlakukan sebagai aset yang akan menjadi bahan bakar secara berkelanjutan dalam mencukupi operasional kegiatan Tim Monitoring Penyu Paloh.





Tim Monitoring Penyus Paloh menargetkan tidak lagi bergantung pada donasi pada 2023 mendatang. Hal tersebut tidak berarti menutup pintu kerja sama, namun agar tidak menjadikan donasi sebagai satu-satunya sumber pemasukan, sehingga dengan ada atau tidaknya donasi, kegiatan konservasi dapat terus dilakukan.

*Peternakan kambing yang dimiliki oleh Tim Monitoring Penyus Paloh.*

## 4.2 INDIVIDU-INDIVIDU INSPIRATIF

Dari ketiga kelompok, terdapat individu-individu yang layak dijadikan inspirasi konservasi. “Local champion” adalah istilah yang kerap disematkan kepada mereka. Tanpa bermaksud mengerdilkan peran individu yang lain, individu-individu ini memiliki komitmen dan dedikasi yang besar dalam mengupayakan konservasi di tingkat masyarakat.

Jika kelompok-kelompok adalah pilar-pilar konservasi di tingkat masyarakat, maka individu-individu ini adalah penyusun pilar yang saling berkaitan satu sama lain, menguatkan, membentuk satu kesatuan, yang akhirnya membuat pilar tersebut kokoh berdiri sebagaimana mestinya.

Latar belakang mereka pun beragam. Ada yang masa lalunya merupakan pemain utama dalam perburuan dan perdagangan penyu. Ada yang merupakan seorang kepala geng dan memiliki “kekuasaan” hampir di seluruh kawasan kecamatan. Ketika bergabung dalam aktivitas konservasi, bukan hanya paradigma terkait penyu yang berubah, namun juga perjalanan dan pandangan hidup. Mereka adalah:



**Juhardi.** Sejak tahun 2011, Juhardi (41) menjadi bagian dari Pokmaswas Kambau Borneo. Menjaga penyu dan pantai peneluran penyu Paloh dapat dianggap bagian dari kehidupan Juhardi kini. Sebelum menjadi penjaga, ia adalah seorang pemburu telur. Profesi sebagai pemburu telur merupakan profesi utama yang dilakoninya sejak 1997, jauh sebelum ada kegiatan konservasi di Paloh.

Tahun 2005 hingga 2009 dapat dianggap sebagai masa keemasan bagi pria kelahiran tahun 1979 tersebut. Ia orang kepercayaan pihak yang memiliki izin penangkaran namun justru menjadikan penangkaran tersebut sebagai tempat memasok telur ke pasar. Juhardi bekerja sebagai pengumpul telur dan distributor kepada para pemesan. Dari aktivitas penjualan ini, Juhardi mendapat untung yang tidak sedikit. Rumah yang ditempatinya sekarang merupakan hasil dari pekerjaan memburu telur.

Pada 2009 saat kegiatan konservasi mulai digalakkan di pesisir pantai Paloh, Juhardi masih giat mengambil telur penyu. Jika kedatangan mengambil telur oleh aktivis konservasi, Juhardi akan berkilah bahwa telur-telur itu akan dibawa untuk direlokasi. Kenyataannya, telur yang diambilnya tidak pernah masuk ke tempat relokasi, apalagi menetas menjadi tukik. Ia selalu menjualnya.



Saat Pokmaswas Kambau Borneo terbentuk tahun 2011, Juhardi turut bergabung. Motivasi utamanya bukan hendak ikut serta mengamankan telur dari penjarahan, namun mencari tempat baru yang bisa ditumpangi demi mengambil telur. Tempat relokasi atau tempat Juhardi bekerja sebelumnya telah gulung tikar. Dalam wawancara dengan tim penulis buku ini (Juni 2021), Juhardi berkisah bahwa ia sering berkata pada siapapun yang masih ragu terhadap pentingnya konservasi, “Kalau mau benci, seharusnya aku yang lebih dulu benci,” tuturnya dalam bahasa Melayu Sambas.

Tuturan itu didasari pada pengalamannya sendiri bahwa Juhardi pernah mengandalkan hidupnya pada penjualan telur penyu. Mata pencaharian utamanya tersebut hilang sepenuhnya ketika aktivitas konservasi berjalan. Namun, alih-alih membenci, kegiatan menjaga pantai selama di Pokmaswas Kambau Borneo justru memutar balik pemikiran Juhardi



“Lama-lama (bergelut di dunia konservasi), saya justru menjadi sayang dengan penyu,” ujarnya. Juhardi melihat sendiri para aktivis konservasi yang bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan perlindungan, bukan sedang berkamufase untuk mencari keuntungan. Maka, ketika Tim Monitoring Penyu Paloh terbentuk dan Juhardi ditawarkan untuk bergabung, ia tidak berpikir panjang untuk mengiyakan.



**DEDIKASI JUHARDI TERHADAP PERLINDUNGAN PENYU SANGAT TINGGI DAN TEGAS. SEKALI BERKATA TIDAK UNTUK TINDAKAN PENGAMBILAN TELUR PENYU, MAKA IA AKAN TERUS MEMPERJUANGKANNYA. PERNAH SEKALI WAKTU, JUHARDI BERTEMU DENGAN PENCURI TELUR YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM.**

Ia menghadapinya dengan tangan kosong. Pencuri tersebut lantas memilih untuk lari ke arah laut dan Juhardi menunggu hingga pencuri tersebut lelah dan keluar sendiri dari laut. Juhardi masih aktif hingga kini sebagai anggota Pokmaswas Kambau Borneo dan tergabung di dalam Tim Monitoring Penyu Paloh. Ia pekerja yang ulet dan telaten. Dukungan keluarga juga ia dapatkan. Keluarganya menganggap kegiatan konservasi merupakan hal baik dan membanggakan. Dukungan keluarga dan prinsip yang kuat, menjadikan Juhardi dapat bekerja dengan tenang dan gembira. Komitmen dan dedikasinya terhadap konservasi penyu dapat berjalan sepenuhnya.



**Zulfian.** Keterlibatan Zulfian (28 tahun) dalam kegiatan konservasi penyu diawali saat magang di Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangalaki, Berau, Kalimantan Timur. Tidak lama setelah lulus kuliah dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura dan menyandang gelar sarjana pada 2015, Zul, begitu ia kerap disapa, menjadi volunteer Yayasan WWF Indonesia untuk kawasan perairan Paloh.

Semasa menjadi volunteer Yayasan WWF Indonesia, Zulfian pernah membantu program pemasangan dan pendataan LED di kapal para nelayan sebagai upaya pengurangan tingkat tangkapan samping di Paloh. Ia menjalani aktivitas tersebut hampir selama empat tahun. Dirinya lebih sering berada di laut ketimbang di darat selama program berlangsung. Dari pengalamannya itu dia lalu memutuskan untuk terjun secara penuh dalam kegiatan konservasi Paloh usai kuliah.



Ketika pada 2019, Tim Monitoring Penyu Paloh membutuhkan anggota baru untuk menggantikan anggota yang mengundurkan diri, Zul lantas ditawarkan untuk bergabung. Ia setuju tanpa berpikir dua kali. Zul memiliki dedikasi serta kemauan yang kuat, dua hal yang sangat dibutuhkan untuk menjadi anggota tim.

**POS MONITORING SUDAH SEPERTI RUMAH PERTAMA BAGINYA. IA BAHKAN LEBIH SERING BERADA DI POS KETIMBANG RUMAHNYA SENDIRI.**

Zul memiliki peran penting mengingat dirinya satu di antara sedikit orang di jajaran warga penggiat konservasi yang mampu menggunakan perangkat-perangkat teknologi terkini, seperti komputer dan gawai. Berbagai hal administratif kerap menjadi tanggung jawab Zul. Berkat adanya Zul, pengarsipan data Tim Monitoring Penyu Paloh dapat tersusun dengan baik.

Zul juga merupakan anggota aktif dari Pokmas Wahana Bahari Paloh sejak 2017. Di awal tahun 2021, dia terpilih menjadi ketua pokmas tersebut. Program kerja yang diusungnya adalah penyelarasan konservasi penyu dengan aktivitas wisata. Dia berharap dengan adanya penyelarasan tersebut, penyu tetap lestari dan anggota kelompok dapat merasakan manfaat ekonominya secara langsung melalui kegiatan mengelola wisata di kawasan pantai Sungai Belacan.



**Hermanto.** Hermanto yang juga sering disapa Pak Tam (45), dapat dianggap sebagai salah satu simbol perjuangan konservasi yang lahir dari masyarakat Paloh, sekaligus simbol peralihan yang kontradiktif. Sebelum menjadi pegiat konservasi, kegiatan yang dilakoninya sering bertolak belakang dari nilai-nilai konservasi, agama, dan undang-undang negara.

Pria kelahiran 1975 tersebut pernah giat menjadi pedagang, namun bukan pedagang biasa. Barang-barang yang dijajakannya tergolong barang ilegal. Bukan sekadar pedagang barang ilegal biasa, ia juga pernah menjadi salah satu sosok yang memegang kendali roda perekonomian dari kegiatan perjudian, dan minuman keras. Pak Tam dapat dianggap sebagai salah satu puncak dari piramida premanisme lokal. Kaki tangannya tersebar tidak hanya di Kecamatan Paloh, namun hampir di sepanjang kawasan pesisir pantai utara Kalimantan Barat.

Tahun 2005, Kabupaten Sambas mencabut izin konsesi pantai peneluran penyu Paloh yang sebelumnya dipegang oleh pihak swasta. Meski demikian, pihak swasta tersebut ternyata mengelabui masyarakat dengan menyebarkan kebohongan bahwa mereka masih merupakan pengelola yang sah. Saat kebohongan tersebut terungkap pada 2009, pantai peneluran penyu Paloh menjadi lahan perebutan, terutama bagi para preman lokal. Salah satunya adalah Pak Tam.



Di tahun yang sama, Pak Tam menyambut tawaran tim Yayasan WWF Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan pengkajian penyu dan pantai Paloh. Awalnya dia berpartisipasi dengan kegiatan WWF hanya untuk mencari tahu, apakah nantinya bisa tetap menguasai pantai dan berjualan telur penyu. Namun dalam perjalanan, dia melihat sendiri apa yang dilakukan tim WWF adalah totalitas melindungi. Perlahan akhirnya dia menemukan sendiri kesadaran dan kecintaan

terhadap penyu, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui bagaimana seharusnya penyu itu diperlakukan. Namun, motivasi utamanya kala itu adalah mendapat “kendaraan baru” dan “memperluas relasi” untuk menguasai pantai. Ia pun mendapatkan penghasilan dari hasil kegiatan konservasi penyu yang cukup untuk sehari-hari, dan meninggalkan masa lalu gelapnya.

**DI MASA INI TERJADI TITIK BALIK DALAM KEHIDUPAN PAK TAM. PENGETAHUANNYA TENTANG KONSERVASI DAN PERLINDUNGAN PENYU BERTAMBAH. KESADARANNYA UNTUK MELINDUNGI PENYU MAUPUN HABITATNYA TUMBUH DENGAN SENDIRINYA. LAMBAT LAUN, HAL INI MERAMBAH PADA SISI KEHIDUPANNYA YANG LAIN.**

Pak Tam menjadi salah satu masyarakat yang bergabung dengan Pokmaswas Kambau Borneo pada 2011. Sejak saat itu, ia aktif mengawasi pantai peneluran penyu dari ancaman perburuan telur. Semakin aktif dirinya ketika bergabung dengan Tim Monitoring Penyu Paloh pada tahun 2016. Bahkan, Pak Tam membangun rumah di samping pos Tim Monitoring Penyu Paloh di Sungai Belacan dengan tujuan agar dapat mencurahkan diri secara total dalam melestarikan penyu dan alam. Anak dan istrinya diboyong tinggal di sana.

Di luar kegiatan monitoring rutin, Pak Tam ulet dan giat membersihkan pantai dari sampah-sampah plastik di sepanjang pantai, sampah laut yang terdampar di bibir pantai, maupun sampah yang ditinggalkan para pengunjung yang kurang peduli lingkungan. Semua sampah itu dikumpulkannya di tempat penampungan sampah yang lokasinya tidak jauh dari pos.



©Yayasan WWF Indonesia/Zulfian

Pak Tam adalah personal yang tidak pilih-pilih dalam menggertak para pihak yang kedapatan hendak mencuri telur. Ia tidak peduli dan tak pandang bulu terhadap orang di hadapannya, meski berstatus sosial tinggi atau memiliki jabatan. Atas sikapnya itu, ia beberapa kali terlibat argumentasi yang tidak ramah. Namun, ia tidak pernah bertindak kasar. Cara persuasif selalu menjadi pilihannya.

“Melindungi penyu itu tidak sama dengan beternak ayam atau kambing. Totalitas sangat dibutuhkan. Kalau tidak total, rusak alam kita,” ujar Pak Tam.

Saat ini, Pak Tam tidak lagi aktif menjadi anggota Tim Monitoring Penyu Sungai Belacan. Karena alasan keluarga, ia terpaksa meninggalkan aktivitas

konservasi. Keputusan tersebut diambil dengan berat hati. Berbagai kekhawatiran muncul tentang nasib pantai dan penyu. Bukan berarti ia tidak percaya dengan anggota Tim Monitoring yang masih aktif, namun karena perjuangan melindungi penyu dan alam telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dirinya.

Meski telah undur diri, Pak Tam tetap berusaha turut ambil bagian. Ia tetap memantau budidaya madu kelulut dan kambing yang tengah dilakukan oleh Tim Monitoring. Selain itu, Pak Tam juga aktif mengedukasi masyarakat yang hidup di pusat keramaian kecamatan tentang pentingnya konservasi kawasan pantai dan perlindungan penyu.



**Andi Priansyah.** Andi Priansyah (38) merupakan bagian dari Tim Monitoring Penyu Paloh pada tahun 2016-2018. Selama menjadi bagian dari tim, pria kelahiran tahun 1982 tersebut lebih sering menghabiskan waktunya di pos monitoring ketimbang di kampung. Ia merasa lebih senang untuk berada di pos karena lebih banyak aktivitas yang dapat dilakukan dibanding berdiam diri di kampung.

Peran Andi dalam pendataan penyu dan monitoring tidak dapat dianggap sepele. Selama aktif, ia giat melakukan monitoring setiap hari meski hari sedang hujan. “(Karena hujan), jejak menjadi samar dan risiko saat penelusuran pantai menjadi lebih tinggi. (Tapi) saya tetap melakukannya,” cerita Andi.

Saat memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan keluarga, Andi merasa bahwa ia seperti sedang pergi dari rumah. Sekarang ia tengah mengembangkan budidaya udang sambil turut mengampanyekan perlindungan penyu dan konservasi alam kepada masyarakat sekitar. Tetapi Andi tidak serta merta lepas kontribusi begitu saja. Ia tetap menjaga pantai dengan menjadi anggota aktif dari Pokmaswas Kambau Borneo dan turut mengembangkan budidaya madu kelulut dengan menjadi bagian dari Pokmas Wahana Bahari Paloh.





©Yayasan WWF Indonesia/Agri Aditya Fisesa

**Yanto Aldiano Anong.** Anong (34) telah terlibat dalam kegiatan pemantauan dan kajian di tahun-tahun awal saat tim Yayasan WWF Indonesia datang ke Paloh. Sebelum mengenal konservasi, Anong memiliki lahan perburuan telur dan ia termasuk salah satu pemasok telur ke pasar.

Keterlibatannya di tim Yayasan WWF Indonesia berawal dari rasa penasarannya dengan kegiatan konservasi. Dia juga tertarik dengan penampilan tim Yayasan WWF Indonesia yang dianggapnya modern dan *stylist*. “Keren sekali sepertinya. Tim Yayasan WWF Indonesia sering menenteng tas ransel, kamera, dan juga membawa *handphone*. Waktu itu, benda seperti itu masih jarang dan mewah,” cerita pria yang pernah bekerja di Malaysia tersebut dalam bahasa Melayu Sambas.



©Yayasan WWF Indonesia/Redi Mahardika

Tahun 2011, kedekatan secara personal antara Anong dengan beberapa anggota tim Yayasan WWF Indonesia membuatnya ditawari untuk bergabung. Tanpa berpikir panjang, Anong setuju. Dia pun lalu kerap menjadi pendamping tim Yayasan WWF Indonesia di saat mengambil data di pantai peneluran penyu Paloh. Lambat laun, dia dipercaya secara mandiri melakukan kegiatan pengambilan data.

Selama satu tahun berada di tim Yayasan WWF Indonesia, kesadaran untuk melindungi telur penyu tumbuh dengan utuh. Jika kebetulan bertemu dengan orang-orang yang tengah berbincang tentang mengambil atau berdagang telur penyu, Anong sering merasa kesal. Sering muncul hasrat dalam dirinya untuk menegur walau niat tersebut hanya disampaikan bila yang dihadapinya sudah dikenalnya cukup akrab.

Tidak sedikit pula masyarakat yang bertanya pada Anong mengenai penyu. Topik tentang penyu akhirnya selalu menjadi materi pembicaraan masyarakat ketika berjumpa dengan Anong.



*Masyarakat Paloh memprotes pemenjaraan Anong sekaligus memberikan dukungan moral kepadanya.*

Tahun 2016, Anong mengundurkan diri dari aktivitas konservasi karena alasan pribadi. Namun, ia tetap sering membantu tim Yayasan WWF Indonesia maupun Tim Monitoring Penyu Paloh jika ada kegiatan-kegiatan tertentu yang memerlukan tambahan tenaga. Anong selalu senang dan bermanfaat jika dirinya bisa berbuat sesuatu bagi konservasi penyu dan pantai peneluran penyu Paloh.

Selain Juhardi, Zulfian, Hermanto, Andi Priyansyah, Yanto Aldiano Anong, ada pula sosok-sosok lain yang perannya tidak dapat dianggap kecil dalam mendukung konservasi penyu Paloh.

Di antaranya adalah Mulyadi dan Heriyanto, selaku tim monitoring pertama. Dedikasi, kontribusi, dan peran mereka, telah teruji selama rentang waktu perjalanan konservasi penyu Paloh.



*Heriyanto (atas) dan Mulyadi (bawah).*

**MEREKA PANTAS UNTUK DIAPRESIASI DAN DICONTOH, SEBAB TELAH MELAKUKAN PERBUATAN BAIK, YAITU MENJAGA PANTAI DAN PENYU, YANG SEJALAN DAN SESUAI DENGAN AJARAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NEGARA.**

Islam, agama mayoritas masyarakat Paloh, mengajarkan bahwa menjaga alam adalah amanat Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan umat manusia. Seiring dengan itu, negara juga sudah menjamin bahwa perlindungan satwa dan kegiatan konservasi merupakan pengejawantahan dari undang-undang. Tidak ada alasan yang bisa dijadikan tameng untuk mencegah tindakan-tindakan baik itu berkembang.

**BAB V:  
LINI MASA  
KONSERVASI  
PENYU DI PALOH  
DAN DEDIKASI  
MULTIPIHAK**



© Yayasan WWF Indonesia / Victor Fidelis Sentosa

“Sejak awal perjalanan konservasi penyu di Paloh, peran para pihak tidak dapat dipandang sebelah mata. Peran sekecil apapun turut memberikan andil besar dalam pencapaian target konservasi. Dukungan tersebut datang dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, lembaga swasta, akademisi, kelompok masyarakat, komunitas, serta aparat penegak hukum.”

Dalam kegiatan Lokakarya Multipihak Dalam Rangka Pengelolaan Habitat Peneluran Penyu di Kecamatan Paloh yang menjadi rintisan program konservasi penyu di Paloh pada April 2009, Bupati Sambas, Ir. H. Burhanuddin AR, berharap agar kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sambas, masyarakat, dan Yayasan WWF Indonesia selaku yayasan yang bergerak di bidang konservasi, dapat terjalin dengan baik dalam upaya penyelamatan penyu di pesisir Paloh.

Salah satu arah kebijakan dalam bidang kelautan dan perikanan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas adalah peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan sebagai upaya mendukung perekonomian masyarakat, sekaligus dengan tanpa menggerus kelestarian sumber daya perikanan yang ada. Salah satu strategi penting untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendorong pantai peneluran penyu Paloh di Kabupaten Sambas menjadi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Kemudian, istilah KKLD menjadi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), hingga kemudian menjadi hanya Kawasan Konservasi Daerah (KKD).

Sebagai langkah awal, Yayasan WWF Indonesia melakukan kegiatan kajian berupa monitoring dan pendataan di sepanjang pesisir pantai Paloh untuk mengetahui jumlah populasi dan ancaman terhadap penyu Paloh serta habitatnya. Kegiatan ini dilakukan setiap hari sepanjang tahun. Dalam perjalanannya, BPSPL Pontianak turut menjadi mitra utama yang berkontribusi dalam pendanaan kegiatan monitoring dan pembangunan hatchery pada 2016. Sosialisasi telah dilakukan secara terus menerus. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang masih melakukan aktivitas perburuan. Tokoh-tokoh masyarakat setempat diajak untuk terlibat menyuarakan pesan konservasi. Aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Polair, PSDKP, SPORC, serta Satuan Pengamanan Perbatasan turut membantu dalam program patroli bersama pengawasan pantai peneluran penyu Paloh.

Satu di antara capaian utama dalam program konservasi Paloh adalah adanya keterlibatan

masyarakat, ditandai oleh terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kambau Borneo. Kelompok ini diprakarsai oleh masyarakat Paloh yang turut prihatin terhadap maraknya perdagangan ilegal telur penyu dan semakin sedikitnya penyu-penyu yang naik ke pantai Paloh. Keterlibatan masyarakat ini juga didukung oleh para penegak hukum dan instansi terkait, seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, BPSPL Pontianak, DKP Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sambas, serta Kepolisian.

Pada tahun 2016, berdiri Kelompok Masyarakat (Pokmas) Wahana Bahari Paloh yang bergerak di bidang konservasi sumber daya alam pesisir, budidaya madu kelulut serta wisata edukasi. Kelompok tersebut kemudian menjadi mitra dampingan Yayasan WWF Indonesia. Dengan bertambahnya kelompok masyarakat yang turut andil dalam konservasi penyu, pelestarian di tingkat tapak pun menjadi semakin kuat.

Adanya kelompok-kelompok masyarakat dan dukungan pemerintah membuat jalan perlindungan penyu dan habitat penelurannya menjadi lebih mudah. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan skema multipihak. Misalnya, penyelenggaraan Festival Pesisir Paloh (FESPA). Festival yang diselenggarakan sejak 2012 ini telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali. Pada 2017, pelaksanaannya diambil alih dan diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Terdapat sekitar lima puluh pihak yang terlibat langsung demi suksesnya acara tersebut.

Dalam penyusunan RZWP3K maupun RPZ, kerjasama multipihak semakin dibutuhkan. Koordinasi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi, dilakukan lebih intens untuk menyatukan pendapat yang sinergi. Sebagian hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa magang, lembaga pendidikan, dan akademisi juga menjadi bagian yang sangat penting dalam menunjang materi dokumen RZWP3K maupun RPZ. Lembaga pendidikan yang pernah mengirimkan mahasiswa untuk magang, antara lain adalah Universitas Tanjungpura Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, dan Universitas Diponegoro Semarang.



Nyaris mustahil bagi Paloh untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi jika hanya ada satu atau dua pihak saja yang berkeinginan kuat. Namun, hasilnya, dokumen RZWP3K akhirnya disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Barat berkat kegigihan berbagai pihak untuk berjuang. Seiring dengan hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengesahkan Paloh sebagai KKP3K atau KKPD.

**DENGAN DEMIKIAN, SETIAP AGENDA MAUPUN CAPAIAN YANG BERLANGSUNG DAN TERJADI BUKAN HANYA HASIL KERJA SATU PIHAK SAJA, MELAINKAN BERBAGAI PIHAK. PENGELOLAAN KONSERVASI MUSTAHIL TERLAKSANA JIKA TIDAK DISERTAI DENGAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MITRA SERTA PEMBENTUKAN JEJARING YANG KUAT.**

Kerja multipihak, sebagai satu kesatuan utuh, adalah hal yang mutlak diperlukan agar efektivitas pengelolaan kawasan dan konservasi dapat tercapai. Di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, hal tersebut telah dibuktikan dan secara keseluruhan berhasil dengan hasil yang sangat gemilang.

No	Komponen	Aktivitas	Mereka yang Terlibat
1	Kajian Data	Monitoring dan Pengawasan Pantai Peneluran Penyu, Kajian Pendukung Penetapan dan Pengelolaan KKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokmaswas Kambau Borneo</li> <li>• Pokmas Wahana Bahari</li> <li>• Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak</li> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar</li> <li>• Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak</li> <li>• Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat</li> <li>• Pemerintah Kabupaten Sambas</li> <li>• Politeknik Negeri Pontianak</li> <li>• Universitas Tanjungpura Pontianak</li> <li>• Universitas Muhammadiyah Pontianak</li> <li>• Institut Pertanian Bogor</li> <li>• Universitas Diponegoro</li> <li>• Sekolah Tinggi Perikanan</li> <li>• Universitas Udayana</li> <li>• Universitas Gadjah Mada</li> <li>• Yayasan WWF Indonesia</li> </ul>
2	Kajian Penanggulangan Tangkapan Samping (bycatch)	Kajian, Pendataan dan praktik penggunaan lampu LED, Pendampingan Teknis Kepatuhan (Compliance) Penerapan BMP Penanganan Bycatch Penyu di Atas Kapal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar</li> <li>• Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak</li> <li>• Pemerintah Kabupaten Sambas</li> <li>• Politeknik Negeri Pontianak</li> <li>• Nelayan Paloh</li> <li>• NOAA</li> <li>• Yayasan WWF Indonesia</li> </ul>
3	Penyusunan Dokumen dalam Rangka Penetapan Perda dan KKPD	Penyusunan RZFW3K dan RPZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar</li> <li>• Badan Perencanaan Pembangunan (Bappada) Daerah Kalbar</li> <li>• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalbar</li> <li>• Dinas Perhubungan Kalbar</li> <li>• Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalbar</li> <li>• Biro Hukum Selda Kalbar</li> <li>• Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak</li> <li>• Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat</li> <li>• Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak</li> <li>• Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan Kelas I Supadio Pontianak</li> <li>• Pemerintah Kabupaten Sambas</li> <li>• Universitas Tanjungpura Pontianak</li> <li>• Universitas Muhammadiyah Pontianak</li> <li>• Politeknik Negeri Pontianak</li> <li>• Konsorsium Mitra Bahari Kalimantan Barat</li> <li>• POSSI Kalbar</li> <li>• Orca Diving Club Pontianak</li> <li>• JARI Indonesia Borneo Barat</li> <li>• Jejak Pesisir Nusantara (JPN) Kalbar</li> <li>• Yayasan Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalbar</li> <li>• Yayasan Planet Indonesia (YPI)</li> <li>• WeBe Adventure Ketapang</li> <li>• Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI)</li> <li>• Yayasan WWF Indonesia</li> </ul>
4	Pengembangan Wisata	Pengembangan Budidaya Madu Kelulut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemdes Sebusub</li> <li>• Pokmas Wahana Bahari Paloh</li> <li>• Pokmaswas Kambau Borneo</li> <li>• Niranur Agro Farm Sematan, Sarawak, Malaysia</li> <li>• Yayasan WWF Indonesia</li> </ul>
		Pengembangan Wisata Edukasi Penyu Paloh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar</li> <li>• Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak</li> <li>• Pemerintah Kabupaten Sambas</li> <li>• Pemdes Sebusub</li> <li>• Pokmaswas Kambau Borneo</li> <li>• Pokmas Wahana Bahari Paloh</li> <li>• Pokdarwis Pantai Cermat Kampak Indah</li> <li>• Universitas Tanjungpura</li> <li>• Politeknik Negeri Pontianak</li> <li>• Yayasan WWF Indonesia</li> </ul>
5	Diseminasi Informasi dan Penyadartahuan Masyarakat	Journalist Field Trip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AJI Pontianak</li> <li>• Yayasan WWF Indonesia</li> </ul>
		PandaCLICK!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokmaswas Kambau Borneo</li> <li>• Pelajar di Paloh</li> <li>• Yayasan WWF Indonesia</li> </ul>

Gambar 17. Tabel matriks keterlibatan multipihak dalam kegiatan konservasi penyu Paloh.



Matrix  
Keterlibatan Multipihak  
dalam Kegiatan  
Festival Pesisir Paloh (FESPA)

61 Lembaga terlibat  
dalam 7 Tahun

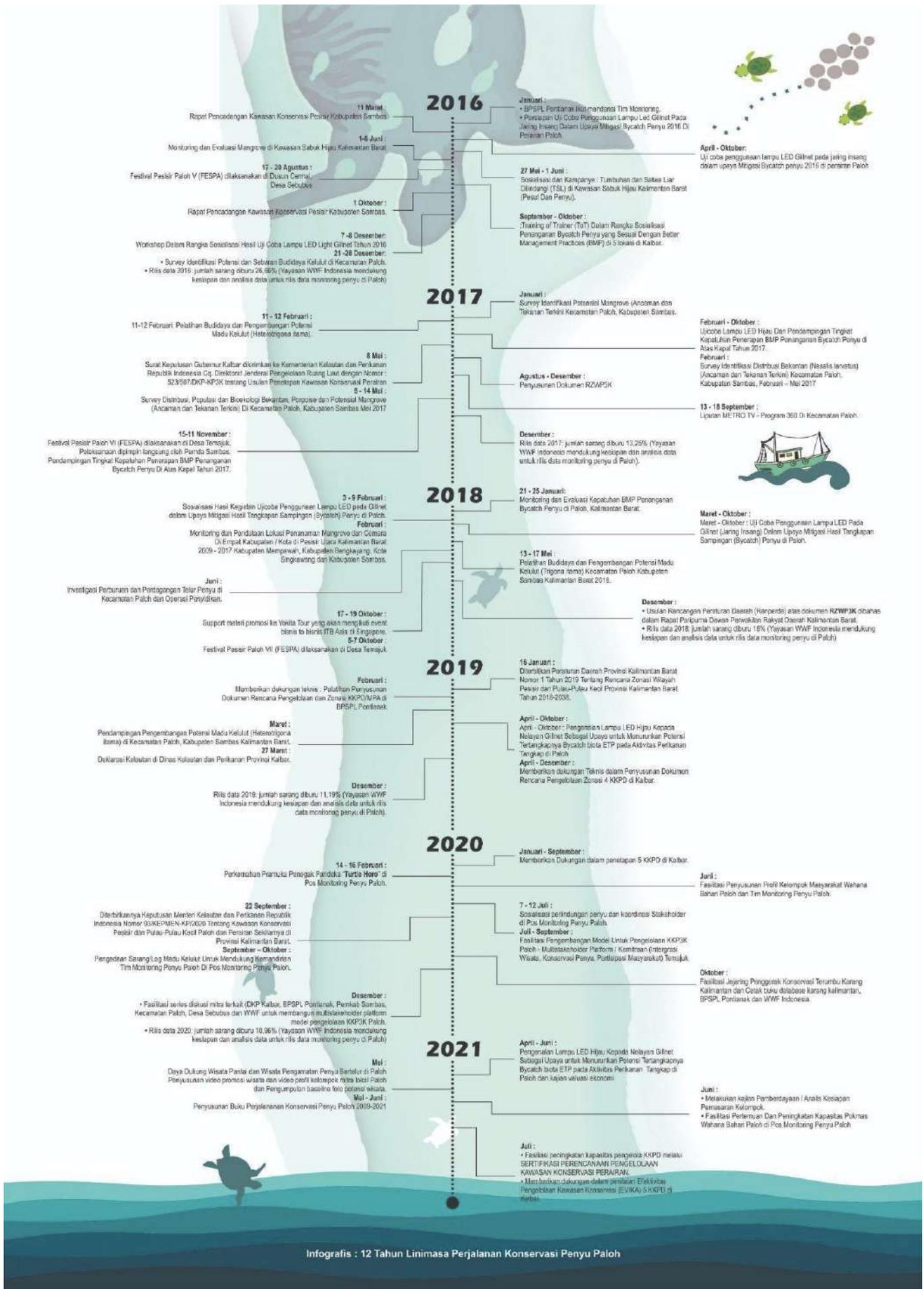
PIHAK TERLIBAT	Festival Pesisir Paloh (FESPA)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Asosiasi Tour and Travel (ASITA) Kalimantan Barat		◊	◊	◊	◊		
Asuransi Jasindo Singkawang							◊
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia							◊
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSP/L) Pontianak	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Bank Sampah Rosella					◊		
Biology Explorer – FMIPA UNTAN	◊						
Bujang Dara Pariwisata Khatulistiwa 2011-2013		◊					
Cahaya Sambas Multimedia TV							◊
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut		◊					
Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair)	◊	◊	◊	◊			
POLDA Kalimantan Barat							
Duta Museum Kalimantan Barat 2012		◊					
Flanelina Pontianak			◊				
Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sambas							◊
Generasi Muda Pariwisata Kubu Raya (GEMA)		◊	◊				
Generasi Pesona Indonesia Kabupaten Sambas							◊
HIMABIQ UNTAN			◊				
Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kalimantan Bara					◊		
Ikatan Bujang Dare Penyus Paloh			◊	◊	◊	◊	◊
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafuddin Sambas						◊	◊
Kalilaek Paloh			◊				
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kambau Borneo	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Paloh							◊
Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Temajuk				◊	◊		
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia							◊
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia							◊
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat		◊	◊	◊	◊		
Kepolisian Resort (Polres) Sambas	◊						
Koalisi Perempuan Indonesia Kabupaten Sambas					◊		
Komando Daerah Militer XII Tanjungpura Pontianak		◊	◊	◊			◊
Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Barat						◊	◊
Komunitas Earth Hour Pontianak			◊	◊	◊	◊	◊
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sambas							◊
Kwartir Daerah Kalimantan Barat							◊
Majelis Perempuan Melayu MABM Kabupaten Sambas							◊
Mangrove Conservation Foundation (MCF) Pemangkat	◊						
Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) Paloh	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) Pontianak				◊			
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII (LANTAMAL) Pontianak						◊	◊
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga							◊
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Pemerintah Desa Nibung		◊					
Pemerintah Desa Sebusub	◊	◊			◊		
Pemerintah Desa Temajuk			◊	◊		◊	◊
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) KOSTRAD 305 Kujung Tengkorak	◊						
Persatuan Orang Melayu Kabupaten Sambas							◊
Persatuan Orang Melayu Kalimantan Barat						◊	
Politeknik Negeri Pontianak						◊	◊
Politeknik Negeri Sambas						◊	◊
Pondok Pesantren Ahlaqul Karimah	◊	◊					
Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Kalimantan Barat	◊						
Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pontianak							◊
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak	◊	◊	◊	◊	◊		
Tim Ekspedisi Khatulistiwa 2012	◊						
Tokoh Masyarakat Kecamatan Paloh	◊						
Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat							◊
Universitas Tanjungpura Pontianak							◊
Yayasan CAMAR			◊	◊			
Yok Kita Jelajah Khatulistiwa Pontianak		◊	◊				

Gambar 18. Tabel matriks keterlibatan multipihak dalam kegiatan Festival Pesisir Paloh.



# LINIMASA PERJALANAN KONSERVASI PENYU PALOH





Gambar 19. Lini masa kegiatan konservasi Yayasan WWF Indonesia di Paloh, rentang tahun 2009-2021.

**Tim Yayasan WWF Indonesia  
site Paloh:**

1. Dwi Suprpti
2. Hendro Susanto
3. Muhammad Hisyam
4. Agri Aditya
5. Sujarwo Arif Widodo
6. Janarius Ipung Wijanarto
7. Yudi Almadino
8. Redi Mahardika
9. Yanto Aldiano Anong
10. Hendri
11. Mulyadi
12. Heriyanto
13. Aminuddin
14. Idham Faritsi

**Tim Penanggulangan  
Tangkapan Sampung  
(Bycatch):**

1. Ahmad Hafizh Adyas
2. Dwi Ariyoga Gautama
3. Wahyu Teguh Prawira
4. Agus Jaenudin
5. Muhammad Yusuf
6. Sadri
7. Zulfian
8. Abdurrachman Maulidi
9. Handayani
10. Sulastio Wili
11. Wahyu Hendri
12. Erwin Septianto Nugroho
13. Teguh Febrianto
14. Ega Tri Saputra

**Tim Yayasan WWF Indonesia  
Program Marine and  
Fisheries:**

1. Imam Musthofa Zainudin
2. Dewi Satriani
3. Saipul Hidayat Siagian
4. Susilowati Lestari
5. Joni Trio Wibowo
6. Candhika Yusuf
7. Mohamad Iqbal
8. Hikmah Cut Ramadhana
9. Muhammad Erdi Lazuardi
10. I.B. Windia Adnyana
11. (Almarhumah) Creusa Hitipeuw

15. Sanny Tri Utami
16. Deny Arwan Solihin
17. Emitha Wulandari
18. Tyas Woro Prasasti
19. M. P. Aji Nugroho
20. Fahrul Armalinsyah
21. Dulhaji
22. Taufik Ikhsan
23. Muhammad Widodo
24. G Juan Ardy
25. Hermanto
26. John Hsing-I Wang
27. Michael Gerard Osmond

**Tim Yayasan WWF Indonesia  
Program Kalimantan Barat:**

1. M. Hermayani Putera
2. Albertus Tjiu
3. Jimmy Syahirsyah
4. Anas Nashrullah
5. Maria Theresia
6. Amri Yahya
7. Ridham Supriyanto
8. Ismu Widjaya
9. Patria Palgunadi
10. Hermas Rintik Maring
11. Zulkifli
12. Radius Haraan
13. Agus Priyadi

**Tim Konsultan – Tenaga Ahli  
Pendukung:**

1. Elsa Navitalian
2. Victor Fidelis Sentosa
3. Abroorza A. Yusra
4. Zulkifli HZ
5. Pratita Budi Utami
6. Abdul Rahman As Syakur
7. (alm) Sugeng Hendratno
8. Andi Fachrizal
9. Maulid Dio Suhendro
10. M. Nouval Isnin Akbari
11. Mohamad Aluis Bin Hamri
12. Udiyansyah



*Tim Paloh 2017*

# DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Sambas. 2019. Kecamatan Paloh dalam Angka. Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia: BPS Kabupaten Sambas. Diakses dari <https://sambaskab.bps.go.id/publication/2019/09/26/cdfeddc483a746c607378cb3/kecamatan-paloh-dalam-angka-2019>
- Humas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021.
- Fenomena Langka, Penyu Belimbing Raksasa Muncul di Pantai Paloh. Jakarta, Indonesia: KKP Republik Indonesia. Diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/34524-fenomena-langka-penyu-belimbing-raksasa-muncul-di-pantai-paloh>
- NOAA Fisheries. 2022. Leatherback Turtle. Amerika Serikat: NOAA Fisheries. Diakses dari <https://www.fisheries.noaa.gov/species/leatherback-turtle>
- Fadhilah, Rizky & Rizkika, Kiki. 2015. Laba Lebah Tanpa Sengat. Jakarta: Trubus Swadaya.
- Vinolia. 2018, 25 Februari. Usai Konsumsi Penyu, Puluhan Warga Mentawai Keracunan, Tiga Tewas. Mongabay. Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/02/25/usai-konsumsi-penyu-puluhan-warga-mentawai-keracunan-tiga-tewas/>
- Yayasan WWF Indonesia. 2012. Status Populasi Penyu Di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. (Laporan Yayasan WWF Indonesia, 2012).

# UCAPAN TERIMA KASIH

Yayasan WWF Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh mitra terkait yang telah bersama-sama mendukung upaya konservasi penyu di Pesisir Paloh. Semoga upaya ini tetap berlanjut demi keberlanjutan populasi penyu serta kesehatan ekosistem pesisir dan laut di Paloh.



**Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia**



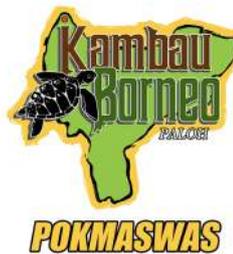
**Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Barat**



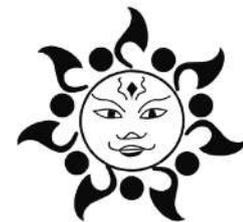
**Pemerintah  
Kabupaten Sambas**



**Kelompok Masyarakat  
Wahana Bahari Paloh**



**Kelompok Masyarakat Pengawas  
Kambau Borneo**



**KELOMPOK SADAR WISATA  
PANTAI CERMAK KAMPK INDAH**

**Kelompok Sadar Wisata  
Pantai Kampak Indah**



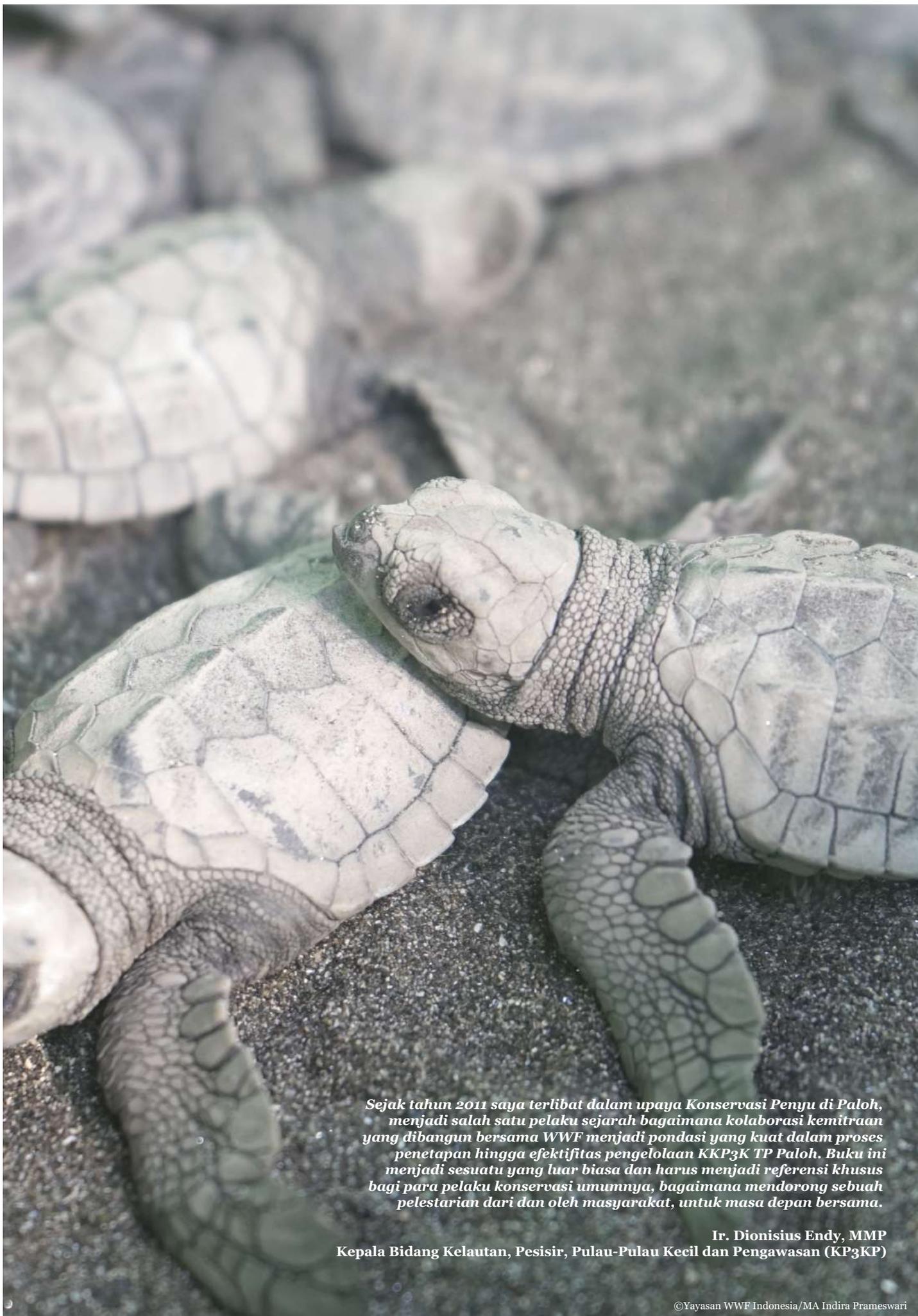
**Universitas Tanjungpura  
Pontianak**



**Politeknik Negeri  
Pontianak**



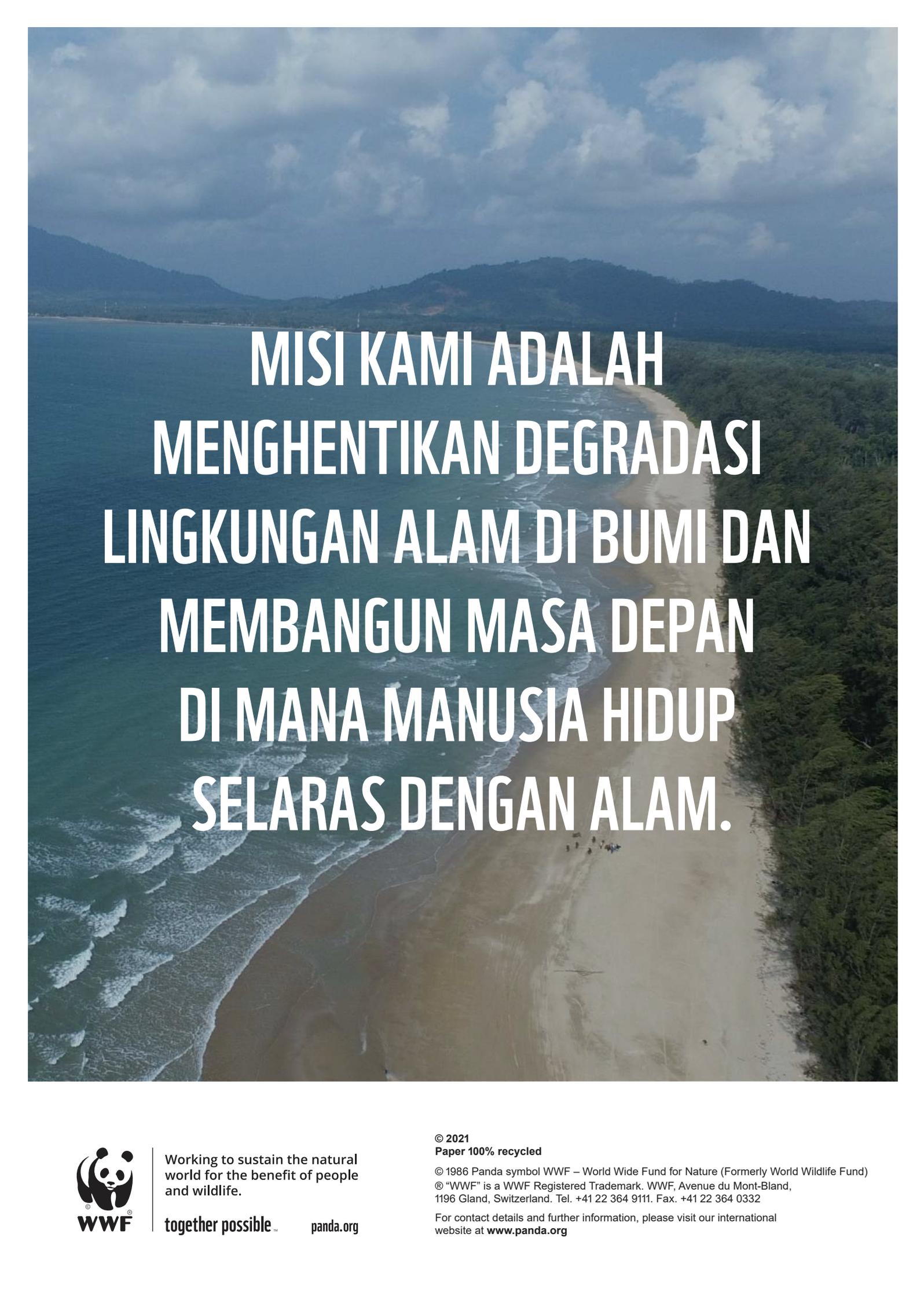
**Politeknik Negeri  
Sambas**



*Sejak tahun 2011 saya terlibat dalam upaya Konservasi Penyu di Paloh, menjadi salah satu pelaku sejarah bagaimana kolaborasi kemitraan yang dibangun bersama WWF menjadi pondasi yang kuat dalam proses penetapan hingga efektifitas pengelolaan KKP3K TP Paloh. Buku ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan harus menjadi referensi khusus bagi para pelaku konservasi umumnya, bagaimana mendorong sebuah pelestarian dari dan oleh masyarakat, untuk masa depan bersama.*

**Ir. Dionisius Endy, MMP**  
Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan (KP3KP)

©Yayasan WWF Indonesia/MA Indira Prameswari



**MISI KAMI ADALAH  
MENGHENTIKAN DEGRADASI  
LINGKUNGAN ALAM DI BUMI DAN  
MEMBANGUN MASA DEPAN  
DI MANA MANUSIA HIDUP  
SELARAS DENGAN ALAM.**



Working to sustain the natural world for the benefit of people and wildlife.

together possible [panda.org](http://panda.org)

© 2021  
Paper 100% recycled

© 1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund for Nature (Formerly World Wildlife Fund)

® “WWF” is a WWF Registered Trademark. WWF, Avenue du Mont-Bland, 1196 Gland, Switzerland. Tel. +41 22 364 9111. Fax. +41 22 364 0332

For contact details and further information, please visit our international website at [www.panda.org](http://www.panda.org)